



**KAJIAN HUKUM TERHADAP EKSISTENSI KOPERASI
SEKOLAH SEBAGAI BENTUK KHUSUS UNIT EKONOMI
DALAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN**

TESIS

**DISUSUN DALAM RANGKA MEMENUHI PERSYARATAN
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

Parmanto

NIM: B4 A. 098. 071

**PROGRAM PASCA SARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2002**

ABSTRAKSI

Parmanto, mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro-konsentrasi Hukum Ekonomi dan Teknologi, 1998: **Kajian Hukum terhadap Eksistensi Koperasi Sekolah sebagai Bentuk Khusus Unit Ekonomi dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan.**

Krisis ekonomi di Indonesia yang berkepanjangan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakatnya. Masyarakat sekolah dengan para siswa yang merupakan mayoritasnya adalah salah satu kelompok masyarakat yang termasuk terkena dampak krisis tersebut. Kesulitan ekonomi yang mengakibatkan para siswa kurang mampu memenuhi peralatan yang dibutuhkan dalam proses pendidikannya, membangunkan mereka akan kenyataan bahwa koperasi sebagai unit ekonomi yang pada era sebelum krisis ekonomi tidak dihiraukan sekarang mulai diperhitungkan karena pada kenyataannya koperasi relatif dapat membantu mengurangi beban ekonomi mereka, bahkan di beberapa sekolah, koperasinya mampu meningkatkan kualitas pendidikan para anggotanya. Keadaan tadi melandasi studi tentang eksistensi koperasi Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan ini.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang: 1/ pelaksanaan Undang-undang Koperasi No 25/th 1992 di koperasi SMU dan SMK di kota Semarang, 2/ kemampuan koperasi SMU dan SMK di kota Semarang dalam memenuhi kebutuhan anggota-anggotanya, 3/ tanggapan ide penggabungan koperasi sekolah dalam rangka peningkatan eksistensinya.

Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data penelitian dilaksanakan melalui kuesioner, wawancara dan observasi langsung di lapangan.

Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah 100 (seratus) pembina dari Dinas Pelayanan Koperasi Kota Semarang, Dinas Pendidikan Nasional Kota Semarang, dan pembina dari koperasi-koperasi sekolah yang diteliti, dan 100 (seratus) anggota dan pengurus koperasi-koperasi sekolah yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1/eksistensi koperasi sekolah cenderung meningkatkan kualitas pendidikan para anggotanya, meskipun 2/ implementasi Undang-undang No 25/th. 1992 belum maksimal, misalnya: aspek sukarela, dan rapat anggota tahunan cenderung diabaikan, padahal kedua aspek itu merupakan ciri koperasi yang sangat vital. Ide penggabungan koperasi SLTA se kota Semarang cenderung didukung dengan baik oleh sebagian besar koperasi-koperasi SLTA, implikasinya adalah bahwa koperasi memang merupakan unit ekonomi kerakyatan yang sangat dibutuhkan di era krisis seperti sekarang ini, untuk itulah eksistensi koperasi perlu ditingkatkan menjadi Gabungan Koperasi Sekolah Kota Semarang.

ABSTRACT

Parmanto, a student of post graduate studies of Law Faculty of Diponegoro University whose the major is Law of Economy and Technology, 1998. **The Law Study of the Existence of a School Cooperative as a Specific Form of Economic Unit in Improving the Educational Quality.**

All levels of Indonesian societies feel the effects of the crisis of Indonesia economy that seems have no end. School members with the students as the majority is included as one of the social groups affected by that crisis. The economical problem which brings about their less capability to complete their schooling needs wakes them up to take into account cooperatives in their school which, in fact, as an economic unit can help them to solve their problem. This did not happen in the previous era, the era when they never cared about school cooperatives. They may even help the students as members of those cooperatives to improve the quality of their education. All these inspire me to conduct a study on the existence of school cooperatives in both the Senior High Schools (SHS) and Vocational High Schools (VHS) through out Semarang in of improving the educational quality.

The aims of the study are to get pictures of 1/ the implementation of the Cooperative Rules No 25/1992 in those school-cooperatives, 2/ the capacities of both the SHS's and VHS's cooperatives in fulfilling their members' needs, and 2/ the responses toward an idea of joining the school cooperatives in Semarang in order to improve their existence.

The methodology used in this study is qualitative with an empiric judicial approach. The technique of gathering the data is done by giving questionnaires, interveing and observing directly on the sites.

The subjects of this study are 100 (a hundred) of cooperative consultants from the Cooperative Service Institution of Semarang City, the National Education Institution of Semarang City as well as the ones from every school cooperative being studied, and 100 (a hundred) members and committee of the school cooperatives studied.

The results reveal that 1/the existence of the school cooperatives tend to improve the quality of the members' education, but 2/the Cooperative Constitution Number 25/1992 is not yet implemented fully. The examples of the latter are: the freedom to be the member, the yearly member meeting, even those two are the vital cooperative characteristics. Surprisingly the majority of the members seem to support the idea of joining the school cooperatives throughout Semarang. This implies that cooperatives as the smallest economical public units are likely to be mostly needed in the crisis of economy.

**KAJIAN HUKUM TERHADAP EKSISTENSI KOPERASI
SEKOLAH SEBAGAI BENTUK KHUSUS UNIT EKONOMI
DALAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN**

Disusun Oleh:


Parmanto
NIM: B4 A. 098.071

Dipertahankan didepan Dewan Penguji


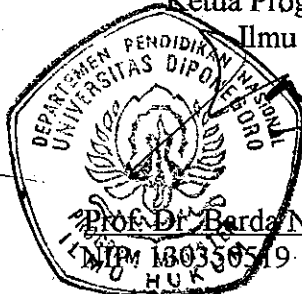
Pada tanggal: 2 Juli 2002

Tesis ini telah diterima
sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing


Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, S.H.
NIP: 130368053

Mengetahui
Ketua Program Magister
Ilmu Hukum



Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.
NIP: 130350519

Tesis ini saya persembahkan untuk:

*Bimo keponakanku, Cisil anakku satu satunya
dan Wiwik istriku.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunianya kami dapat menyelesaikan tesis ini-yang merupakan tugas akhir studi program pasca sarjana ilmu hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Kami sepenuhnya sadar bahwa keberhasilan ini tidaklah lepas dari bimbingan, bantuan dan dorongan beberapa pihak. Untuk itu kami ingin mengungkapkan rasa terimakasih kami yang dalam dan tulus kepada:

1. Ibunda Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, S.H., yang dengan sangat sabar membimbing kami dari awal sampai akhir pembuatan tesis ini,
2. Bapak Ketua Program yang telah memberikan dukungan moral sehingga kami dapat menyelesaikan studi S-2 ini,
3. Ibu Wiletno, S.H. M.S. yang juga telah banyak memberikan dorongan dan arahan akademik sehingga meluaskan wawasan kami dalam menulis tesis ini,
4. Segenap dosen program pasca sarjana fakultas hukum Universitas Diponegoro atas semua ilmu, saran dan bimbingan yang diberikan selama masa studi kami.
5. Segenap responden dan koperasi-koperasi sekolah, Dinas Pelayanan Koperasi Kota Semarang dan Dinas Pendidikan Nasional Kota Semarang yang telah membantu kami memberikan data yang kami butuhkan.

Semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, Juni 2002

Parmanto

DAFTAR ISI

Halaman Judul	I
Abstraksi (versi Bahasa Indonesia)	II
Abstraksi (versi Bahasa Inggris)	III
Halaman Pengesahan	IV
Halaman Persembahan	V
Kata Pengantar	VI
Daftar Isi	VII
Daftar Diagram	X

BAB 1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	6
1. Pendekatan Masalah	6
2. Spesifikasi Penelitian	7
3. Lokasi Penelitian	7
4. Penentuan Sampel	7
5. Teknik Pengumpulan Data	9
6. Analisa Data	10
F. Kerangka Pemikiran	11
G. Sistematika Penulisan Tesis	13

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Koperasi Pada Umumnya	15
1. Eksistensi Koperasi dalam Sistem Ekonomi Indonesia	15
1.1 Pengertian Koperasi	15
1.2 Manajemen Koperasi	21
1.2.1 Arti Manajemen	21
1.2.2 Manajemen Koperasi	24
1.2.3 Tataan Manajemen Koperasi	27
1.3 Peraturan Hukum tentang Koperasi	28
2. Azas Koperasi	34
3. Sendi Dasar Koperasi	36
4. Peranan Koperasi	39
5. Prinsip dan Ciri Koperasi	41
5.1 Prinsip Rockdale	42
5.2 Prinsip Koperasi menurut International Cooperation Association	43
6. Jenis dan Bentuk Koperasi	45
6.1 Jenis Koperasi	45
6.2 Bentuk Koperasi	47
7. Alat Perlengkapan Koperasi	49
8. Pendirian Koperasi	51

9. Modal Koperasi	52
10 Koperasi Soko Guru Ekonomi Nasional Indonesia	55
B. Eksistensi Koperasi Sekolah	59
1. Pengertian Koperasi Sekolah.....	59
2. Dasar Hukum Pembinaan Koperasi Sekolah	62
3. Tataan Organisasi dan Pengelolaan Koperasi Sekolah	66
4. Modal Koperasi Sekolah.....	69
5. Kegiatan Usaha Koperasi Sekolah	71
C. Peranan Koperasi Sekolah dalam Pendidikan	74
1. Pengertian dan Kualitas Pendidikan	74
1.1 Pengertian Pendidikan	74
1.2 Kualitas Pendidikan	76
2. Kedudukan Koperasi dalam Pendidikan	77
2.1 Peranan Koperasi secara Umum	77
2.2 Kondisi Sekarang	79
2.3 Kaitan Pendidikan dengan Ekonomi	81
2.4 Peranan Koperasi dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan	82
3. Tinjauan terhadap Kondisi Koperasi Sekolah SMU dan SMK	83
3.1 Pengertian Koperasi	84
3.2 Tujuan	85
3.3 Keanggotaan	86
3.4 Ketatalaksanaan (Manajemen)	87
3.5 Kegiatan Usaha	91
3.6 Permodalan	93
4. Pengembangan Koperasi Sekolah dimasa Mendatang	94
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANNYA	98
A. Hasil Penelitian yang Berasal dari Pembina Koperasi Sekolah dan Pembahasannya.....	99
a. Pelaksanaan Undang-Undang Koperasi pada Koperasi SMU dan SMK di kota Semarang	99
b. Kemampuan Koperasi SMU dan SMK dikota Semarang dalam Memenuhi Kebutuhan Anggotanya	105
c. Proses Penggabungan Koperasi Sekolah dalam rangka Meningkatkan Eksistensinya	113
B. Hasil Penelitian yang Berasal dari Warga dan Pengurus Koperasi Sekolah dan Pembahasannya	117
a. Pelaksanaan UU Koperasi pada Koperasi SMU dan SMK di kota Semarang	117
b. Kemampuan Koperasi Sekolah dalam Memenuhi Kebutuhan Anggotanya	133
c. Proses Penggabungan Koperasi Sekolah dalam rangka Meningkatkan Eksistensinya	144
BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN	149
A. Kesimpulan.....	149
B. Saran	151

DAFTAR PUSTAKA.....	153
LAMPIRAN.....	
1: Catatan Wawancara dengan Pembina Koperasi dari Dinas Pelayanan Koperasi Kota Semarang tanggal 15 Januari 2001	XI
2: Catatan Wawancara dengan Pembina dari Dinas Pendidikan Nasional Kota Semarang dan Pembina dari Beberapa SLTA di kota Semarang, 22 Januari 2001 dan Wawancara Khusus dengan Pembina Koperasi SMK, Soelarno, BA, tanggal 5 Pebruari 2001	XII
3: Catatan Wawancara dengan Pengurus dan Siswa Kopearsi SMU N I, SMU N IX, SMU N XII, SMU N Mijen, SMK N XI, SMK N VII, dan SMKK N pada 23 sampai 25 Januari 2001.....	XIII
4: Catatan Pengamatan di SMU N Mijen, SMK N XI, dan SMK N VII, tanggal 3 sampai 11 Juni 2001.....	XIV
5: Catatan Pengamatan di SMU N Mijen, SMK N XI, dan SMK N VII, tanggal 3 sampai dengan 11 Juni 2001.....	XIV
5: Catatan Pengamatan di SMK N III, SMU N I, dan SMU N II, tanggal 12 sampai dengan 22 Juni 2001.....	XV
6: Surat Edaran Ka. Kanwil Dep. Koperasi dan PKK Prop. Jateng No 463/KWK.II/PKK/III/1998, tanggal 25 Maret 1998 tentang Nama Koperasi Sekolah yang Terdaftar	XVI
7: Surat Direktur Jenderal Pembinaan Koperasi Perkotaan No:285/PKK/III/1998 tentang Naskah Keputusan Bersama tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pengembangan Koperasi Sekolah Menjadi Unit Otonomi	XVIII
8: Surat Keputusan Menteri Transmigrasi dan Koperasi No:638/SKPTS/MEN/1974 tentang Ketentuan Pokok Mengenai Koperasi Sekolah	XXXII
9: Susunan Program Pendidikan dan Pelatihan Keahlian Teknik Mekanik Industri dan Sekretaris	XLII
10: Suurat Gubernur Kepala Daerah TK I Jawa Tengah No: 518/9138, 1 Juni 1998	XLV
11: Daftar Jumlah Sekolah dan Jumlah Koperasi Sekolah di Jawa Tengah	LV
12: Kuesioner untuk Pembina Koperasi Sekolah	LVII
13: Kuesioner untuk Kepala Sekolah	LX
14: Kuesioner untuk Anggota dan Pengurus Koperasi Sekolah	LXIII

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1: Alat/perangkat untuk pembinaan.....	101
Diagram 2: Jumlah koperasi sekolah	105
Diagram 3: Kedudukan koperasi sekolah.....	107
Diagram 4: Usaha & anggota koperasi sekolah.....	108
Diagram 5: Kemampuan koperasi sekolah dalam memenuhi kebutuhan Anggota	110
Diagram 6: Pembelian barang dikoperasi sekolah dan peningkatan nilai	111
Diagram 7: Respon terhadap gagasan penggabungan	114
Diagram 8: Status koperasi gabungan.....	115
Diagram 9: Kerja pengurus koperasi	118
Diagram 10: Tugas pengurus koperasi sekolah	119
Diagram 11: Manajer toko	120
Diagram 12: Rapat Anggota Tahunan	123
Diagram 13: Sukarela	125
Diagram 14: Wajib menjadi anggota	126
Diagram 15: Kepemilikan AD/ART	129
Diagram 16: Gotong royong	132
Diagram 17: Kemampuan koperasi dalam pemenuhan kebutuhan anggota	133
Diagram 18: Harga barang-barang di koperasi sekolah	135
Diagram 19: Peningkatan nilai dan pembelian barang di koperasi sekolah	138
Diagram 20: Berdirinya koperasi	140
Diagram 21: Keterlibatan anggota koperasi dalam pengelolaan	142
Diagram 22: Respon terhadap Gabungan Koperasi	145
Diagram 23: Personil pengurus Gabungan Koperasi Sekolah	145
Diagram 24: Pembentukan pengurus Gabungan Koperasi Sekolah	147

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perekonomian Indonesia dewasa ini berada dalam masa transisi yang berdampak tidak sehat sebagai akibat dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Perubahan-perubahan penting dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka menata berbagai sektor pembangunan untuk segera keluar dari krisis tersebut. Perubahan yang dilakukan sudah tentu banyak berpengaruh terhadap berbagai relung kehidupan baik ekonomi, politik, keamanan maupun sosial budaya seperti yang kita rasakan dan alami beberapa tahun terakhir ini.

Dibidang pendidikan, berdasarkan informasi awal yang diberikan oleh beberapa kepala sekolah di kota Semarang, pengaruh krisis ekonomi sangat dirasakan para siswanya yaitu dengan menurunnya kemampuan mereka membeli peralatan belajar demi kelengkapan keperluan pendidikannya. Hal ini sangat dirasakan terutama oleh siswa yang orang tuanya adalah masyarakat menengah kebawah, dan cenderung berdampak mengganggu kelancaran proses belajar mereka. Berdasarkan pengamatan awal¹ yang saya lakukan terhadap murid-murid

¹ Pengamatan di SMU Negeri Mijen, SMK Negeri XI, SMK Negeri VII pada tanggal 3 Juni sampai dengan 11 Juni 2001.

ditiga sekolah menengah atas, rata-rata mereka belum mampu membeli peralatan belajarnya secara lengkap, lebih-lebih yang harganya bagi mereka relatif mahal, seperti: alat untuk menggambar teknik ('rapido'), ber-bagai jenis alat perlengkapan praktek. Untuk siswa sekolah kejuruan (SMK) yang pada umumnya kelas ekonomi orang tuanya adalah rendah keadaannya bahkan lebih menyedihkan berhubung disekolah ini peralatan pendidikan pokoknya lebih mahal harganya, seperti: alat pengering rambut (untuk siswa jurusan tata rias), pengocok telur (untuk siswa jurusan tata boga), mesin jahit (untuk siswa jurusan tata busana), meja gambar (untuk siswa jurusan sipil) dan lain-lain. Alat-alat tersebut bagi mereka adalah vital untuk melatih ketrampilan kejuruannya secara maksimal sehingga keyakinan diri, modal pertama untuk menjadi wira-usaha kelak bila mereka lulus cenderung akan meningkat. Ada lagi persoalan yang tidak kalah pentingnya yang dihadapi para siswa yaitu keterlambatan dalam membayar uang sekolah, membayar uang kost (pondokan). Semua contoh-contoh diatas cenderung mengganggu kelancaran proses pendidikan mereka yang pada akhirnya akan mengurangi kualitas pendidikannya.

Penemuan awal lain yang berkaitan dengan kondisi ekonomi yang tidak sehat yang sedang kita alami² adalah bahwa belum semua koperasi sekolah diber-

² Pengamatan di SMK Negeri III, SMU Negeri IX, SMU Negeri I, SMU Negeri II pada tanggal 12 Juni sampai dengan 22 Juni 2001.

dayakan secara maksimal. Menurut pendapat saya justru eksistensi koperasi inilah yang sebetulnya harus berperan dalam mengatasi kesulitan-kesulitan tadi. Misalnya keterlambatan membayar uang sekolah akan dapat teratasi bila koperasi simpan-pinjam sekolah berfungsi dengan baik, yaitu dengan cara meminjam uang dan pengembaliannya bisa diangsur. Demikian pula ketika para siswa harus membeli peralatan sekolah yang mahal, bila koperasinya baik mereka akan dapat membeli dikoperasi sekolahnya dengan cara mengangsur.

Koperasi yang merupakan 'soko-guru' sistim perekonomian nasional Indonesia, perlu dilestarikan kehidupannya agar dapat tetap hidup subur di bumi Indonesia dan dihati warga negaranya. Eksistensi koperasi kecil ini dilingkungan Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dikota Semarang kelihatan telah mendapat tempat yang strategis sebagai institusi ekonomi yang relatif dapat memenuhi kebutuhan anggotanya. Meskipun secara yuridis keberadaan koperasi sekolah masih taraf pra-koperasi, tetapi hampir semua SMU dan SMK memiliki koperasi sekolah.

Kalau kita melihat koperasi sebagai suatu sistem maka meskipun keberadaannya didalam suatu lingkungan adalah kecil namun mempunyai karakteristik yang cenderung khas dibanding dengan institusi lain. Berangkat dari kedudukan dan kenyataan bahwa koperasi sekolah adalah unit ekonomi yang berwatak sosial, kiranya perlu mendapat perhatian yang serius agar dapat lebih berperan dalam proses meningkatkan belajar siswa yang menjadi anggota utamanya dan kenyataan

bahwa koperasi-koperasi sekolah masih ada yang belum diberdayakan secara maksimal inilah yang mendorong saya untuk mengadakan penelitian terhadap implementasi Undang-undang koperasi di Sekolah-sekolah Lanjutan Tingkat Atas di kota Semarang ini.

B. PERMASALAHAN

Dari latar belakang diatas kiranya dapat disimpulkan bahwa eksistensi koperasi sekolah adalah bermanfaat bagi para siswa, untuk itu kiranya diperlukan suatu strategi yang berarti dari yang berwenang untuk meningkatkan dan memberdayakan koperasi sekolah berdasarkan konsep hukum yang jelas dan dapat mengakomodasikan berbagai kepentingan dalam usaha peningkatan kualitas pendidikan. Permasalahan berikut ini adalah upaya mendapatkan masukan untuk mencapai tujuan peningkatan koperasi sekolah seperti yang dikemukakan diatas.

1. Bagaimana pelaksanaan Undang-undang Koperasi di koperasi SMU dan SMK di kota Semarang?
2. Sudah mampukah koperasi SMU dan SMK tersebut memenuhi kebutuhan anggotanya?
3. Bagaimanakah proses penggabungan koperasi-koperasi sekolah tersebut dalam rangka meningkatkan eksistensinya?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam

penelitian ini adalah:

1. Memperoleh gambaran sejauh mana pelaksanaan Undang-undang Koperasi di koperasi-koperasi SMU dan SMK di kota Semarang.
2. Memperoleh gambaran kemampuan koperasi-koperasi SMU dan SMK tersebut dalam memenuhi kebutuhan anggota-anggotanya.
3. Memperoleh gambaran proses penggabungan koperasi-koperasi tersebut dalam rangka meningkatkan eksistensinya.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dilaksanakan penelitian ini adalah:

1. Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran yang berarti bagi pembuat kebijakan yang berkaitan dengan usaha pengembangan dan peningkatan keberadaan koperasi sekolah di SMU dan SMK di kota Semarang.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan publik dibidang perundang-undangan yang berkaitan dengan pembinaan, pengembangan koperasi sekolah agar dapat lebih berperan dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi pada umumnya dan peningkatan kualitas pendidikan pada khususnya.
3. Sebagai penelitian awal yang diharapkan dapat ditindak lanjuti oleh pihak yang berkepentingan dan yang berwewenang untuk mengadakan penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan peningkatan eksistensi koperasi.

E. METODE PENELITIAN

1 Pendekatan Masalah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris³. Penentuan pendekatan ini didasari oleh kenyataan bahwa dalam penelitian ini data-data yang diperoleh mayoritas didapat dari kegiatan observasi lapangan. Observasi lapangan ditujukan untuk melihat penerapan pelaksanaan hukum secara konkrit, juga merupakan usaha penggalian secara mendalam terhadap eksistensi koperasi sekolah dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas pendidikan. Jadi dalam penelitian ini ada 2 (dua) macam data yang diperoleh dan diolah, yaitu:

1. Data primer; yaitu data yang diperoleh dari kegiatan:
 - a. observasi di koperasi-koperasi sekolah.
 - b. penelitian lapangan.
 - c. wawancara
2. Data sekunder yang didapat dari kegiatan penelitian kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan koperasi sekolah baik yang terdapat di koperasi sekolah, Dinas Pelayanan Koperasi Kota Semarang maupun Dinas Pendidikan Nasional Kota Semarang.

³Matthew B. Miles, A. Michael Hubberman, *Analisa Data Kealitatif*, terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi, Universitas Indonesia Press, 1992, h. 15 – 21.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat eksploratif karena bertujuan untuk menemukan berbagai faktor berarti yang ditaksir secara lebih rinci dan mendalam pada suatu kesempatan yang lain dan dengan suatu rancangan penelitian yang lebih canggih.⁴

Dalam mencari berbagai faktor yang berarti peneliti melakukan penggalan sampai ketitik yang paling dalam sehingga mendapatkan informasi tentang kehidupan koperasi sekolah baik ditinjau dari segi yuridis, ekonomis, maupun sosial. Selanjutnya didapat gambaran yang mendukung eksistensi koperasi sebagai unit ekonomi.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil tempat di kota Semarang. Adapun instansi yang menjadi lokasi sasaran penelitian ini adalah Dinas Pelayanan Koperasi Kota Semarang, Dinas Pendidikan Nasional Kota Semarang dan koperasi-koperasi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di kota Semarang. Dipilihnya kota Semarang sebagai lokasi penelitian adalah karena Semarang merupakan ibukota propinsi yang cenderung dijadikan parameter perkembangan koperasi sekolah di daerah atau tempat-tempat lain di Jawa Tengah.

4. Penentuan Sampel

'Purposive sampling' adalah teknik penentuan sampel yang dipakai dalam penelitian kualitatif ini. 'Purposive sampling' adalah memilih informan atau

⁴ James A Black dan Dean J.Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, terjemahan E Koeswara (et al), ERESCO, Bandung, 1992 h. 67.

situasi tertentu yang dapat memberikan informasi yang mantap dan tepercaya mengenai elemen-elemen yang ada (karakteristik elemen-elemen yang tercakup dalam fokus/topik penelitian).

Untuk mendapatkan informasi yang lengkap sesuai dengan tujuan, responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Beberapa anggota dan pengurus koperasi SMU negeri beserta kepala sekolahnya. Dalam hal ini peneliti menentukan sebuah SMU di setiap kecamatan di kota Semarang.
- b. Beberapa anggota dan pengurus koperasi SMK negeri yaitu dengan mengambil secara variatif sesuai dengan jenis SMK yang ada di kota Semarang baik SMK yang konsentrasinya keteknikan (bangunan, elektronika, listrik, mesin dan otomotif) dan yang konsentrasinya non-keteknikan (kesejahteraan keluarga, ekonomi, grafika, kepariwisataan).
- c. Beberapa pejabat Dinas Pelayanan Koperasi Kota Semarang.
- d. Beberapa pejabat Dinas Pendidikan Nasional Kota Semarang.

Selain 'purposive sampling' peneliti juga menggunakan 'snow ball sampling', yaitu bergulirnya sampel informan yang satu ke sampel informan yang ⁵lain didasarkan pada kebutuhan informasi sehingga didapatkan informasi yang lengkap dan akurat. ⁶

⁵ Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi*, YA 3, Malang, 1990, h.56.

⁶ Ibid, h.60.

5. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, maka data yang dibutuhkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer sebagai data awal didapat melalui wawancara dan kuesioner, sedangkan data sekundernya diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data sekunder dibidang hukum (dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan sekunder.⁷ Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisi ilmu pengetahuan ilmiah yang baru dan mutakhir atau pengertian baru tentang fakta yang diketahui mengenai gagasan.⁸

Sesuai penjelasan diatas data dalam penelitian ini dibedakan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari:
 - a. Norma Dasar Pancasila.
 - b. Undang Undang Dasar 1945.
 - c. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan koperasi.
 - d. Peraturan dan kebijakan yang menyangkut pembinaan koperasi sekolah.

⁷ Ronny Hanintijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Semarang, 1998, h. 11.

⁸ Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, h.34.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer⁹, dalam penelitian ini meliputi:

- a. Makalah tentang koperasi.
- b. Kepustakaan yang ada hubungannya dengan koperasi.

Karena yang diutamakan adalah data primer maka dalam penelitian ini diberikan kuesioner baik ke koperasi-koperasi sekolah SMU dan SMK maupun ke instansi-instansi terkait yang disebutkan diatas.

6. Analisa Data

Pada tahap penyajian data, seluruh data yang diperoleh dikumpulkan dan diolah dengan kwantifikasi sederhana dalam bentuk prosentasi. Hal ini sesuai dengan pendapat pakar penelitian sebagai berikut:

Supaya metode yang digunakan dalam penelitian disebut metode ilmiah maka metode tersebut harus mempunyai kriteria sebagai berikut:

1. Berdasarkan fakta
2. Bebas dari prasangka (bias)
3. Menggunakan prinsip-prinsip analisa
4. Menggunakan hipotesa, bila diperlukan
5. Menggunakan ukuran-ukuran objektif
6. Menggunakan kuantifikasi¹⁰

Temuan-temuan yang diperoleh dari kuesioner dihitung prosentasinya dengan kwantifikasi sederhana kemudian hasilnya digambarkan dalam bentuk diagram-diagram berdasarkan prosentasi perolehan temuan, seperti contoh dibawah ini.⁹

⁹Hanintijo, *op. cit.*, h.12.

Data ini diambil dari 100 responden

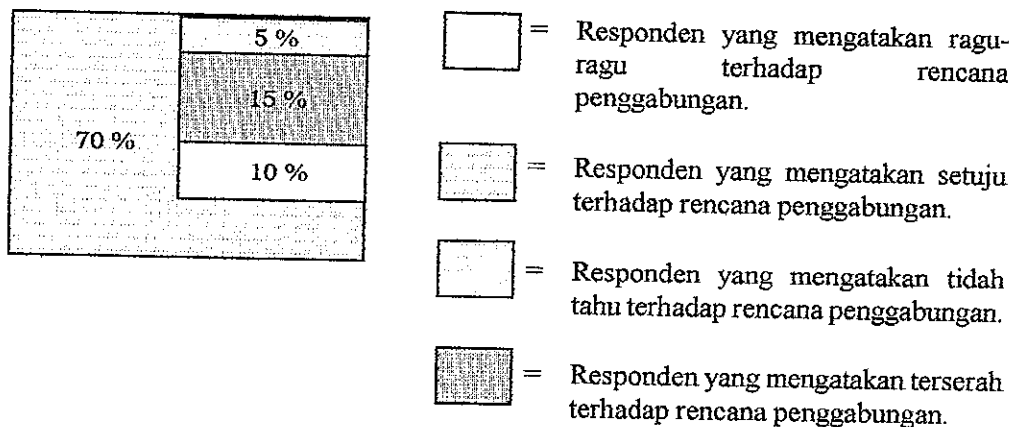


Diagram respon mengenai penggabungan koperasi-koperasi SLTA menjadi Koperasi Sekolah Kota Semarang.

Sedangkan data ¹⁰ yang diperoleh dari wawancara dimasukkan secara integratif dalam pembahasan hasil penelitian dalam bab tiga tesis ini, demikian juga temuan-temuan yang didapat dari buku-buku koperasi atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi yang diteliti menjadi acuan interpretasi normatif dan yuridis temuan penelitian ini. Hal ini dilakukan dengan tujuan supaya penjelasannya menyatu dan mudah dimengerti.

7. Kerangka Pemikiran

Salah satu tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indoensia. Penjabaran lebih lanjut tujuan tersebut ditegaskan dalam pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa sendi utama bagi pembangunan ekonomi

¹⁰ Nasir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, h. 44.

adalah demokrasi ekonomi yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila.

Perwujudan pasal 33 UUD 1945 adalah koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang harus dilestarikan. Salah satu bentuk koperasi yang ada di Indonesia adalah koperasi sekolah. Koperasi sekolah ada di hampir semua sekolah, mulai di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sampai di Sekolah Lanjutan Atas (SLTA). Peranan Koperasi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Negeri dalam usahanya mensejahterakan anggota-anggotanya secara optimal inilah yang membatasi kerangka pemikiran penelitian ini.

Krisis ekonomi Indonesia yang semakin hari semakin berkepanjangan dirasakan oleh seluruh masyarakat terutama oleh lapisan masyarakat menengah kebawah yang merupakan mayoritas masyarakat Indonesia. Kesulitan ekonomi ini membangunkan masyarakat akan kenyataan bahwa koperasi sebagai unit ekonomi yang dulunya kurang dihiraukan oleh anggota-anggotanya sekarang mulai diperhitungkan oleh anggota-anggotanya untuk mengurangi kesulitannya di bidang ekonomi. Dengan kata lain, koperasi kelihatan tumbuh aktivitasnya dan menjadi tumpuan harapan bagi anggota-anggotanya. Demikian pula yang terjadi di koperasi-koperasi sekolah, ketidak mampuan para siswa membeli alat-alat perlengkapan sekolah membuat mereka datang ke koperasi sekolahnya untuk mendapatkan bantuan. Koperasi sekolah sebagai unit ekonomi dirasakan dapat meringankan beban ekonomi anggotanya dengan memberi kemungkinan pembelian alat-alat sekolah dengan cara mengangsur bahkan memberi pinjaman uang

untuk pemenuhan uang sekolah yang belum mampu dibayar oleh mereka bila diperlukan. Namun tidak semua koperasi sekolah mampu meringankan beban kehidupan anggotanya, beberapa sekolah hanya memiliki koperasi yang 'apa adanya'. Belum tersedianya sumberdaya manusia yang handal sebagai pengelola koperasi, modal, hubungan, barangkali ada kaitannya dengan kurang berkembangnya koperasi sekolah seperti juga koperasi-koperasi yang lain.

Berangkat dari pesan politik perekonomian yang menetapkan bahwa koperasi merupakan gerakan ekonomi kerakyatan yang paling sesuai bagi pembangunan ekonomi di negara Republik Indonesia, bila dikaji secara mendalam cenderung sesuai dengan *founding father* ekonomi Indonesia, Drs M Hatta:

*Pasal 33 itu adalah sendi utama bagi politik perekonomian dan politik sosial Republik Indonesia. Dasar ekonomi rakyat mestilah usaha bersama dikerjakan secara kekeluargaan. Maksudnya ialah koperasi.*¹¹

Untuk memperoleh gambaran koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat, implementasi UU Koperasi No 25/th 1992 secara konkrit dilapangan perlu dikaji. Bagaimana UU Koperasi tersebut mengakomodir perkembangan koperasi sekolah sehingga koperasi sekolah tadi dapat membantu siswa meningkatkan pendidikannya.

G. SISTIMATIKA PENULISAN TESIS

Penulisan tesis ini dibagi menjadi 4 (empat) bab: pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil penelitian dan pembahasan, dan penutup.

¹¹ Melanie Srina Arief (ed), *Ekonomi Kerakyatan*, Mohammadiyah Press, Surakarta, 2000, h.ix.

Bab pendahuluan berisi penjelasan yang melatar belakangi penelitian dengan judul ‘ Kajian Hukum terhadap Eksistensi Koperasi Sekolah sebagai Bentuk Khusus Unit Ekonomi dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan’, yaitu adanya krisis ekonomi berkepanjangan yang membuat para siswa SLTA di kota Semarang menjadi kurang mampu membeli peralatan sekolahnya.

Bab dua berisi tinjauan pustaka, berisi penjelasan tentang studi pustaka yang dilakukan yang berfungsi sebagai dasar dan dukungan pemikiran dalam pembahasan hasil penelitian.. Sedangkan bab tiga dari tesis ini memuat hasil-hasil penelitian dan pembahasannya.

Bab terakhir, yaitu bab empat, memuat kesimpulan yang dibuat berdasarkan hasil-hasil penelitian yang didapat beserta saran-saran yang mungkin dapat dipertimbangkan tentang ‘Gabungan Koperasi Sekolah Kota Semarang’.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KOPERASI PADA UMUMNYA

1 Eksistensi Koperasi dalam Sistim Ekonomi Indonesia

1.1 Pengertian Koperasi

Undang-Undang Dasar 1945 pasal (33) ayat (1) mengatakan bahwa tatanan perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas-azas kekeluargaan. Kemudian dalam penjelasannya antara lain mengatakan bahwa kemakmuran masyarakat lah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi.

Koperasi di Indonesia merupakan alat demokrasi ekonomi dan mempunyai kedudukan strategis sebagai soko guru perekonomian nasional yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu tepat sekali kalau koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat perlu mendapat pembinaan dan didorong agar dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi. Koperasi harus dapat mengembangkan dirinya menjadi suatu lembaga ekonomi rakyat yang mandiri dan dalam perkembangan dan pertumbuhannya mengakar didalam masyarakat, agar dapat memperkokoh identitas dan budaya bangsa Indonesia.

Jadi koperasi selain berfungsi untuk mempersatukan golongan yang berekonomi lemah dan berusaha meningkatkan kesejahteraan hidupnya, disisi lain juga merupakan alat perjuangan dalam pembangunan ekonomi.

Penjelasan tentang koperasi sebagai lembaga ekonomi akan diuraikan dibawah ini.

Uraian tentang koperasi diawali dengan definisinya. Apakah definisi-definisi koperasi mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan koperasi. Pakar-pakar koperasi mendefinisikan koperasi secara berbeda-beda, sehingga ada banyak definisi koperasi yang kita dapat temukan. Definisi-definisi tersebut, bila dikaji sepertinya menyesuaikan dengan perkembangan zaman, sebagai berikut:

Koperasi, berdasarkan asal katanya , yaitu '*co-operation*' (bahasa Inggris) berarti usaha bersama.¹² Tetapi tidak setiap bentuk organisasi yang melakukan atau melaksanakan usaha atau pekerjaan bersama disebut koperasi karena koperasi mempunyai ciri-ciri tertentu. 'Usaha bersama' yang dimaksud dalam definisi tadi adalah usaha dari orang-orang yang senasib dan secara sukarela sepakat , ikhlas berusaha meningkatkan kesejahteraan anggota-anggotanya melalui perusahaan yang dikelola secara demokratis. Definisi-definisi yang lain adalah sebagai berikut:

Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk memenuhi keperluan hidupnya, mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi yang didahulukan adalah kepentingan bersama bukan keuntungan.¹³

Koperasi adalah suatu perkumpulan orang-orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan.¹⁴

¹² Hendrojogi, *Koperasi, Azas-azas dan Praktik*, Raja Grafindo Persada, 1983, h. 19

¹³ Revinson Bawsir, *Koperasi Indonesia*, BPFE, Yogyakarta, 1997, h. 4.

¹⁴ Revrison Bawsir, *loc cit.*

Dari dua definisi diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam koperasi terkandung dua unsur, yaitu:

1. Koperasi sebagai suatu unit ekonomi dalam melaksanakan usahanya harus berusaha memenuhi kebutuhan ekonomi anggota-anggotanya semaksimal mungkin.
2. Dengan menyadari bahwa koperasi adalah perkumpulan orang-orang, maka dalam usaha memenuhi kebutuhan anggota-anggotanya koperasi tidak diperkenankan untuk menjadikan keuntungan sebagai titik tolak usahanya.

Definisi-definisi yang lain adalah seperti berikut ini:

Koperasi adalah suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.¹⁵

Koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang menghimpun diri secara sukarela dan bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.¹⁶

Perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan kelu-ar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan, menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.¹⁷

¹⁵ Hendrojogi, *op.cit.*, h. 20.

¹⁶ Prathama Rahardja, *Ekonomi 2*, Intan Pariara, Klaten, 1995, h. 266.

¹⁷ Arifin Sitio, Halomoan Tamba, *Koperasi, Teori dan Praktek*, Erlangga, Jakarta, 2001, h. 17.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut diatas terlihat bahwa perkumpulan yang disebut koperasi memiliki karakteristik yang unik, karena tidak sama dengan unit ekonomi yang lain, sebagai berikut:

1. **Kumpulan orang-orang:** didalam koperasi yang diutamakan adalah kelompok orang-orang yang menjadi anggota dan bukan modal atau uang yang diutamakan. Dalam hal ini koperasi sangat berbeda dengan Perseroan Terbatas (PT) yang mengutamakan modal yang akan menentukan hak suara.
2. Perlu ditambahkan bahwa didalam koperasi kumpulan orang-orang ini harus mempunyai ikatan moral yaitu **perasaan senasib**.
3. **Persamaan derajat:** sistim keanggotaan yang terdapat dalam koperasi sifatnya adalah tidak membedakan kelamin ataupun jabatan dalam rapat anggota. Anggota koperasi mempunyai hak yang menentukan jalannya roda organisasi.
4. **Tidak memandang agama dan politik:** unsur ini merupakan perwujudan dan azas Rockdale (koperasi pertama yang didirikan di-Inggris) bahwa dalam koperasi anggota tidak diperkenankan membawa salah satu agama yang dianutnya atau politik yang digelutinya.
5. **Sukarela:** prinsip utama dalam keanggotaan koperasi sifatnya adalah sukarela, jadi seseorang menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksa

atau terpaksa, artinya dia bebas keluar masuk perkumpulan koperasinya.

6. **Tanggung bersama:** koperasi mengandung unsur 'rasa tanggung jawab anggota' terhadap 3 kewajiban, yaitu: kewajiban sebagai anggota koperasi, kewajiban apabila timbul masalah dan kewajiban apabila kelak koperasi dibubarkan.

Selain definisi-definisi dari pakar-pakar koperasi domestik, perlu kita tinjau juga definisi-definisi koperasi dari pakar-pakar koperasi luar Indonesia, sebagai berikut:

*A cooperative is a business voluntary owned and controlled by its number patrons and operated for them and by them on a non-profit or cost basis.*¹⁸

Catatan yang didapat dari definisi-definisi diatas adalah bahwa koperasi mengandung 3 unsur: unsur demokrasi, unsur keanggotaan yang sukarela dan unsur tujuan koperasi yang utama yaitu memberikan pelayanan kepada angota-anggotanya, bukan mencari keuntungan semata.

*Cooperation is an economic system with social content.*¹⁹ Definisi Casselman ini kelihatannya sangat sederhana tetapi kalau dikaji secara mendalam akan terlihat bahwa didalam koperasi terkandung dua (2) unsur, yaitu: ekonomi dan sosial.

¹⁸ Hendrojogi, *op.cit.*, h.22.

¹⁹ Hendrojogi, *op.cit.*, h.23.

Dooren mendefinisikan koperasi sebagai berikut:

*There is no single definition (for cooperative) which is generally accepted, but the common principle is that a cooperative union is an association of member, either personal or corporate, which hev voluntarily come together in pursuit of a common economical.*²⁰

Definisi Dooren diatas memperluas pengertian koperasi dimana dikatakan bahwa koperasi tidak hanya berarti kumpulan orang-orang, akan tetapi dapat juga berupa kumpulan badan-badan hukum (corporate).

Dengan mempelajari berbagai definisi tentang koperasi kita dapat menyimpulkan bahwa koperasi mempunyai dua (2) sifat ganda, sebagai berikut:

1. **Tujuan ekonomi** yang berarti koperasi dalam bekerja harus bermotifkan ekonomi dan ditunjang dengan unsur-unsur ekonomi yang lain.
2. **Unsur sosial** yang dimaksud bahwa koperasi dalam melaksanakan kegiatan orga-nisasinya harus dititik beratkan pada hubungan sosial antara anggota satu dengan yang lain serta hubungannya dengan pengurus.

Selanjutnya dapat kita lihat bahwa pengertian tentang koperasi terdapat juga didalam Undang-Undang Nomor 25/1992. Pasal 1 Undang-Undang tersebut berbunyi sebagai berikut: Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

Dalam perkembangan hukum yang mengatur koperasi, definisi koperasi agakberlainan dengan apa yang tertera dalam Undang Undang Republik Indonesia

²⁰ Arifin Sitio, Haloma Tamba, *op.cit.*, h.17.

No:12/tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian yang berbunyi: Koperasi Indonesia adalah organisasi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan.

Dapat disimpulkan bahwa perkembangan tentang pengertian koperasi di Indonesia telah mengalami perubahan yang secara umum dapat digambarkan sebagai berikut: Undang-Undang No 25/1992 menggariskan dengan tepat bentuk watak koperasi, yaitu berwatak sosial dan ekonomi. Sedangkan dalam Undang-Undang No 12/th.1967 koperasi digariskan sebagai berwatak sosial dan harus benar-benar mengabdikan kepada perikemanusiaan dan bukan kebendaan semata-mata.

1.2 Manajemen Koperasi

1.2.1 Arti Manajemen

Manajemen adalah suatu proses yang spesifik dalam usaha menggerakkan organisasi dan merupakan titik bergeraknya organisasi, karena tanpa manajemen yang efektif dapat dipastikan bahwa usaha yang dilaksanakan cenderung tidak dapat berlangsung lama. Tercapainya tujuan organisasi baik dari sisi ekonomi, ataupun sosial, pada dasarnya tergantung dari kemampuan para manajer dalam mengelola organisasinya. Jadi dapat dikatakan bahwa manajemen mempunyai hubungan yang erat dengan usaha pencapaian tujuan tertentu, dengan menggunakan sumber daya manusia didalam organisasi semaksimal mungkin.

Bertolak dari hal itulah maka seringkali istilah manajemen dikaitkan dengan pengelolaan kelompok atau administrasi. Berpikir secara manajemen adalah erat kaitannya dengan budaya dan tata cara kehidupan masyarakat sehari-hari, konsekwensinya adalah bahwa dalam usaha mengembangkan pola pikir dan praktek manajemen atau administrasi kita sebaik-nya mempertimbangkan pula budaya masyarakat yang terlibat didalamnya.

Seorang penulis mendefinisikan 'berpikir secara manajemen sebagai berikut:

Berpikir secara manajemen adalah berpikir untuk mengendalikan, mengarahkan dan memanfaatkan semua faktor, sumber daya yang ada yang menurut perencanaan (planning) diperlukan untuk menyesuaikan atau mencapai sesuatu profit (objective) atau tujuan (goal) yang tertentu.²¹

Untuk mengetahui secara luas tentang arti manajemen, perlu kiranya kita mengerti berbagai penjelasan mengenai pengertian manajemen dari berbagai pakarnya, sebagai berikut:

*Management is the process of directing dan facilitating the work of people organized in a formal group to achieve a desired goal. (Manajemen adalah proses memimpin dan melancarkan pekerjaan dari orang-orang yang diatur secara formal sebagai kelompok untuk memperoleh tujuan yang diinginkan).*²²

*Management embraces all duties and functions that pertain initiation of an enterprise, its financing the establishment of all necessary equipment, the outlining of the general form of organization under which the enterprise to operate, and selection of the principal officer.*²³

²¹ Ninik Widiyanti, *Manajemen Koperasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, h.6.

²² Pandji Anoraga, Ninik Widiyanti, *Manajemen Koperasi- Teori dan Praktek*, Pustaka Jaya, 1994, h.76.

²³ Ninik Widiyanti, *op. cit.* h. 7.

*Management is the art of securing maximum result with minimum of efforts as to secure maximum prosperity and happiness for both employer and employee and give the public the best possible service. (Manajemen adalah seni untuk mencapai hasil maksimal dengan usaha yang minimal, demikian pula untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan maksimal baik bagi pimpinan maupun para pekerja serta memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada masyarakat).*²⁴

Dari tiga definisi diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Manajemen selalu dipergunakan/ditetapkan dalam hubungannya dengan kelom-pok manusia.
2. Dalam pengertian manajemen selalu terkandung adanya usaha untuk mencapai tujuan tertentu yang akan dicapai oleh suatu organisasi.
3. Yang terpenting dalam hal ini adalah bahwa kesuksesan atau keberhasilan suatu organisasi sangat ditentukan oleh kualitas orang-orang yang menjadi anggota-nya.

Sebagai bahan perbandingan berikut ini adalah pendapat mantan Menteri Koperasi, Subiako Tjakrawerdoyo, yang menulis:

Manajemen secara umum berarti kemampuan mengelola sumber-sumber daya yang tersedia dengan cara-cara yang sistimatis, terukur dan terencana untuk mencapai tujuan tertentu.²⁵

Beliau menambahkan bahwa manajemen yang mengkaitkan budaya dalam kegiatannya disebut sebagai manajemen kerakyatan.

Jadi manajemen adalah hal pokok yang harus benar-benar dipahami dan dilaksanakan dalam berorganisasi. Dalam kenyataanya didalam praktek berkoperasi,

²⁴ Panji Anoraga, *op.cit.*, h.76.

²⁵ Tantri Abeng, *Manajemen Suharto Penuturan 17 Menteri*, Yayasan Bina Generasi Bangsa, Jakarta, h.68.

manajemen cenderung diabaikan, seperti yang dikemukakan berikut ini:

Sangat disayangkan bahwa dalam praktek berkoperasi pengetahuan tentang manajemen kurang diketahui oleh pelaku-pelaku koperasi, bahkan orang-orang dalam lingkungan suatu koperasi cenderung tidak mengetahui apa yang dilakukannya, bagaimana manajemen bertindak dan mengapa demikian halnya.²⁶

1.2.2 *Manajemen Koperasi*

Betapapun suatu koperasi dapat berkembang dan bergerak maju, sifatnya akan tetap tertutup dalam arti hanya berkisar pada dirinya sendiri dan anggota-anggotanya. Sifat tertutup disebabkan karena berbagai keadaan. Organisasinya disusun berdasarkan lingkungan tertentu, seperti kantor atau kesatuan. Di daerah pedesaan mungkin sudah agak terbuka dengan daerah kerja yang meliputi kecamatan atau kabupaten dengan menghimpun anggota dari berbagai jenis instansi. Kenggotaannya terbatas pada sekelompok masyarakat tertentu, seperti pegawai negeri atau angkatan bersenjata. Usahanya yang dominan adalah simpan pinjam, yang umumnya dibatasi hanya untuk kepentingan anggota. Koperasi bukan bank yang bekerja untuk melayani umum. Jika mereka menyelenggarakan pelayanan barang atau toko, hanya untuk anggota secara kredit atau secara tunai, tetapi lokasinya di dalam lingkungan sendiri. Jadi sekalipun koperasi-koperasi berkembang maju, tetapi sifatnya ke dalam dan tertutup. Situasi seperti itu menyebabkan peranan koperasi fungsional dalam kehidupan koperasi tidak terasa

²⁶ Pandji Anoraga dan Widiyanti, *op. cit.*, h.76.

Tetapi potensi-potensi yang berkembang kuat di dalam koperasi-koperasi ini harus dilihat sebagai kesempatan untuk mengembangkan langkah-langkah yang lebih maju lagi menuju koperasi yang lebih terbuka dan berperan dalam kehidupan ekonomi. Toko-toko koperasi yang sifatnya hanya melayani dapat ditingkatkan menjadi mampu melayani masyarakat sekitarnya, dengan program harga yang lebih murah. Namun perlu diperhatikan bahwa pengaruh lingkungan dan konsumen sangat menentukan laju kehidupan koperasi, oleh karena itu koperasi harus betul-betul dapat menghayati lingkungannya dengan mengidentifikasi pasar dan tanggap terhadap anggota-anggotanya, dengan kata lain koperasi harus memiliki manajemen yang baik.

Dasar manajemen koperasi adalah kekeluargaan dan gotong-royong dan lebih dikenal sebagai 'Pancasila'. Refleksi landasan ini diwujudkan dalam sifat manajemen koperasi yang demokratis, sebagai berikut:

a. *Kekuasaan Tertinggi*

Semua kebijakan dan keputusan yang dikeluarkan yang berhubungan dengan koperasi selalu dibicarakan dan ditentukan dalam rapat anggota, dengan berdasar pada permusyawaratan dan permufakatan serta tidak memandang besarnya simpanan anggota/golongan. Semua anggota mempunyai suara yang sama, yaitu satu anggota satu suara. Pengurus koperasi berkewajiban melaksanakan kebijakan yang ditentukan dalam rapat pengurus dalam hal ini pengurus hanya dapat merumuskan kebijakan pelaksanaan keputusan-keputusan yang merupakan hasil

dari rapat anggota.

b. Pengurus dan Badan Pemeriksa

Pengurus dan Badan Pemeriksa adalah anggota yang diberi kuasa/diberi mandat oleh anggota untuk menjalankan kekayaan anggota yang telah dikumpulkan guna menjalankan usaha bersama. Badan Pemeriksa berfungsi mewakili anggota untuk mengawasi pengurus agar bekerja sesuai dengan kebijakan yang telah dituangkan dalam AD/ART Koperasi. Hal ini mengandung arti bahwa usaha organisasi koperasi ini dijalankan dan diurus bersama-sama oleh para anggota untuk kepentingan mereka sendiri.

c. Pembagian Sisa Hasil Usaha

Tujuan organisasi koperasi yang utama adalah untuk meningkatkan daya beli anggota khususnya dan masyarakat sekitarnya pada umumnya. Untuk mengukur keberhasilan koperasi, sebagai parameternya adalah bukan besarnya Sisa Hasil Usaha (SHU), tetapi dari besarnya masyarakat memperoleh pelayanan koperasi. Andaikata koperasi dalam menjalankan usaha memperoleh SHU, maka SHU ini akan dibagikan berdasarkan jasa anggota kepada koperasinya.

d. Usaha Koperasi

Koperasi didalam berusaha sebetulnya dapat memilih usaha yang memung-

kinkan mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun karena koperasi adalah usaha bersama, maka pilihan usaha koperasi ditentukan oleh kepentingan usaha atau mata pencaharian anggotanya. Koperasi bukan koperasi jika usahanya ditentukan berdasarkan besarnya untung yang akan diperoleh tanpa ada kaitan usaha dengan usaha anggotanya atau meningkatkan daya beli anggotanya. Ini berarti bahwa usaha koperasi menjadi tumpuan harapan anggotanya untuk menunjang usaha mereka masing-masing atau meningkatkan daya beli atau demokrasi usaha.

1.2.2 Tataan Manajemen Koperasi

Koperasi sebagai bentuk badan usaha mempunyai dua sisi yang harus terjalin menjadi satu, yaitu:

- Sisi sosial: koperasi adalah kumpulan orang-orang yang berusaha untuk saling membantu/bekerja sama berdasarkan kekeluargaan dan berazaskan gotong-royong.
- Sisi ekonomi: koperasi adalah unit ekonomi yang melaksanakan suatu usaha dibidang ekonomi untuk melayani kepentingan ekonomi dan kesejahteraan anggota-anggotanya.

Mempertimbangkan 2 hal diatas maka tatanan manajemen koperasi adalah agak berbeda dengan badan usaha lain seperti firma atau perseroan. Perbedaan nya bersumber pada hakekat manajemen koperasi yang berdasar pada falsafahnya ada-

lah dari oleh dan untuk anggota yang mencerminkan pelaksanaan falsafah demokrasi dalam dunia usaha yang menjadi ciri khas koperasi. Untuk itulah dalam tatanan manajemen koperasi di Indonesia dikenal Rapat Anggota, Pengurus dan Badan Pemeriksa dan Manajer atau pelaksana utama.

Di Indonesia Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan kekuasaan yang tertinggi dalam koperasi. Dalam rapat anggota pula pengurus koperasi ditetapkan, pengurus inilah yang melaksanakan kegiatan koperasi karena tidak mungkin bagi koperasi melibatkan seluruh anggotanya. Agar pengurus bekerja dengan baik Badan Pemeriksa koperasi mengawasinya. Untuk kegiatan sehari-hari pengurus koperasi mengangkat seorang manajer. Dalam kegiatannya manajer tidak bekerja sendiri, melainkan dibantu oleh pengurus koperasi yang mengangkatnya. Pada prinsipnya koperasi harus mampu memberdayakan segala sumber manajemen yang dimiliki yaitu Pengurus Koperasi, Badan Pemeriksa dan Manajer supaya tujuan yang akan dicapai dapat terwujud, seperti yang ditulis Widiyati:

Agar berhasil manajemen koperasi harus jelas dahulu konsep, tujuan, sasaran yang harus dicapai sampai batas tertentu, perencanaan yang matang dan bagaimana kebijakan harus diletakkan sebagai dasar prosedur kerja harus dirumuskan dengan jelas.²⁷

1.3 Peraturan Hukum tentang Koperasi

Di Indonesia kedudukan koperasi telah diatur secara yuridis dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, pasal utama bertumpunya falsafah ekonomi Pancasila, dengan kelengkapannya pasal 27 ayat (2) dan pasal 34. Pasal 33 UUD 1945 adalah landasan koperasi sebagai tulang punggung perekonomian bangsa.²⁸

²⁷Widiyanti, *op.cit.*, h.37.

²⁸ Djarot Sriwiyatmo (ed), *Koperasi di Indonesia*, Universitas Indoensia, Jakarta, 1982, h.51.

Dengan pencantumannya dalam UUD 1945, berarti kedudukan koperasi secara politis konstitusional adalah sangat kuat dan strategis, mengingat UUD 1945 merupakan hukum dasar bagi berlakunya semua peraturan perundang-undangan dinegara republik Indonesia.

Selain hal tersebut diatas hal lain menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia senantiasa mendukung gerakan koperasi secara sadar dalam membangun ekonomi selalu membawa rakyatnya kearah koperasi.

Uraian berikut adalah tinjauan yuridis secara singkat terhadap tatanan koperasirasi di Indonesia. Dalam uraian ini dijelaskan mengenai pokok-pokok perundang-undangan yang menyangkut kehidupan koperasi di Indonesia.

Beberapa Undang-Undang telah diberlakukan dalam kehidupan koperasi di Indonesia sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No 25/1992, sebagai berikut: Undang-Undang No 79/1958: Undang-Undang tersebut berlaku pada masa awal kemerdekaan, pengembangan dan pembinaan koperasi pada waktu itu diarah-kan pada konsep koperasi sebagai alat pemerintah (penjajah). Hal ini menyebabkan koperasi tidak dapat berkembang memenuhi harapan rakyat.

Tetapi bagaimanapun Undang-Undang No 79/1958 telah mengisi lembaran sejarah perkoperasian di Indonesia karena merupakan Undang-Undang koperasi yang pertama di Indonesia sejak Indonesia merdeka.²⁹

²⁹Sukamdani S Gitosardjono, *Perkembangan Dunia Usaha, Bisnis dan Ekonomi di Indonesia*, Tema Baru, Jakarta, 2000, h. 584.

Dalam Undang-undang ini ada beberapa pasal yang penting, sebagai berikut:

Pasal 3 menyebutkan tentang 2 bentuk koperasi, yaitu: koperasi dan koperasi pusat. Koperasi beranggotakan orang-orang, paling sedikit 25 orang, sedangkan koperasi pusat adalah gabungan beberapa koperasi yang mempunyai sangkut paut dengan usahanya serta beranggotakan sedikitnya 5 buah koperasi.

Pasal 6 menyebutkan adanya kewajiban pemerintah untuk memberikan pedoman dan membimbing rakyat dalam hidup berkoperasi. Selain itu pemerintah juga memberikan dorongan terhadap usaha-usaha rakyat untuk berkoperasi. Pemerintah dalam hal ini juga memberikan perlindungan dan kelonggaran terhadap gerakan koperasi. pada masa ini koperasi telah disalah gunakan karena dijadikan alat untuk melaksanakan kebijakan pemerintah (ekonomi terpimpinnya Bung Karno). Berkaitan dengan hal tersebut diatas terdapat pasal yang mengatur kehidupan perekonomian yaitu pasal 38 Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 yang berbunyi: bahwa perekonomian rakyat harus disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan tercapainya secara langsung dan teratur dengan jalan memeberikan bimbingan kepada rakyat kearah hidup berkoperasi.

- a. Undang-Undang No 14/1965; perundangan ini lahir dalam suasana yang penuh kekacauan karna pemerintah melakukan campur tangan yang cukup dalam

disegala bidang kehidupan, termasuk dalam hal ini koperasi. Koperasi pada saat itu dikenal sebagai alat revolusi Indonesia. Alasannya adalah dilandasi oleh adanya perkembangan negara dimana dituntut perubahan fungsi lembaga kemasyarakatan. Pasal yang menunjukkan perubahan peranan koperasi antara lain:

Pasal 3: pasal ini dengan jelas menempatkan kedudukan koperasi sebagai alat revolusi, berbunyi sebagai berikut: koperasi ekonomi dan alat revolusi yang berfungsi sebagai tempat persemaian insan masyarakat serta wahana menuju sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila.

Pasal 6: pasal ini menekankan tentang peran koperasi pada tahap nasional demokratis dan sosialis Indonesia. Nasional demokratis berarti koperasi diharapkan akan dapat memobilisir seluruh kegiatan ekonomi dalam rangka menciptakan syarat-syarat bagi pembangunan masyarakat sosialis Indonesia. Sedangkan pada tahap sosialis Indonesia koperasi diharapkan menyelenggarakan tata ekonomi rakyat dan meningkatkan tingkat hidup rakyat, baik jasmaniah atau rohaniyah; membina dan mengembangkan swadaya dan daya kreatif rakyat sebagai perwujudan masyarakat gotong-royong.

Pasal 55: pasal ini menyebutkan tentang tugas Direktorat Koperasi sebagai pembina dan pengawas koperasi.

b. Undang-Undang 12/tahun 1967. Undang-Undang ini merupakan produk Un-

dang-Undang pertama pada pemerintahan orde baru. Undang-Undang ini lahir dengan tujuan untuk mengadakan koreksi total terhadap penyimpangan-penyimpangan sebelumnya dan selanjutnya akan membawa koperasi kearah prinsip-prinsip yang universal. Alasannya bahwa didalam Undang-undang No14/tahun 1965 koperasi telah ditempatkan pada fungsi politik yang berakibat kedudukan koperasi menjadi bergeser yang mengabaikan koperasi sebagai wadah perjuangan ekonomi rakyat dan juga menyelewengkan azas-azas dan sendi-sendi koperasi. Melalui Undang-Undang ini koperasi mendapat kedudukan hukum yang layak sebagai wadah perjuangan ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan alat demokrasi ekonomi. Hal ini berarti bahwa Undang-Undang ini menginginkan jiwa dan semangat koperasi seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang ini dengan jelas nampak bahwa koperasi telah ditempatkan pada kemurniannya, jelasnya adalah sebagai berikut:

Pasal3: memberikan pengertian koperasi sebagai organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.

Pasal4: menegaskan tentang fungsi koperasi, adalah sebagai alat perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, alat pengorganisasian ekonomi nasional, urat nadi perekonomian Indonesia, dan alat pembina unsur masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa

Indonesia, serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat.

Pasal 2: menyebutkan landasan-landasan koperasi, yakni landasan idiil (Pancasila), landasan struktural (UUD 1945), landasan gerak (pasal 33 UUD 1945 serta penjelasannya), landasan mental (setiakawan dan kesadaran berpribadi).

Pasal 5 : berisi azas koperasi yakni kekeluargaan dan kegotong-royongan.

Pasal 6: menyebutkan tentang sendi-sendi dasar koperasi yang mengatakan sifat keanggotaannya sukarela, rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam koperasi.

Pasal 37: peranan pemerintah bertugas untuk membimbing, mengawasi, memberikan perlindungan dan fasilitas kepada koperasi.

Peraturan Perundangan yang mengatur kehidupan berkoperasi di Indonesia yang sampai saat ini berlaku adalah UU No25/tahun1992. Melalui perundangan ini peranan koperasi lebih mantap bila dibandingkan dengan Perundangan No 12/ tahun 1967 karena koperasi dikatakan sebagai organisasi yang berwatak sosial dan ekonomi.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kehidupan peraturan perundangan yang mengatur keberadaan koperasi di Indonesia adalah ditujukan pada usaha menumbuhkan semangat berkoperasi. Sedangkan apabila dalam perjalanannya terdapat penyelewengan adalah karena dipengaruhi oleh konfigurasi

politik yang sedang berjalan.

2. Azas Koperasi

Azas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat (Balai Pustaka 1995). Azas dapat juga berarti basis atau landasan maupun tumpuan yang mempunyai beberapa pengertian sebagai cita-cita utama atau kekuatan/peraturan organisasi.³⁰

Pengertian tentang azas koperasi ini masing-masing penulis mempunyai pandangan sendiri-sendiri, ada beberapa penulis yang mengaitkan azas ini dengan landasan koperasi atau landasan idiil keanggotaan dan sebagainya., sehingga timbulah pertanyaan pada kita, yaitu: apakah azas koperasi?

Azas koperasi di-Indonesia adalah tercantum dengan jelas dalam pasal 33 UUD 1945 yang dapat kita lihat dalam kutipan bunyi pasal tersebut selengkapnya sebagai berikut:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas-azas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

³⁰ Hendrojogi, *op.cit.*, h.29.

Azas ini telah diaplikasikan kedalam UU No 25/1992 pasal 2 yang menyebutkan bahwa koperasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 atas azas kekeluargaan dan gotong-royongan.

Mengingat azas tersebut diatas dapat diambil pengertian sebagai berikut:

1. Bahwa setiap organisasi yang menamakan diri koperasi harus dapat menyadari dan mengimplementasikan wujud dan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu sifat manusia yang selalu mempertimbangkan kondisi lingkungan dan tempat serta keadaan masyarakat serta mengikuti perkembangan zaman. Adapun ciri-ciri dan kepribadian bangsa Indo-nesia adalah khas, yaitu: insan yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa, yang bergotong-royong, berkeluargaan dalam keaneka ragaman budaya Indonesia.
2. Azas gotong-royong berarti bahwa anggota koperasi mempunyai keinsyafan dan kesadaran dalam bekerja sama dan bertanggung jawab bersama dalam segala usahanya tidak memasukkan kepentingan pribadi dan selalu mementingkan kesejahteraan bersama. Dalam membagi hasil usahanya masing-masing anggota menerima bagian sesuai dengan sumbangan usaha/karyanya.
3. Azas kekeluargaan mencerminkan kesadaran budi, hati nurani atau keluhuran budi dan keikhlasan anggotanya dalam bekerja atau berusaha untuk semua anggota koperasinya, berarti oleh semua untuk semua, dibawah pimpinan pengurus serta pemilihan oleh anggota atas dasar keadilan dan

dan kebenaran serta keberanian berkorban untuk kepentingan bersama.

4. Namun koperasi dalam menjalankan usahanya tidak boleh melupakan sifat, watak dan persyaratan yang harus dimilikinya sebagai unit ekonomi yang dikhawatirkan akan kehilangan efisiensinya, yaitu koperasi sebagai unit ekonomi yang mempunyai karakteristik yang khas bila dibandingkan dengan unit usaha yang lain, koperasi berkarakteristik sosial dan ekonomis.

3. Sendi Dasar Koperasi

Sendi dasar koperasi, atau ada juga yang menyebut sebagai prinsip-prinsip koperasi Indonesia keberadaanya adalah tidak dapat dilepaskan dari sejarah dan prinsip koperasi secara internasional. Penyusunan sendi dasar koperasi harus mempertimbangkan kondisi perkembangan koperasi di Indonesia pada umumnya. Sendi-sendi dasar ini merupakan ciri khusus koperasi Indonesia yang membedakan koperasi dengan pilar ekonomi yang lain, koperasi mempunyai watak sosial. Sendi-sendi dasar koperasi Indonesia dinyatakan dalam pasal 5 ayat 1 UU No 25/1992 sebagai berikut:

- a. Sifat sukarela: sifat ini mengandung arti bahwa seseorang menjadi anggota koperasi atas kemauannya sendiri dengan sukarela dan sadar serta tidak dipaksa, sehingga tujuan menjadi anggota adalah untuk menolong diri sendiri. Sadar berarti yakin bahwa tujuannya akan tercapai melalui koperasi. Selain un-

sur sukarela tidak juga diperkenankan adanya usaha untuk menghalang-halangi seseorang menjadi anggota koperasi, demikian pula kalau seseorang memutuskan untuk keluar dari keanggotaan koperasinya. Pula dalam koperasi sikenal tidak adanya pembedaan dalam hal keanggotaannya.

- b. Rapat anggota: rapat anggota adalah sendi dasar koperasi yang merupakan wujud pengelolaan koperasi yang dilakukan secara demokratis. Didalam koperasi harus diupayakan semaksimal mungkin mengikut sertakan seluruh anggota dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan koperasi. Prinsip kesamaan dan kebersamaan ini telah dicantumkan secara eksplisit dalam UU No 25/1992 yang menyatakan: Setiap anggota koperasi mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap koperasi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar .

Bentuk pelaksanaan demokrasi dalam koperasi dapat juga berbentuk adanya persamaan tujuan dan kesatuan tekad untuk meningkatkan kepentingan bersama. Hal ini diwujudkan dalam pemerataan tugas mengelola koperasi yang didasarkan kemampuan manajerial masing-masing pendiri. Jadi didalam koperasi boleh dikatakan seorang anggota adalah sekaligus juga sebagai pengelola koperasi, pemilik dan pengawas.

- c. Sisa Hasil Usaha (SHU): pembagian SHU koperasi juga mempunyai karakteristik tersendiri yang lain apabila dibandingkan dengan unit ekonomi lain seperti perseroan terbatas (PT). Pembagian ini didasarkan pada perimbangan

jasa yang telah diberikan anggota kepada koperasinya. Hal ini berbeda dengan praktek yang dilaksanakan diperusahaan yang didasarkan pada saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Dengan melihat sistim pembagian ini maka jelaslah bahwa didalam koperasi betul-betul tercermin adanya kerjasama antara orang-orang dan bukan semata-mata mementingkan akumulasi modal. Kondisi ini menunjukkan bahwa didalam koperasi kedudukan anggota betul-betul dijunjung tinggi dengan tidak melihat jumlah penyertaan modalnya.

- d. Modal: koperasi bukanlah merupakan perusahaan dengan akumulasi modal, akan tetapi koperasi memerlukan modal untuk menjalankan perusahaannya. Modal dalam koperasi dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan bukan semata-mata mencari keuntungan. Maka dalam pembagian imbalan terhadap modal yang diberikan kepada koperasi ada pembatasan, ketentuan yang disepakati, dan tidak didasarkan atas besarnya modal yang diberikan kepada koperasi. Pendek kata modal yang diberikan kepada koperasi sifatnya terbatas, hal ini juga untuk mendorong terwujudnya kekeluargaan diantara anggota koperasi tersebut. Dengan adanya kondisi ini diharapkan melalui koperasi para anggota akan mendapat peluang dalam usaha meningkatkan keadaan ekonominya.
- e. Kemandirian: setiap koperasi Indonesia diharapkan untuk dapat selalu meningkatkan kemandiriannya. Agar dapat mandiri koperasi harus mengusahakan dirinya mempunyai organisasi yang kuat dan dapat ikut membangun masyarakat sekelilingnya, dengan demikian eksistensi koperasi pada suatu tempat tidak

hanya dirasakan oleh anggotanya saja. Maka untuk dapat mewujudkan kemandiriannya koperasi harus dapat mewujudkan prinsip percaya pada kemampuan sendiri dengan mempunyai sifat swadaya, swakarsa, swasembada.

4. Peranan Koperasi

Eksistensi koperasi di-Indonesia kiranya telah diakui sejak jaman penjajahan hingga era pembangunan, karena selama masa itu koperasi telah membuktikan sebagai unit ekonomi atau alat perjuangan rakyat Indonesia.

Pada masa sekarang ini, di era pembangunan, koperasi mempunyai peranan yang sangat besar baik di bidang perekonomian atau sebagai alat untuk mempersatukan rakyat Indonesia dalam berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan. Keberadaan koperasi di tengah-tengah masyarakat telah dapat mengangkat mereka dari kesulitan yang dihadapi. Kondisi seperti tersebut diatas telah diaplikasikan dalam pasal 3 UU No 25/Th 1992 tentang perkoperasian yang menyebutkan: Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Dari UU No 25 /1992 tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa koperasi merupakan suatu organisasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri khusus dan berperan untuk menolong anggotanya yang lemah kemudian bersama-sama meningkatkan kesejahteraan yang dicita-citakan.

Koperasi yang eksis di era sekarang ini adalah beragam sekali, mulai koperasi RT, koperasi RW, koperasi sekolah, koperasi mahasiswa, koperasi pegawai, dan seterusnya. Sedangkan jenis koperasi dilihat dari lapangan usahanya merupakan penjenisan koperasi dari masyarakat yang mendirikan.

Koperasi sekolah, atau koperasi siswa seperti sebagian orang menyebutnya telah dapat membuktikan dirinya dalam usaha mempersatukan, mengembangkan daya kreasi anggotanya dan mewujudkan tercapainya peningkatan kualitas produksi sekolahnya (lulusan). Bukti pernyataan ini akan dibahas dalam bab III yaitu bab yang memuat hasil penelitian dan pembahasannya.

Sedangkan secara makro, peranan koperasi dengan jelas diatur dalam pasal UU No 25/1992, sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluarga-

an dan demokrasi ekonomi.

Kesimpulan uraian singkat mengenai peranan koperasi diatas adalah bahwa koperasi didalam konteks pembangunan ekonomi negara Republik Indonesia mempunyai peran yang sangat penting.

5. Prinsip dan Ciri Koperasi

Di Indonesia kita mengenal tiga pilar ekonomi, yaitu BUMN (Bank Umum Milik Negara), swasta dan koperasi. Tujuan tiga pilar ekonomi tersebut pada dasarnya adalah sama, yaitu mencari keuntungan, namun apabila kita kaji secara mendalam maka dari ketiga pilar ekonomi tadi, satu diantaranya terdapat perbedaan yang mendasar pada prinsip-prinsip pengelolaan perusahaannya dan merupakan penggambaran asas kekeluargaan, pilar inilah yang bernama koperasi.

Prinsip-prinsip kekeluargaan koperasi yang khas inilah yang mengatur mekanisme antara koperasi dengan sesama anggotanya, mekanisme kepengurusan dan juga menyangkut tujuan yang hendak dicapai. Disisi lain prinsip-prinsip ini juga mengatur kepemilikan modal dan cara pembagian hasil usahanya. Melalui pemahaman prinsip suatu koperasi kita akan dapat mengetahui dan membedakan karakteristik koperasi sebagai unit ekonomi yang berdasarkan asas kekeluargaan dibandingkan dengan dua pilar ekonomi yang lain.

Kiranya perlu disadari bahwa adanya prinsip koperasi inilah yang merupakan perbedaan mendasar koperasi dibandingkan dengan bentuk perusahaan

yang lain. Berikut adalah gambaran berbagai prinsip koperasi.

5.1 Prinsip Rockdale

Prinsip koperasi Rockdale didasarkan pada aturan yang dibuat oleh pelopor-pelopor koperasi yang kemudian dikenal sebagai *prinsip-prinsip Rockdale*.

Rockdale adalah sebuah nama kota di-Inggris yang mempunyai arti penting bagi sejarah koperasi, di kota inilah pertama kali didirikan sebuah koperasi di dunia. Koperasi Rockdale mempunyai arti yang sangat penting karena tidak saja dapat memenuhi kebutuhan anggotanya akan tetapi koperasi ini dapat membuka mata dunia bahwa peran koperasi dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera. Koperasi tersebut bukan sekedar usaha lokal untuk memenuhi kebutuhan material anggotanya melainkan juga mempunyai jangkauan yang lebih jauh lagi, yaitu menciptakan masyarakat baru yang lebih baik ("*a new better social order*").³¹

Prinsip koperasi Rockdale, yang dikenal dengan "the principles of Rockdale" adalah sebagai berikut:

1. Barang-barang dijual bukan barang palsu dan dengan timbangan yang benar.
2. Penjualan barang dengan tunai.
3. Harga penjualan menurut harga pesan.
4. Sisa hasil usaha (keuntungan) dibagikan kepada para anggota menurut perimbangan jumlah pembelian tiap-tiap anggota ekoperasi.
5. Masing-masing anggota mempunyai satu suara.
6. Netral dalam politik dan keagamaan.

³¹ Ima Suwandi, *Seluk Beluk Koperasi Madrasah dan Koperasi Pondok Pesantren*, Bhratara Karya, Jakarta, h. 28.

7. Adanya pembatasan atas modal.
8. Keanggotaan bersifat sukarela.
9. Semua anggota menyumbang dalam permodalan.

Prinsip Rockdale ini mendasari hampir semua koperasi-koperasi didunia. Pada awal pendiriannya koperasi Rockdale hanya memiliki enam prinsip saja, namun dalam perkembangannya bertambah menjadi sembilan, yaitu dengan penambahan prinsip ke 7, 8 dan 9.

Prinsip ini sangat vital dalam hal sebagai berikut:

1. Dalam usaha mencapai tujuannya, koperasi tidak boleh melupakan bahwa yang utama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan kemudian baru kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Orientasi tujuan ini tidak boleh dilupakan karena hal ini merupakan hakiki dari koperasi itu sendiri.
2. Merupakan 'trade mark' atau karakteristik koperasi yang membedakan dengan bentuk perusahaan lainnya. Prinsip ini vital tidak hanya karena berfungsi mengatur mekanisme intern koperasi tetapi juga eksternnya.

1.2 Prinsip Koperasi Menurut ICA (International Cooperation Association).

Menyadari bahwa penerapan prinsip Rockdale itu disesuaikan dengan kondisi lingkungan negara yang bersangkutan, maka timbullah bermacam-macam prinsip koperasi diseluruh dunia.

Untuk mengantisipasi hal ini gabungan koperasi internasional (ICA) berusaha untuk menetapkan suatu prinsip yang berlaku umum. Usaha ini akhirnya membawa hasil berkat konggres ICA kedua puluh tiga di Wina dengan rumusannya sebagai berikut:

1. Keanggotaan koperasi harus bersifat sukarela dan terbuka.
2. Koperasi harus diselenggarakan secara demokrasi.
3. Modal yang berasal dari simpanan uang dibatasi tingkat bunganya.
4. Sisa hasil usaha, jika ada, yang berasal dari usaha koperasi harus menjadi milik anggota.
5. Koperasi harus menyelenggarakan pendidikan terhadap anggotanya, pengurus, pegawai koperasi serta terhadap warga masyarakat pada umumnya.
6. Seluruh organisasi koperasi, baik koperasi pada tingkat lokal maupun tingkat propinsi, tingkat nasional dan koperasi diseluruh dunia, hendaknya menyelenggarakan usaha sesuai dengan kepentingan anggotanya. Peningkatan pelayanan kepentingan anggota itu hendaknya dilakukan melalui kerjasama antar koperasi, baik secara lokal, nasional, regional bahkan secara internasional.

Berdasarkan kajian diatas prinsip-prinsip koperasi Indonesiapun disesuaikan dengan kondisi perkembangan didunia.. Adapun wujud prinsip koperasi Indonesia dapat kita lihat didalam pasal 5 ayat 1 Undang-undang No 25/Th 1992.

6. Jenis dan Bentuk Koperasi.

Seringkali kita bingung bila berbicara mengenai bentuk dan jenis koperasi, hal ini wajar-wajar saja berhubung jenis dan bentuk koperasi, bagi orang awam, sepertinya sama. Untuk menghindari kebingungan inilah pembahasannya akan dijelaskan satu persatu.

6.1 Jenis Koperasi

Penjenisan koperasi adalah pengelompokan koperasi yang didasarkan atas karakteristik tertentu. Penjenisan ini diperlukan mengingat perkembangan koperasi yang begitu pesat, diharapkan dengan adanya penjenisan ini kita akan memperoleh ciri, sifat lapangan usaha maupun sifat keanggotaan yang pasti.

Arti penjenisan ini adalah penggolongan, pengkatagorian atau klasifikasi. Atau:

... yang dimaksud penjenisan koperasi adalah pembedaan koperasi yang didasarkan pada golongan dan fungsi ekonomi adalah pembedaan koperasi yang didasarkan pada golongan dan fungsi ekonomi dengan tekanan diberikan pada lapangan usaha dan/atau tempat tinggal para anggotanya.³²

Kiranya perlu diketahui bahwa penjenisan koperasi berubah mengikuti perkembangan jaman. Masalah penjenisan koperasi di-Indonesia diatur oleh Peraturan Pemerintah No 60 tahun 1959 pasal 2 yang menyebutkan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya yang dimaksud dengan penjenisan koperasi ialah pembedaan koperasi yang didasarkan pada golongan dan fungsi ekonomi.

³² Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, Rajawali Press, Jakarta, 1996, h.141.

2. Dalam peraturan ini dasar penjenisan koperasi ditekankan pada lapangan usaha dan/atau tempat tinggal para anggota suatu koperasi.

Ketentuan diatas direalisasi pada pasal 3 yang menyebutkan tujuh (7) jenis koperasi, yaitu:

- a. Koperasi Desa
- b. Koperasi Pertanian
- c. Koperasi Peternakan
- d. Koperasi Perikanan
- e. Koperasi Kerajinan/Industri
- f. Koperasi Simpan Pinjam
- g. Koperasi Konsumsi

Dalam pasal 4 disebutkan bahwa jenis-jenis koperasi lain dapat didirikan asalkan sesuai dengan Undang-Undang Koperasi (UUK) dan Peraturan Pemerintahnya (PP). Pasal 5 dari PP tersebut tersebut mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Koperasi Desa adalah koperasi yang:

- a. Anggota-anggotanya terdiri dari penduduk desa yang mempunyai kepentingan yang sama ataupun yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang satu sama lain ada sangkut pautnya secara langsung.
- b. Pada dasarnya menjalankan usaha, jenis usaha tersebut bisa satu (1) atau lebih.

Dalam hal penjenisan koperasi, Ir Taslan A Tohir mengelompokkan koperasi secara klasik yang hanya terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu:

- Koperasi pemakaian (koperasi warung, koperasi sehari-hari, koperasi distribusi, warung andil, dll); yang tujuannya ialah membeli barang-barang yang dibutuhkan anggota-anggotanya dan membagi barang-barang tadi kepada mereka.
- Koperasi penghasil atau koperasi produksi; tujuannya ialah mengerjakan sesuatu pekerjaan bersama-sama.
- Koperasi simpan pinjam; tujuannya adalah memberi kesempatan kepada anggota-anggotanya untuk menyimpan dan meminjam uang.³³

Kelihatannya pakar-pakar koperasi membuat pengelompokan jenis koperasi secara berbeda-beda karena dasarnya tidak sama yaitu sesuai dengan fungsi ekonomi, atau lapangan usaha atau tempat tinggal para anggotanya. Berdasarkan penjelasan inilah maka koperasi yang anggota-anggotanya adalah siswa suatu sekolah dapat disebut sebagai jenis koperasi sekolah. Selain itu karena fungsi koperasi sekolah adalah untuk mencukupi kebutuhan peralatan belajar anggotanya, berarti anggotanya sebagai konsumen maka dapat disebut koperasi konsumsi. Mengingat bahwa koperasi sekolah mempunyai berbagai macam usaha seperti menjual peralatan belajar, memasarkan hasil kerja praktek siswa, menjual jasa, dll maka koperasi sekolah termasuk jenis koperasi 'multi purpose' atau koperasi serba-usaha.

6.2. Bentuk Koperasi

Peraturan Pemerintah No 60/ 1959 pemerintah Indonesia memberikan penjelasan mengenai bentuk koperasi yaitu dalam pasal 13 Bab IV sebagai berikut: Bentuk koperasi adalah tingkat-tingkat koperasi yang didasarkan pada ciri-ciri pemusatan, penggabungan dan perindukannya.

³³ Hendrojogi, *op.cit.*, h.49.

Berdasarkan ketentuan diatas terdapat 4 (empat) bentuk koperasi:

- 1/ Koperasi Primer,
- 2/ Koperasi Pusat,
- 3/ Koperasi Gabungan, dan
- 4/ Koperasi Induk.

Sehubungan dengan bentuk koperasi ini maka didalam Undang-undang Republik Indonesia No 25/1992 tentang Pokok-pokok Perkoperasian pasal 15 menyebutkan bahwa bentuk-bentuk koperasi dapat berbentuk koperasi primer atau koperasi sekunder, sedangkan pasal 16 mengatakan bahwa penjenisan koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Mengenai penjenjangan koperasi berdasarkan Peraturan Pemerintah diatas dalam pasal 15 yang memilih istilah pemusatan sebagai berikut:

- (1) Sesuai dengan kebutuhan dan untuk maksud-maksud efisiensi, koperasi-koperasi dapat memusatkan diri dalam koperasi tingkat yang lebih atas.
- (2) Koperasi tingkat terbawah sampai tingkat teratas dalam hbungan pemusatan sebagai tersebut dalam ayat (1) pasal ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan-pisahkan.
- (3) dan seterusnya.
- (4) dan seterusnya.
- (5) dan seterusnya.

Sedangkan didalam Undang-undang No 25/1992 mengenai bentuk-bentuk koperasi sama sekali tidak menyinggung mengenai daerah kerja yang disesuaikan

dengan wilayah administrasi pemerintah. Jadi mengenai bentuk koperasi ini oleh pasal 16 Undang-undang No 12/1967 dan pasal 15 Undang-undang 25/1992 mengenai masalah penjenjangan koperasi tidak ada keharusan untuk menyesuaikan wilayah administrasi pemerintahan.

7 Alat Perlengkapan Koperasi

Berbicara tentang perlengkapan koperasi berarti kita berbicara mengenai manajemen koperasi. Dalam hal ini terdapat dua unsur manajemen dan koperasi.

Manajemen koperasi adalah pengelolaan organisasi koperasi yang meliputi kewenangan RAT (Rapat Anggota Tahunan), kewenangan pengurus, dan pengawas serta kewenangan menejer dan para karyawan, agar tujuan koperasi dapat dicapai dengan lancar.³⁴

Manajemen koperasi adalah manajemen khas Indonesia yang berbasis pada jiwa gotong royong dimana suatu organisasi dikelola secara bersama dengan tujuan yang sama. Jiwa gotong royong adalah budaya tradisional yang sudah hidup dinegara Indonesia tercinta sejak dahulu kala.

..... gotong royong sudah menjadi kepribadian bangsa Indonesia. Benih-benih gotong royong sudah lama tersebar dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu maka tidaklah terlalu sukar untuk memasyarakatkan koperasi.³⁵

Atas dasar uraian diatas kiranya dapat diambil suatu kesimpulan bahwa bentuk alat perlengkapan koperasi sebagai unit ekonomi yang kami uraikan diatas

³⁴ Sukamdiyo, *Manajemen Koperasi*, Erlangga, Jakarta, 1996, h.7.

³⁵ Sagimun, *Mari Kita Berkoperasi (Pelajaran Koperasi Tingkat Dasar)*, Inti Indayu Press, Jakarta, 1984, h.16.

mengandung rasa budaya serta tata cara kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari. Seperti kita ketahui bahwa koperasi adalah suatu organisasi ekonomi yang bergerak untuk rakyat yang lemah ekonominya. Untuk ini sebagai organisasi diharapkan mempunyai pilar-pilar yang kuat agar dapat mendukung tercapainya tujuan koperasi. Mengenai alat perlengkapan koperasi ini diatur dalam Undang-Undang NO 25/Th 1992. Adapun pengaturannya adalah sebagai berikut:

Pasal 21, UUD No 25/1992 berisi tentang macam alat perlengkapan koperasi, yaitu: 1/ Rapat Anggota, 2/ Pengurus, dan 3/ Pengawas.

6.1 *Rapat Anggota:* merupakan wujud dari pelaksanaan sistim demokrasi didalam koperasi dan forum kekuasaan tertinggi pada organisasi koperasi. Adapun perwujudanya dapat kita lihat dalam apa yang dikenal sebagai RAT (rapat Anggota Tahunan).

6.2 *Pengurus* koperasi diatur dalam pasal 29,30, 31 Undang-undang No 25/Tahun 1992. Pengurus koperasi terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara serta anggota yang kesemuanya dipilih dalam rapat berdasarkan anggaran dasar koperasi. Pada prinsipnya pengurus merupakan pemegang mandataris yang berkewajiban memberikan pertanggung jawaban kepada rapat anggota atas tugas-tugas yang diembannya.

6.3 *Kepengawasan* diatur dalam pasal 38,39 UUD No 25/1992. Pengawas bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap kehidupan koperasi, organisasi dan usahanya, jugapelaksanaan kebijakan pengurus dalam menjalankan koperasi. Berkaitan dengan tugasnya maka pengawas diwajib

kan membuat laporan tertulis untuk disampaikan didalam RAT.

Selain ketiga komponen diatas, apabila dipandang perlu koperasi mengangkat seorang penasehat atau pembina yang bertugas untuk mendampingi pengurus dan badan pemeriksa dalam menjalankan tugasnya. Namun dengan catatan bahwa tugas pembina jangan sampai mengurangi wewenang alat perlengkapan koperasi. Sedangkan ada lagi personil yang tidak kalah pentingnya adalah manajer yang tugasnya memimpin karyawan yang dimiliki koperasi untuk menjalankan usaha koperasi. maka kekecewaan yang merugikan kelangsungan kehidupan koperasi dapat dihindari. Tetapi pada dasarnya titik sentral organisasi koperasi adalah Rapat Anggota, Pengurus dan Manajer, 3 komponen tadi merupakan unsur penentu dalam keberhasilan koperasi.

8 Pendirian Koperasi

Mendirikan koperasi tidaklah semudah yang diperkirakan orang, konsep yang jelas adalah syarat mutlak yang harus dimiliki kelompok yang akan mendirikan koperasi. Hal ini disebabkan karena untuk mendirikan suatu koperasi terlebih dahulu diperlukan kesadaran yang sangat tinggi dan pemahaman akan koperasi bagi para pendirinya.

Koperasi yang didirikan secara tergesa-gesa akan berakibat merugikan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Adalah sangat tidak bermanfaat apabila kita mendirikan koperasi tetapi para pendirinya tidak mengeta-

hui persoalan-persoalan yang mendasar dari sebuah koperasi sebagai unit ekonomi. Perlu harus diingat bahwa gagalnya sebuah koperasi atau bubarnya sebuah koperasi akan memberikan gambaran yang lebih jelek terhadap koperasi daripada tidak ada koperasi. Untuk itu dalam mendirikan koperasi kita perlu betul-betul memilih orang-orang yang tepat sebagai pelopor pendiri koperasi, sehingga merupakan jaminan yang akan membangun kepercayaan calon anggotanya. Mengingat sangat berperannya para pendiri koperasi yang akan menjamin keberhasilan kerjanya, maka dirasa perlu memberi persyaratan bagi para pendiri koperasi, sebagai berikut:

1. Mereka mempunyai minat yang besar, bercita-cita tinggi serta mempunyai jiwa kemasyarakatan kemasyarakatan yang tebal untuk bekerja bagi kepentingan orang banyak.
2. Mereka menyadari peranan dan tugas koperasi, yaitu antara lain untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan memperbaiki taraf hidup rakyat
3. Mereka mempunyai keberanian, keuletan dan keyakinan tentang keberhasilan koperasinya untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.
4. Mereka harus mempunyai integritas yang tinggi.³⁶

9 Modal Koperasi

Koperasi sebagai unit ekonomi yang dikenal sebagai perkumpulan orang-orang yang dalam kehidupannya tidak dapat melepaskan diri dari kebutuhan akan odal. Tetapi dalam sistim kegiatan ekonomi koperasi adalah berbeda dari pilar ekonomi yang lain yang dalam kegiatannya semata-mata hanya mengejar keuntungan. Perbedaan ini tidak hanya dikarenakan anggaran dasar atau sistem

³⁶ Departemen Koperasi, Jakarta, Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dalam Pelita IV, 1989.

pengelolaan yang demokratis namun ada hal yang khusus yang karakteristik, yaitu dalam masalah pengaturan sisa hasil usaha dan bagi hasil (financial benefit) yang dilaksanakan oleh koperasi tidak didasarkan pada pemilikan saham tetapi sesuai imbalan jasa yang diberikan oleh anggota yang bersangkutan.

Masalah permodalan koperasi diatur dalam Undang-undang Koperasi No 25/th 1992 tentang pokok-pokok perkoperasian, Bab VII pasal 41 disebutkan dengan jelas bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Dan pasal 42 yang pada prinsipnya mengizinkan koperasi melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.

Atas dasar pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa modal koperasi diperoleh dari tiga sumber:

1. Dari anggota-anggotanya sendiri, dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah.
2. Dari SHU koperasi, yaitu bagian yang dimasukkan cadangan.
3. Dana lain-lain, misalnya pinjaman.

Jadi modal koperasi terdiri atas modal intern dan modal extern yang masing-masing sangat diperlukan dalam usaha membiayai pengembangan koperasi, dan itu se-mua merupakan kekayaan koperasi. Modal intern adalah yang berasal dari simpanan-simpann pokok, wajib, dan sukarela, juga berasal dari cadangan yang dikumpulan dari SHU. Sedangkan modal extern diperoleh dari pinjaman-pinjaman dan simpanan-simpanan yang besarnya tergantung dari kepercayaan anggota serta fasilitas khusus yang diperoleh dari pemerintah.

9.1 *Perincian Modal Koperasi*

Gambaran secara umum mengenai permasalahan modal koperasi dapat dibuat bagannya sebagai berikut:

A. Modal intern koperasi: istilah modal intern juga disebut modal pemilik atau modal sendiri. Modal pemilik terdiri dari berbagai komponen menurut ketentuan yang terdapat pada anggaran dasarnya sendiri-sendiri. Modal pemilik ini terdiri dari:

1. Simpanan pokok
2. Simpanan wajib
3. Simpanan sukarela
4. Cadangan
5. Sisa Hasil Usaha³⁷

B. Modal extern: disebut modal extern karena kelompok modal ini bukan modal pemilik, ciri-ciri khusus modal luar adalah antara lain:

1. Harus dikembalikan dan dibayarkan kepada penyeter atau pemberi pada saat yang diperjanjikan baik sekaligus atau dicicil.
2. Tidak akan selamanya berada atau mengendap pada peneri-maannya.
3. Beirisiko biaya, yaitu bunga dan sewa modal.
4. Tidak turut menanggung likuidasi.³⁸

Sedangkan bentuk modal dari luar berasal dari:

1. Utang dagang
2. Biaya yang belum dibayar
3. Pajak yang belum dibayar

³⁷ Rivai Wirasasmata, Hadiwidjaja, Erna Herlinawati, *Sekilas tentang Modal dan Kemandirian Koperasi*, Pioner Jaya, Bandung, 1942, h.7.

³⁸ Ibid, h. 23.

4. Simpanan sukarela

Dari penjelasan diatas maka yang penting dan perlu dicatat bahwa pengelolaan modal yang seefisien mungkin harus dilakukan. Hal ini merupakan syarat mutlak apabila koperasi memang ingin usahanya berkembang. Harus dicegah adanya pemborosan didalam usahanya yang mengakibatkan mismanajemen se-hingga memungkinkan koperasi menjadi ambruk. Khusus dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa modal pemilik yang diperoleh dari anggota mempunyai pertanggung jawaban yang berat bagi pengurus.

10 Koperasi Soko Guru Ekonomi Nasional Indonesia

Arah pembangunan ekonomi negara dapat kita lihat dalam perundang-undangan yang melandasi jalannya pemerintahan. Demokrasi ekonomi merupakan arah yang hendak dicapai, yaitu suatu kehidupan ekonomi dengan titik sentral rakyat, rakyat ikut berperan aktif dalam kegiatan ekonomi. Ciri-ciri demokrasi ekonomi, yaitu:

1. Dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi, didalam demokrasi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
4. Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan pemufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijaksananya ada pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat pula.
5. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan dan penghidupan yang layak.
6. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatnya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan rakyat.
7. Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan.

8 .Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.³⁹

Dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi maka yang diarah adalah pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kemampuan atau pemberdayaan ekonomi rakyat seperti yang digariskan didalam Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999 yang merupakan jalan panjang yang harus ditempuh apabila kita ingin mewujudkan demokrasi ekonomi. Arah yang hendak dicapai dengan jelas dapat kita lihat dalam pasal 33 UUD 1945 pada bagian penjelasannya yang menyebutkan dengan tegas sebagai berikut: bahwa produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat, kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang, sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, bangunan usaha yang disusun dengan itu adalah Koperasi.

Jadi jelas kiranya bahwa koperasi merupakan pilihan utama bentuk badan usaha yang cocok untuk Indonesia dan merupakan inti dasar perwujudan demokrasi ekonomi. Membangun koperasi di Indonesia adalah pesan konstitusional, pasal 33 UUD 1945 merupakan sumber keabsahan keberadaan koperasi di-Indonesia.⁴⁰

Atas dasar garis-garis yang diuraikan didalam Undang-undang 1945 tersebut maka timbul pertanyaan mengenai mengapa dipilihnya koperasi sebagai unit ekonomi yang pantas untuk mewujudkan demokrasi ekonomi Indonesia dan bukan

³⁹ Departemen Koperasi Republik Indonesia, Pola Dasar dan Pengembangan Koperasi dalam Pelita IV, Jakarta, 1984, h. 17-18.

⁴⁰ Sriwiyatmo, *op.cit.*,h. 50.

badan usaha yang lain. Kiranya kajian pakar ekonomi Jerman berikut ini dapat dipakai untuk menjawabnya.

1. Jati diri anggota sebagai pemilik, pengambil keputusan dan pelanggan/ karyawan.
2. Orientasi pelayanan ditujukan pada pelayanan kepada perusahaan anggota atau anggota perseorangan.
3. Strukturnya demokratis.
4. Sikapnya terhadap peranan modal semata-mata sebagai alat.
5. Cara memandang berbagai keuntungan yang diperoleh dari transaksi dengan anggota (pelayanan dekat biaya), dan
4. Cara khusus dalam membagi SHU (cadangan, pengembalian SHU sesuai jasa, pendidikan dan latihan, kegiatan sosial)

Atas uraian singkat diatas jelas kiranya bahwa koperasi merupakan wadah yang paling tepat bagi pengembangan ekonomi rakyat yang bersum-ber pada nilai budaya bangsa.

Koperasi inilah pengejawantahan perekonomian rakyat yang dipercaya sebagai soko guru perekonomian nasional atau sebagai tiang-tiang penyangga utama ketahanan ekonomi bangsa yang merdeka. Koperasi adalah wadah perekonomian rakyat.⁴¹

Selanjutnya dalam Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 terlihat adanya perumusan yang mengarah kepada meningkatnya peranan koperasi yang dinyatakan sebagai berikut:

⁴¹ Hatta, *Pemikiran Pembangunan*, LP 3ES, Jakarta, 1995, h.27.

Memberdayakan pengusaha kecil , menengah dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya. Bantuan fasilitas dan negara diberikan secara selektif terutama dalam bentuk perlindungan dan persaingan yang sehat, pendidikan dan pelatihan, informasi bisnis, dan teknologi, permodalan dan lokasi berusaha..⁴²

Implementasi rujukan diatas dapat kita lihat pada Undang-undang No25/1992, pasal 3 yang menyebutkan: Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Kalau kita tinjau secara normatif maka pasal diatas telah memberikan gambaran bahwa koperasi adalah wadah dimana rakyat akan ikut berprestasi dalam pembangunan ekonomi bangsa tanpa melihat pemilikan modal. Realisasi dari usaha untuk mewujudkan apa yang diharapkan Undang-undang Dasar 1945 dapat kita lihat dalam pasal 4 Undang-undang No 25/1992 yang menyebutkan tentang fungsi koperasi, kemudian dimantapkan oleh pasal 5 yang berisikan tentang asas koperasi Indonesia, yaitu salah satunya antara lain bahwa pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis. Asas inilah yang membedakan koperasi secara mendasar dengan unit ekonomi yang lain. Dalam koperasi asas dasar ekonomi yaitu efisiensi dan efektivitas dipadukan dengan nilai budaya bangsa - gotong-royong, dan inilah ciri khas koperasi.

⁴² GBHN, Bab IV Arah Kebijakan, Bagian B. Ekonomi butir 11.

Sebagai penutup bab ini perlu kiranya dibuat catatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka secara ideologis normatif maupun
2. objektif empiris koperasi adalah lembaga yang paling sesuai dengan budaya Indonesia dan bertujuan negara untuk mensejahterakan masyarakatnya secara luas, sehingga koperasi dituntut menjadi titik sentral atau inti tulang punggung ekonomi nasional.
3. Bahwa dalam rangka melaksanakan pesan politik diatas kita harus betul-betul mengerti akan makna dan kedudukan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional yang artinya bahwa koperasi harus mampu berperanan sebagai penopang utama ekonomi bangsa, koperasi diharapkan akan mampu menjadi suatu wadah yang dapat membantu mengatasi masalah-masalah pembangunan ekonomi yang titik sentuhnya adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat.

B. KOPERASI SEKOLAH

1 Pengertian Koperasi Sekolah

Secara umum kiranya orang mengenal perkumpulan koperasi sebagai perkumpulan orang-orang yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong serta mempunyai ciri khas sebagai tatanan kehidupan bangsa Indonesia yang bertujuan untuk kepentingan umum berdasarkan prinsip kekeluargaan.

Didalam masyarakat terdapat bermacam-macam bentuk koperasi,sesuai dengan usaha, lingkungan dan kepentingannya. Salah satu bentuk koperasi tersebut adalah koperasi sekolah.

Koperasi sekolah adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari siswa-siswa Sekolah Dasar, sekolah Menengah Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Tingkat Atas, Pondok Pesantren, dan Lembaga Pendidikan lainnya yang setaraf.⁴³

Jadi koperasi sekolah merupakan koperasi yang berbentuk khusus dan khas. Walaupun begitu terdapat suatu benang merah yang menyatukan pengertian tentang koperasi pada umumnya dengan koperasi sekolah yang merupakan ciri khusus yaitu:

1. Perkumpulan koperasi adalah kumpulan orang-orang, hal inilah yang sering menyebabkan perkumpulan ini dikenal sebagai organisasi kemasyarakatan. Pelajar sebagai bagian dari suatu masyarakat berhak mendirikan koperasi pelajar.
2. Koperasi mempunyai tugas pelayanan. Sebagai organisasi masyarakat koperasi wajib memberikan pelayanan kepada mereka yang telah meyakini keberadaannya. Koperasi adalah milik anggota yang telah mendirikannya, karena salah satu tujuannya adalah mendapatkan pelayanan agar terpenuhi kebutuhannya. Tujuan yang lain adalah mereka dapat mengawasi langsung usaha yang dijalankan karena koperasi adalah miliknya.
3. Koperasi adalah badan usaha yang merupakan suatu perkumpulan yang mempunyai sifat sosial, mampu menjaga kelanjutan hidupnya dalam

⁴³Ima Suwandi, *op. cit*, h. 2.

memenuhi kebutuhan anggotanya. Untuk itu koperasi dituntut dapat berfungsi ganda, yaitu dapat menjalankan ekonominya dan disatu pihak tetap bergerak berlandaskan sendi-sendi dasar koperasi, fungsi kedua inilah yang tidak boleh lepas. Kehilangan fungsi kedua ini perkumpulan atau organisasi yang berjalan bukanlah koperasi.

4. Koperasi adalah alat perekonomian rakyat yang mempunyai peranan yang sangat besar dalam menjalankan usaha secara bersama-sama dengan orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi yang terbatas, sehingga koperasi dapat menjadi kekuatan masyarakat yang dapat diaktifkan dalam pembangunan ekonomi negara untuk kesejahteraan ekonomi pada khususnya dan menaikkan tingkat kehidupan masyarakat pada umumnya.
5. Koperasi adalah sarana pendidikan, tempat untuk mendidik watak para anggotanya agar dapat percaya pada kemampuannya sendiri, membina jiwa gotong royong, mengendalikan diri dari sifat konsumtif, sehingga dapat berhemat dala, hidup. Disisi lain koperasi juga menjadi tempat pembinaan jiwa toleransi yang merupakan jiwa demokratis.

Kelima ciri diatas adalah terikat benang emas sehingga tidak dapat dipisahkan, dan kelima ciri tadi mendasari uraian koperasi sekolah berikut ini.

Koperasi sekolah adalah koperasi yang berada di-sekolah yang anggota-anggotanya belum dewasa, karena terdiri atas siswa-siswa suatu sekolah.

Sebetulnya koperasi sekolah belum dapat disebut koperasi, dan oleh Departemen Koperasi disebut sebagai pra-koperasi. Oleh karena itu koperasi sekolah tidak perlu berbadan hukum, cukup terdaftar saja.

Sesuai dengan tempatnya kita mengenal berbagai anggota koperasi sekolah seperti: siswa-siswa Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Umum, Sekolah Madrasah Sanawiah, Sekolah Madrasah Aliyah dan seterusnya.

Koperasi sekolah tidak berbadan hukum, akan tetapi mendapat pengakuan sebagai perkumpulan koperasi dari Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi atau pejabat yang diberi kuasa oleh Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi. (SK Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi No 638/SKPTS/MEN/1974, tanggal 30 Mei 1974)

2. Dasar Hukum Pembinaan Koperasi Sekolah

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25, 1992 tentang pokok perkoperasian Bab XII Pembinaan, pasal 60 mengemukakan tentang dasar ikut sertanya pemerintah dalam pengembangan dan mendorong tumbuhnya koperasi dalam masyarakat, lengkapnya adalah sebagai berikut:

- (1) Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan koperasi dalam masyarakat.
- (2) Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada koperasi.

Mengingat dan menyadari akan peran koperasi sekolah dalam konfigurasi ekonomi nasional dan agar dapat tumbuh lebih kuat dan mandiri sehingga dapat mendudukan dirinya sebagai soko-guru perekonomian nasional, dan sebagai implementasi kehendak undang-undang diatas maka melalui beberapa surat keputusan, surat edaran pemerintah lewat pejabat yang diberi wewenang dibidang koperasi memberi petunjuk pembinaan koperasi sekolah, sebagi berikut:

1. Didalam Surat Keputusan ini terlihat bahwa pemerintah mengakui pentingnya koperasi sekolah yang mempunyai kaitan dengan program pendidikan dan proses belajar-mengajar disekolah dalam rangka pengembangan watak dan jiwa gotong-royong, bantu- membantu baik dalam lingkungan sekolah maupun dalam masyarakat.
2. Surat Keputusan ini memberikan garis dengan tegas terhadap sasaran pembinaan dengan memberikan suatu pengertian terhadap hal-hal yang meliputi:
 - 3.1. Koperasi sekolah ialah koperasi yang anggota-anggotanya murid-murid atau siswa Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Pertama, Sekolah Lanjutan Atas dan sekolah/ tempat pendidikan yang setaraf dengannya.
 - 3.2. Koperasi sekolahpun telah diberi arah, yaitu:
 - 1/ Menunjang pendidikan sekolah kearah kegiatan-kegiatan praktis guna mencapai kebutuhan ekonomi dikalangan murid-murid/ siswa- siswa,

2/ Mengembangkan rasa tanggung jawab, disiplin, setia-kawan dan jiwa demokrasi pada murid-murid sekolah yang sangat berguna bagi pembangunan diri dan negara.

2.3. Guna memberikan arah kehidupan masa depan koperasi sekolah maka status koperasi sekolah telah ditetapkan sebagai tidak perlu berbadan hukum. Hal ini disarankan karena anggota-anggota koperasi sekolah belum cakap hukum. Untuk itu koperasi sekolah cukup mendapat pengakuan dari Depertranskop sebagai perkumpulan koperasi yang tercatat.

3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Koperasi Perkotaan No: 285/ PKK/ III/1998, Jakarta , tanggal 06 Mei 1998 tentang naskah keputusan bersama tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pengembangan Koperasi sekolah menjadi unit usaha otonom. Surat Edaran ini merupakan pengakuan yang lebih rinci yang berisikan tentang tata-cara pembinaan menuju terwujudnya pengembangan koperasi. Selain mengarah kepada pengembangan koperasi, surat edaran ini nampaknya telah betul-betul menyadari akan eksistensi koperasi sekolah sebagai unit ekonomi. Hal ini nampak adanya kesepakatan yang diberikan kepada koperasi sekolah yang meliputi:

1/ Agar diusahakan adanya peningkatan status kelembagaan koperasi sekolah menjadi unit usaha otonom melalui integrasi dengan koperasi yang berada dilingkungan sekolah,

2/ Koperasi diberi kesempatan untuk berkembang menjadi lembaga ekonomi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pada siswa-siswa sebagai anggota-anggotanya.

4. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No 518/9138 Semarang, tanggal 1 Juni 1998 perihal pembinaan dan pengembangan koperasi sekolah di-Jawa Tengah. Gubernur selaku penguasa tertinggi di Jawa Tengah telah memberikan perhatian terhadap koperasi sekolah agar dapat berkembang menjadi pelaksana ekonomi nasional yang handal sehingga akan dapat menjadi akar penggerak dan pelaku ekonomi disekolah dan lingkungannya. Guna mewujudkan harapannya melalui surat tersebut dibentuklah Tim Pembina Koperasi Sekolah.

Uraian diatas dapat dijadikan dasar kesimpulan berikut ini:

- 1/ Pemerintah nampaknya betul-betul memperhatikan keberadaan koperasi sekolah meskipun tingkatannya sebagai pelaku ekonomi tingkat akar rumput, namun pemerintah tampaknya melihat bahwa eksistensinya sangat bermanfaat luas baik bagi siswa-siswa sendiri maupun bagi peningkatan kualitas pendidikan ,
- 2/ Tampak pada sisi lain adanya kekhawatiran akan sumber daya manusia (SDM) kita yang belum cukup memahami secara mendalam tentang masalah perkoperasian.

3 Tatanan Organisasi dan Pengelolaan Koperasi Sekolah

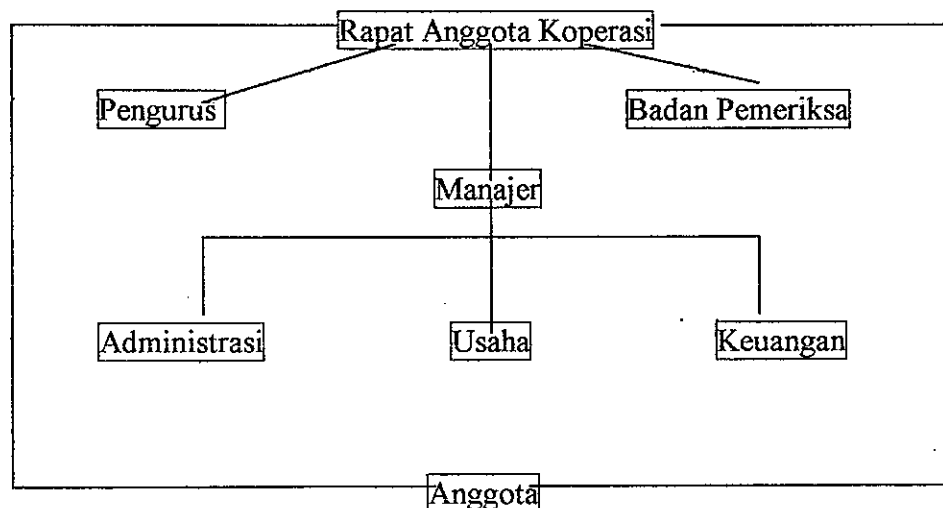
Masalah tatanan dan organisasi pengelolaan koperasi adalah erat sekali kaitannya sehingga dalam membicarakannya kedua hal ini tidak dapat dipisahkan. Hubungan keduanya adalah sebagai hubungan antara yang memberi wewenang (tatanan) dan yang diberi wewenang (pengelola), ini terlihat dari sisi intern koperasi. Sebagai contohnya adalah Undang-undang No 25/th 1992, pasal 3 butir 1a yang mengatur tentang tugas pengurus yang mengelola koperasi dan usahanya, sedangkan dalam pasal 32 menyebutkan bahwa pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola untuk mengelola usaha koperasi. Contoh ini menampilkan semacam pengurangan tanggung jawab pengurus, yaitu dengan diangkatnya seorang untuk mengelola koperasi. Tetapi hal ini tidaklah demikian, sesuai dengan bunyi pasal 31 sebagai berikut: Pengurus koperasi bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa.

Namun bila dikaji secara mendalam, keberadaan seorang pengelola selain manajer adalah tidak sesuai dengan kualifikasi dan keahlian yang dimiliki oleh pengurus, untuk inilah perlu dijabarkan pembagian tugas dan tanggung jawab antara pengurus dan pengelola koperasi khususnya dalam pengelolaan usaha koperasi. Jadi dalam kenyataannya, sesuai dengan yang kita lihat, pengelola koperasi belum mengimplementasikan tatanan organisasi yang ada.

Hingga dewasa ini di Indonesia banyak ditemukan koperasi-koperasi yang

ditangani oleh pengurus saja, terutama koperasi-koperasi sekolah yaitu yang skala operasinya kecil.

Berangkat dari gambaran kenyataan-kenyataan di atas maka untuk mengelola organisasi koperasi sekolah kita mendasarkan pada skema tatanan dasar organisasi seperti di bawah ini.⁴⁴



Seperti kita ketahui di dalam sendi dasar koperasi diamanatkan bahwa rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi, di dalam koperasi sekolah terdapat rapat anggota tahunan yang diadakan sekali setahun. Salah satu tujuannya adalah memilih pengurus yang akan diserahi tugas untuk mengelola usaha koperasi seha-

⁴⁴ Ima Suwandi, *op. cit.*, h. 35

ri-hari.

Koperasi sekolah dimasukkan kedalam kegiatan Organisasi Intra Sekolah (OSIS), jadi merupakan bagian kegiatan organisasi sekolah. Untuk kegiatan koperasi ini sekolah memberi pendamping selaku pembina yaitu seorang guru atau lebih. Seperti koperasi pada umumnya koperasi sekolah juga memerlukan pengawasan, dalam pelaksanaannya pengawasan dilakukan langsung oleh pembina koperasi. Biasanya guru mata pelajaran ekonomilah yang dipilih menjadi pembinanya, disekolah kejuruan yang pada umumnya tidak mendapatkan pelajaran ekonomi yang biasanya diberi tugas sebagai pembina koperasi adalah guru mata pelajaran pengelolaan usaha karena mata pelajaran inilah yang mendekati kegiatan unit ekonomi.

Manajer koperasi sekolah biasanya dipilih dari guru-guru yang ada pada sekolah itu, hal ini dengan mempertimbangkan bahwa yang menjadi anggota koperasi adalah para siswa, jadi gurulah yang sepantasnya menjabat sebagai manajer. Sebetulnya salah satu siswa sebagai anggota dapat menjadi manajer tetapi mengingat tugas utamanya sebagai siswa yang banyak kegiatannya hal ini tidak dapat dilakukan. Hal lain yang dijadikan pertimbangan lain adalah bahwa koperasi adalah sarana pendidikan ekonomi siswa, dengan guru sebagai manajer, dia dapat mendidik siswanya dan kelangsungan kehidupan koperasi sekolah dapat sekaligus terjamin. Bagian lain dari koperasi, yaitu bagian administrasi, bagian usaha dan keuangan dipegang langsung oleh siswa yang terpilih secara demokrasi dalam rapat anggota.

Meskipun yang bertindak sebagai manajer adalah guru tetapi penunjukkannya juga didasarkan atas berbagai pertimbangan yang terpenting adalah harus mempunyai pandangan jauh kedepan dan mengerti akan peran koperasi dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas pendidikan.

4 Modal Koperasi Sekolah

Tidak terlepas dari Undang-undang No 25/ tahun 1992 yang berisikan landasan berkoperasi juga berisi tentang tata cara memperoleh modal. Koperasi se sekolah juga memperoleh modal yang berasal dari simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman, penyisihan-penyisihan hasil usaha termasuk cadangan serta sumber-sumber lain. Simpanan anggota koperasi sekolah terdiri dari:

- a/ simpanan pokok,
- b/simpanan wajib, dan
- c/ simpanan sukarela.

Modal koperasi sekolah ini diperoleh dari sumber-sumber berikut sebagai berikut:

- a. Simpanan pokok merupakan modal utama koperasi yang tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
- b. Simpanan wajib merupakan simpanan yang dapat diambil kembali berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam rapat anggota.
- c. Simpanan sukarela adalah simpanan anggota, dan dalam ayat (3) tertu-

lis bahwa simpanan sukarela yang diterima oleh koperasi sewaktu- waktu Undang-undang tidak menentukan tentang tata-cara pengembaliannya.

Selanjutnya dikoperasi sekolah sumber modalnya yang utama adalah dari simpanan wajib para siswa sekolah tersebut. Simpanan ini biasanya ditarik oleh sekolah ketika siswa tadi masuk kesekolah tersebut sekaligus dia diwajibkan menjadi anggota koperasi sekolah. Jadi penerimaan simpanan wajib ini dikaitkan dengan penerimaan anggota koperasi sekolah.

Dalam koperasi sekolah ada tiga macam simpanan yang dipungut dari anggota yang ditentukan berdasarkan perundang-undangan nampaknya tidak dapat berjalan. Sedangkan ketentuan lain yang disyaratkan oleh undang-undang yaitu pada pasal 41 ayat (1,2,3) Undang-undang No 25/tahun 1992 yang berbunyi:

- (1) Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
- (2) Modal sendiri dapat berasal dari:
 - (a) Simpanan pokok
 - (b) Simpanan wajib
 - (c) Dana cadangan
 - (d) Hibah
- (3) Modal pinjaman dapat berasal dari:
 - (a) Anggota
 - (b) Koperasi lainnya dan/anggotanya
 - (c) Bank dan lembaga keuangan lainnya
 - (d) Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya

(e) Sumber yang sah

Sumber lain yang sah bagi koperasi sekolah susah untuk diperoleh mengingat statusnya yang masih pra-koperasi dan belum berbentuk badan hukum. Tidak adanya dana yang diperoleh dari sumber-sumber lain barangkali sehubungan dengan pasal 34, Undang-undang No 25/tahun 1992 yang mengatur tentang pertanggung jawaban pengurus yang berbunyi:

- (1) Pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung keuangan yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian.
- (2) Disamping penggantian kerugian tersebut apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.

5. Kegiatan Usaha Koperasi Sekolah

Kegiatan usaha koperasi sekolah adalah tidak berbeda dengan koperasi pada umumnya. Kegiatannya sudah barang tentu sesuai dengan tujuan pembentukan koperasi yang ditentukan oleh kebutuhan para siswa. Usaha koperasi dituntut harus betul-betul mencerminkan kebutuhan yang dirasakan sangat diperlukan para siswa, jadi didasarkan oleh ciri-ciri siswa sebagai anggotanya.

Barang-barang dan jasa yang disediakan koperasi sekolah pada umumnya berupa alat-alat belajar-mengajar berupa alat tulis menulis dan buku-buku pokok sehari-hari. Tujuannya adalah membantu siswa agar belajar lancar supaya hasil

yang dicapai bisa lebih baik.

Berikut adalah gambaran singkat usaha koperasi sekolah:

1. Pengadaan buku-buku sekolah dan alat tulis menulis. Kebutuhan utama siswa sebagai anggota koperasi sekolah adalah alat tulis-menulis berupa ballpoint, penggaris, pulpen, pensil, buku tulis, buku gambar. Peralatan tulis-menulis serta peralatan gambar sangat dibutuhkan oleh mereka, terutama pada saat menghadapi ulangan harian, ulangan umum, atau ujian. Mahalnya harga alat tulis-menulis dipasaran (diluar sekolah) menyebabkan mereka mengharapkan koperasi dapat mengurangi beban mereka , sekaligus mereka dapat berhemat. Pengadaan buku pegangan sekolahpun sangat diharapkan oleh siswa mengingat pembelian barang dalam jumlah besar biasanya mendapatkan potongan harga, lebih-lebih bila dibandingkan dengan harga di toko buku. Hal ini akan dapat terselenggara karena koperasi sekolah dapat langsung membeli dipercetakan sehingga harganya dapat dibawah harga di toko buku.
2. Pengadaan alat-alat praktek teknik: Seperti kita ketahui kegiatan koperasi dipengaruhi oleh lingkungan dan kelompoknya. Koperasi di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mempunyai bidang usaha yang lain, mengingat titik berat pendidikannya adalah pada kegiatan praktek. Koperasi disini menjual barang-barang yang diperlukan siswa ketika melaksanakan praktek seperti: alat gambar (Rapido), alat gambar teknik seperti penggaris, tinta, alat pengocok telur, 'hair dryer' (alat pengering

rambut) dan lain-lain. Bahkan ada SMK yang menjual meja gambar buatan siswa-siswa sendiri, yang merupakan hasil pelajaran praktek dengan harga yang tentu saja lebih murah dari harga diluar berhubung biaya pembuatan relatif sangat kecil dan pembelinya dapat membayar secara mengangsur.

3. Penyelenggaraan kantin: Koperasi sekolah juga menyediakan kebutuhan makanan bagi anggotanya seperti minuman , makanan kecil bahkan dibeberapa sekolah kantin sekolahpun menjadi salah satu usaha koperasinya. Makanan-makanan tadi didapat dari berbagai sumber: siswa yang membawa dari rumah, pengurus mengadakan sendiri, atau bapak atau ibu karyawan yang menitip kekantin, dan sebagainya. Berhubung mayoritas pengadaan dilaksanakan oleh orang di dalam sekolah maka harganya relatif murah. Untuk SMK yang dulu disebut sebagai SMKK (Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga) kegiatan kantin merupakan bagian dari kegiatan belajar. Disini kantin berfungsi sebagai sarana untuk belajar berusaha kecil-kecilan sebagai praktek siswa pada jurusan tata boga, bahkan kadang-kadang bila sekolahnya ditugaskan untuk mengadakan suatu perjamuan besar koperasi sekolah ikut berperan baik dalam bentuk modal maupun sarana pelaksanaannya.

Semua barang-barang yang diadakan koperasi sekolah dan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakannya adalah yang bermanfaat langsung bagi anggota-nya (siswa) untuk melancarkan proses belajar mereka. Di samping itu tidak ter-

lepas dari fungsi koperasi kegiatan-kegiatan tersebut dapat meningkatkan rasa percaya diri, mendidik mereka untuk berorganisasi dan menjadi manusia ekonomi yang handal.

C. PERANAN KOPERASI SEKOLAH DALAM PENDIDIKAN

1. Pengertian Pendidikan dan Kualitas Pendidikan

Diawali oleh ucapan Imanuel Kant bahwa manusia menjadi manusia karena pendidikan. Dari ucapan ini jelas bahwa arti pendidikan dari sebatas saja merupakan upaya memanusiakan manusia. Definisi ini didukung oleh Mr. Singh seorang India yang menemukan dua orang keturunan manusia didalam sarang serigala. Kedua temuan ini diduga telah diasuh oleh serigala, karenanya tingkah laku dan kemampuannya tak ubahnya mirip serigala. Temuan Mr Singh ini berimplikasi bahwa manusia bisa menjadi bukan manusia bila tidak dididik menjadi manusia.

Latar belakang diatas menimbulkan pertanyaan mengenai apa sebenarnya hakekat pendidikan. Jawabannya adalah tergantung dari sudut pandang para pakar pendidikan dalam memberi arti pendidikan itu sendiri. Sudut pandang ini dapat bersumber pada falsafah, pandangan hidup, atau ilmu-ilmu pengetahuan yang ada hubungannya dengan tingkah laku manusia.

1.1 Pengertian Pendidikan

Berikut ini adalah beberapa definisi tentang pendidikan:

Pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia. Pengangkatan manusia ketaraf insani itulah yang disebut mendidik. Pendidikan adalah memanusiakan manusia muda.⁴⁵

Pada Konggres Taman Siswa yang pertama tahun 1830 dihasilkan bahwa:

Pendidikan pada umumnya berarti upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelektual) dan tubuh anak. Di-Taman Siswa tidak ada pemisahan bagian-bagian agar supaya kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik selaras dengan dunianya.⁴⁶

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1973 menulis: Pendidikan pada hakekatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan didalam dan diluar sekolah an berlangsung seumur hidup..

Dari definisi-definisi diatas dapat diambil catatan bahwa arti pendidikan adalah suatu proses yang dilakukan dengan sadar yang mengarah kepada pembentukan karakter siswa untuk menciptakan suatu keadaan tertentu yang dikehendaki masyarakat dan negara.

Pendidikan dalam arti mikro adalah merupakan proses interaksi antara pendidik dan peserta didik baik didalam keluarga, sekolah maupun masyarakat. Sedangkan pendidikan dalam arti makro adalah proses interaksi antara manusia sebagai individu atau pribadi dan lingkungannya atau semesta, lingkungan sosial, masyarakat, sosial ekonomi, sosial politik dan sosio budaya.⁴⁷

Jadi berdasarkan uraian diatas jelas kiranya satu hal bahwa pendidikan merupakan suatu proses yang banyak melibatkan dan diperlukan adanya keikutsertaan bermacam-macam komponen dalam masyarakat, sehingga dapat terwujud

⁴⁵ Kunaryo Hadikusumo, *Pengantar Pendidikan*, IKIP Semarang Press, 1996, h. 19.

⁴⁶ *Ibid*, h. 20.

⁴⁷ *Ibid*, h. 23.

suatu hasil yang berkualitas. Dengan diperolehnya hasil yang berkualitas diharapkan akan diperoleh bibit unggul yang dapat menyumbangkan tenaga dan pikirannya bagi pembangunan bangsa.

1.2 Kualitas Pendidikan

Kualitas pendidikan berhubungan dengan proses pendidikan yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu produk.

Pendidikan tidak akan berhasil baik kalau dalam perjalanan prosesnya tidak didukung oleh komponen-komponen yang lain. Ditinjau dari segi proses, pendidikan dikatakan berkualitas apabila proses belajar-mengajar berlangsung secara efektif, dan para peserta didik mengalami proses belajar yang bermakna ('meaningfull') dengan ditunjang oleh berbagai sumber daya, baik berupa manusia, dana, sarana, maupun prasarana, secara wajar.⁴⁸

Adapun ciri-ciri adanya peningkatan kualitas pendidikan yakni:

1. Para siswa menunjukkan adanya penguasaan yang tinggi terhadap tugas belajar yang diberikan oleh gurunya. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa secara operasional siswa/peserta didik mampu menunjukkan hasil belajar akademik yang diwujudkan dalam bentuk prestasi belajar.
2. Hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam kehidupannya, sehingga usaha belajar yang dilaksanakan dapat maksimal sehingga peserta didik tidak hanya sekedar 'mengetahui' saja tetapi 'dapat melakukan sesuatu' yang lebih bermanfaat bagi kehidupannya sesuai dengan tuntutan lingkungan dan dunia kerja.

⁴⁸ *Ibid*, h.100.

3. Sedangkan pandangan kedepan hasil pendidikan diharapkan akan dapat sesuai dengan tuntutan lingkungan dan duni kerja.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan teknologi yang semakin pesat yang memasuki seluruh relung kehidupan manusia sehingga menimbulkan bermacam-macam permasalahan yang hanya dapat diselesaikan melalui penguasaan teknologi: kondisi perubahan ini juga membawa dampak timbulnya era persaingan global yang semakin ketat. Agar mampu berperan dalam era global diperlukan adanya peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang harus direncanakan secara intensif, efektif dan efisien searah dengan proses pembangunan. Dengan adanya peningkatan SDM, kualitas produkpun cenderung meningkat.

Peningkatan kualitas pendidikan adalah suatu proses yang terintergrasi dengan proses peningkatan kualitas SDM itu sendiri.⁴⁹ Guna mengimbangi usaha peningkatan kualitas pendidikan pemerintah mengadakan usaha pembangunan pendidikan yaitu dengan mengadakan kegiatan perbaikan kurikulum, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya.

Demikianlah sekilas pengertian arti pendidikan, terlihat jelas bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan belum cukup memenuhi harapan.

⁴⁹ Dirjen Dikdasmen, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, Sebuah Pendekatan Baru dalam Pengelolaan Sekolah untuk Peningkatan Mutu*, Jakarta, 1999, h.5.

2. Kedudukan Koperasi dalam Pendidikan

2.1 Peranan Koperasi secara Umum

Peranan koperasi secara makro di tanah air kita tercinta ini kiranya telah membuktikan bahwa kehadirannya di tengah-tengah mereka telah dapat diselamatkan oleh koperasi ('saved by the cooperative') kelangsungannya hidupnya, karena mereka menyadari betul-betul koperasi sebagai wadah yang cocok, untuk hidup selain bergotong-royong, bersama-sama menanggulangi segala kesulitan sehingga terwujud peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan menuju hidup yang lebih baik.

Pada masa sekarang ini kiranya peranan koperasi menjadi sangat besar tidak hanya dari sisi ekonomi saja tetapi lebih dari pada itu, koperasi juga merupakan alat pendidikan, menjadi alat pemersatu rakyat Indonesia.

Mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia No 25/ tahun 1992 tentang Perkoperasian Bab III bagian pertama: fungsi dan peran koperasi jelas disebutkan dengan jelas tentang peranan sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko-guru

nya.

- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Merujuk pada peranan koperasi secara makro seperti uraian diatas maka akan lebih baik bila kita hubungkan dengan dengan keadaan sekarang dimana kita berada dalam transisi yang penuh gejolak yang sangat berpengaruh disegala bidang.

2.2 Kondisi Sekarang

Sekarang ini bangsa Indonesia berada dalam masa reformasi menuju berbagai perubahan penting dalam rangka menata kembali semua pranata kehidupan agar dapat memperlancar pembangunan dan segera dapat keluar dari krisis yang berkepanjangan. Timbulnya berbagai perubahan telah menumbuhkan ketidak pastian dalam masa transisi ini.

Perubahan itu sudah barang tentu banyak berpengaruh terhadap berbagai sisi kehidupan secara umum baik ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya seperti yang kita rasakan sekarang ini. Salah satu akibatnya juga berpengaruh di bidang pendidikan. Dibiidang ini pengaruh yang amat dirasakan adalah menurunnya kemampuan orang tua siswa untuk membiayai pendidikan anak-anaknya, terutama pada masyarakat lapisan bawah yang berdampak pada meningkatnya

jumlah angka putus sekolah.⁵⁰ Padahal memasuki abad kedua puluh satu dunia pendidikan menghadapi tantangan yang sangat kompleks, yaitu tugas untuk meningkatkan kualitas SDM yang harus mampu bersaing di era global.

Tantangan yang harus segera dihadapi dan sudah berada didepan mata kita yaitu era persaingan dilingkungan. Asean Free Trade Area (AFTA) tahun 2000 dan era Asia-Pacific Economy Cooperation (APEC) tahun 2001.

Tugas menghadapi tantangan di atas semakin berat, karena sampai saat ini kita belum berhasil keluar dari krisis multi dimensi yang mulai terjadi tahun 1997. Atas dasar kondisi itu tidak ada jalan lain yang harus dilakukan selain menggerakkan potensi ekonomi rakyat agar dapat menciptakan tujuan akhir pembangunan ekonomi Indonesia yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Reformasi menuju ekonomi rakyat harus diwujudkan dengan memberdayakan koperasi karena peranan koperasi telah jelas dan tegas dicantumkan dalam pasal 33 UUD 1945. Sikap keberpihakan pada sektor ekonomi rakyat telah ditinggalkan selama 32 tahun. Untuk itu kita harus segera mengimbangi dengan mewujudkan secara nyata berbagai program atau kebijakan yang lebih mengembangkan rakyat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini adalah sejalan dengan keadaan sekarang yang sudah semakin mengkhawatirkan dan meresahkan masyarakat khususnya para orang tua murid yang merasakan dampaknya ketika

⁵⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Rumusan Hasil Rapat Kerja Nasional Depdiknas*, Jakarta, 200.

harus membiayai pendidikan anaknya. Menggerakkan koperasi yang merupakan institusi ekonomi yang berakar pada budaya Indonesia dan tercantum jelas dalam hukum dinegara Indonesia ini adalah reaksi yang harus segera dilakukan.

2.3 *Kaitan Pendidikan dengan Ekonomi*

Kegiatan pembangunan di segala bidang tidak akan dapat berjalan lancar manakala manusianya atau SDMnya tidak mengalami pendidikan serta dalam keadaan buta huruf. Pendidikan merupakan kunci utama bagi suksesnya pembangunan dan usaha menaikkan tingkat kecerdasan rakyat menjadi bertata-krama dan terampil dalam berpartisipasi dalam setiap program pembangunan.

Oleh sebab itu perlu disadari oleh para elite politik yang menjadi pembuat kebijakan di bidang pendidikan untuk dapat memahami betul maksud pendidikan di tengah-tengah satu komunitas sosial, dalam konteks kultural dan pada suatu periode sejarah tertentu dalam kehidupan pemerintahan. Di samping itu harus dipahami pula bahwa pendidikan merupakan suatu proses yang akan mempengaruhi perilakunya dalam menanggapi pelaksanaan pembangunan yang sedikit banyak akan mempengaruhi harapannya di masa mendatang. Tetapi perlu pula diketahui bahwa pelaksanaan pendidikan dalam suatu proses pembangunan harus merupakan suatu sistim yang terkondisi dan terintegrasi dengan semua segi kehidupan manusia dimana di dalamnya terdapat unsur yang dapat menghambat atau mendukung kelancaran program pendidikan. Sehubungan dengan hal ini maka terdapat kaitan erat antara ekonomi dan pendidikan yang memberikan pengaruh

timbang balik.

Maka dilihat dari satu segi, pendidikan atau sekolah merupakan komponen ekonomi yang penting, karena:

- 1/ Sekolah menghasilkan tenaga kerja untuk masuk kepasar kerja,
- 2/ di samping itu sekolah membentuk manusia ekonomi yang sanggup membangun masyarakat dan negaranya.

2.4 Peranan Koperasi dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Secara makro, hakekat, peranan serta fungsi koperasi dalam pembangunan ekonomi adalah untuk mendorong terwujudnya suatu tatanan ekonomi yang berazaskan kekeluargaan, sedangkan di dalam konteks pendidikan maka peranan keberadaan koperasi sekolah dalam pendidikan juga sudah disadari sebagai alat pendukung proses pendidikan. Hal ini dapat kita lihat lewat kebijakan yang sudah dikeluarkan instansi yang berwenang didalam pembinaan perkoperasian dan instansi di bidang pendidikan.

Implementasi peranan koperasi sekolah dapat dilihat dengan ditentukannya secara tegas tujuan berdirinya koperasi sekolah dalam surat keputusan menteri tenaga kerja no:638/ SKPTS/ MEN/1974 tertanggal 30 Mei 1974 tentang ketentuan yang berbunyi sebagai berikut:

Maksud dan tujuan koperasi sekolah adalah:

- 1/ Menunjang pendidikan sekolah kearah kegiatan-kegiatan praktis guna mencapai kebutuhan ekonomi di kalangan murid-murid/siswa-siswa.

- 2/ Mengembangkan rasa tanggung jawab, disiplin, setia kawan dan jiwa demokratis pada murid-murid/siswa-siswa sekolah, yang sangat berguna bagi pembangunan dari dan negara.

Jadi secara yuridis usaha pengembangan dan pembinaan koperasi sekolah telah dilandasi melalui keputusan bersama antara:

1. Direktur Jenderal Pembinaan Koperasi Perkotaan, Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil.
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Direktur Jenderal Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri.⁵¹

Naskah di atas tertanggal 24 Pebruari 1998 dipakai sebagai petunjuk pelaksanaan pembinaan dan pengembangan koperasi sekolah sebagai unit usaha otonom. Jelas terlihat dalam diktumnya yang menyatakan dengan tegas akan peranan koperasi sekolah sebagai wadah pendidikan dan latihan para siswa dalam rangka menumbuhkan jiwa dan kemampuan berwiraswasta dan disisi lain sebagai suatu usaha untuk mengembangkan lembaga ekonomi ini supaya dapat berperan dalam mewujudkan demokrasi ekonomi.

3 Tinjauan terhadap Kondisi Koperasi Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Mengengah Kejuruan (SMK)

Koperasi sebagai organisasi ekonomi terkecil barangkali telah diketahui

⁵¹ Naskah Keputusan Bersama Nomor 01/SKB/PPK/II/1998, 14/C/KEP/15/1998

oleh semua masyarakat di-Indonesia, hal ini terlihat dengan banyaknya papan-papan nama yang terpampang yang seringkali dijumpai didepan instansi-instansi. Namun mengenai keberadaan koperasi sekolah nampaknya belum sepenuhnya mendapat tempat yang wajar, padahal kalau dikaji lebih dalam perannya cukup besar dalam meningkatkan kesejahteraan para siswa. Hal ini terjadi karena masing-masing pihak masih memandang organisasi koperasi dari sudut pandang yang berbeda-beda dan berangkat dari pengetahuan tentang koperasi yang masih sedikit.

Sehubungan dengan hal di atas tinjauan berikut ini kiranya dapat menggambarkan secara bulat kondisi koperasi sekolah di SMU dan SMK dikota Semarang.

3.1 Pengertian Koperasi

Para siswa telah betul-betul mengerti arti koperasi sekolah yaitu koperasi yang anggotanya adalah siswa sekolah yang bersangkutan. Akan tetapi secara yuridis koperasi sekolah, sesuai Undang-undang Koperasi No 25/tahun 1992, adalah koperasi yang anggotanya harus sudah dewasa dalam arti sudah dapat bertindak secara hukum. Siswa SMU dan SMK adalah mereka yang oleh pemerintah belum mampu bertindak dan melakukan kegiatan hukum, oleh sebab itu banyak koperasi SMU dan SMK menempatkan guru ekonomi atau guru yang ada kaitannya dengan ekonomi pada posisi penting sebagai pendamping.

Secara makro pengertian koperasi sekolah bagi siswa SMU dan SMK telah cukup mendalam dan didukung oleh kepala sekolahnya, karena keberadaan kope-

rasi sangat ditentukan oleh persepsi kepala sekolah sebagai penentu kebijakan tunggal.

3.2 Tujuan

Berbeda dengan koperasi di-SMU yang nampaknya kurang begitu mendesak keberadaannya, koperasi di-SMK sangat diharapkan oleh para siswa. Latar belakang hal ini adalah kenyataan bahwa siswa SMK mayoritas berasal dari keluarga yang berekonomi menengah kebawah yang cenderung lemah, padahal dalam kegiatan belajar praktek diperlukan materi dan alat belajar yang perlu dimiliki siswa dan yang akan lebih bisa dimiliki lewat membeli secara mengangsur di koperasi.

Kebutuhan akan keberadaan koperasi sekolah terintegrasi dengan tujuan pendidikan lembaga pendidikan yang bersangkutan. Realisasi pendidikan koperasi terwujud dalam kurikulum, baik di SMU maupun di SMK koperasi tercantum dalam kurikulum. Secara makro tujuan koperasi sekolah telah disadari kepentingannya dan juga peranannya, yaitu:

1. Keberadaan koperasi sekolah adalah untuk menunjang pelaksanaan pendidikan di dalam kelas dengan tindakan praktek yang wujudnya antara lain 'warung koperasi',
2. Di sisi lain keberadaan koperasi juga bertujuan untuk menanamkan jiwa sosial dan jiwa demokrasi, seperti berani mengemukakan pendapat selaku anggota koperasi.

3.3 Keanggotaan

Berdasarkan Undang-undang No 25/1992 tentang Pokok-pokok Perkoperasian ditentukan bahwa seseorang menjadi anggota koperasi adalah sukarela, jadi tidak ada unsur paksaan. Sesuai dengan azas koperasi dan sendi koperasi, seseorang dapat dengan bebas menentukan kehendaknya untuk masuk dan keluar dari koperasi sekolahnya. Namun dalam pelaksanaannya ketentuan ini belum dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya, karena keanggotaan koperasi sekolah ditetapkan sebagai suatu ketentuan wajib bagi seluruh siswa, yaitu ketika mereka diterima disekolah yang bersangkutan dan membayar biaya administrasi dan uang sekolah sekaligus dikenakan kepada mereka untuk membayar simpanan pokok koperasi sekolah, jadi seolah-olah ada semacam keharusan bagi siswa untuk menjadi anggota koperasi.

Sesuai dengan perundang-undangan, kewajiban dan tanggung jawab anggota koperasi adalah sebagai berikut:

1. Anggota koperasi sekolah wajib mengenal segala landasan, sendi, undang-undang, peraturan, anggaran dasar dan rumah tangga koperasi serta keputusan rapat anggota.
2. Anggota koperasi wajib menghadiri dan ikut secara aktif dalam kegiatan pengelolaan koperasi, yaitu dalam rapat anggota dan bertanggung jawab serta mengamankan keputusan rapat anggota.

Baik di SMU maupun di SMK kondisi keanggotaan koperasi terlihat pada partisipasi anggota yang menonjol. Sedangkan uang simpanan anggota yang keluar

karena sudah lulus, masing-masing sekolah memiliki kebijakan yang berbeda, ada yang diserahkan kembali kepada anggota untuk biaya melanjutkan sekolah atau dipergunakan sebagai tambahan modal awal berwiraswasta (bagi siswa SMK). Tetapi ada juga sekolah yang menentukan kebijakan lain yaitu mewajibkan simpanannya disumbangkan kepada koperasi sekolah yang ditinggalkannya.

3.4 Ketatalaksanaan (manajemen)

Suatu organisasi yang baik akan dapat berjalan dengan lancar dan mantap apabila dikelola dengan tata-laksana yang baik atau manajemen yang baik. Bermanajemen yang baik berarti koperasi dikelola dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi yang akhirnya dievaluasi oleh pengurus koperasi dengan baik.

Sesuai dengan perundang-undangan koperasi maka koperasi sekolah memiliki seperangkat peralatan organisasi, yaitu rapat anggota, pengurus, badan pemeriksa, dan pelaksana usaha. Peralatan organisasi seperti tersebut tadi tidak dimiliki oleh semua koperasi sekolah, di lapangan ternyata banyak koperasi yang tidak memiliki peralatan organisasi secara lengkap. Hal ini mengakibatkan koperasinya tidak dapat berfungsi secara maksimal.

Masing-masing sekolah mempunyai karakteristiknya masing-masing, di-SMU ada sekolah yang manajemennya menonjol dan begitu juga di-SMK ada yang menonjol ada pula yang biasa-biasa saja.

Tujuan singkat pemilikan peralatan organisasi tersebut adalah:

a. *Rapat anggota*

Pelaksanaan rapat anggota di sekolah tidak dapat dilaksanakan secara masal, tetapi dilakukan melalui perwakilan, tetapi tidak semua sekolah dapat menyelenggarakan rapat anggota sesuai dengan ketentuan perundangan.

Pertanggungjawaban pengurus tidak dilaksanakan di hadapan rapat anggota tetapi disampaikan kepada kepala sekolah. Nampaknya prinsip pemikiran ini dilandasi kepraktisan karena kepala sekolah dianggap merupakan pejabat penentu.

b. *Pengurus*

Sesuai dengan peraturan maka pengurus koperasi sekolah dipilih oleh rapat anggota, tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan (di sekolah) pengurus koperasi di beberapa sekolah ditentukan oleh kepala sekolah dengan saran dari guru-guru yaitu sekolah-sekolah yang tidak dapat menyelenggarakan rapat anggota. Kondisi pengurus koperasi di-SMU dan SMK pada umumnya variatif yaitu ada beberapa jabatan strategis yang masih dijabat oleh guru. Terkadang juga terdapat sekolah yang siswanya tidak ada satupun yang bersedia menjadi pengurus koperasi sekolahnya, bila hal ini terjadi maka koperasi karyawan dalam kegiatannya juga melayani kebutuhan para siswa. Memang masalah mendasar pada koperasi sekolah adalah penunjukan pengurus koperasi, karena pada dasarnya para siswa tidak bersedia menjadi pengurus karena mereka harus bekerja di luar jam sekolah.

c. Pengawas

Peranan pengawas koperasi sekolah berbeda dengan ketentuan dalam perundangan, pada koperasi sekolah fungsi pengawas adalah ikut bertanggung jawab terhadap jalannya pengelolaan. Kelancaran tugas pengurus koperasi dan usahanya merupakan tanggung jawab pengawas yaitu secara periodik mengadakan pengawasan melalui rapat pengurus dan rapat anggota. Penunjukan pengawas koperasi sekolah diberikan kepada seorang guru yang ada sangkut pautnya dengan pelajaran koperasi. Di SMU pengawasnya biasanya adalah guru mata pelajaran koperasi sedangkan di SMK biasanya adalah guru mata pelajaran Pengelolaan Usaha.

d. Badan Pemeriksa

Badan pemeriksa mempunyai tugas yang amat penting karena dia menjalankan fungsi kontrol terhadap administrasi koperasi sekolah dan pembukuan koperasi dan yang lebih penting lagi adalah harus dapat membawakan aspirasi para anggota. Badan pemeriksa koperasi sekolah terdiri dari siswa dan guru.

Belum semua sekolah menengah atas memiliki badan pemeriksa, lebih lanjut menjalankan tugasnya. Di SMU hanya ada beberapa sekolah yang koperasi sekolahnya memiliki badan pemeriksa dan dapat menjalankan kewajibannya dengan baik. Penunjukan personil badan pemeriksa koperasi sekolah dilakukan oleh kepala sekolah baik terhadap guru atau siswa. Peranan guru yang ditunjuk kepala sekolah sangat berpengaruh terhadap perkembangan koperasi sekolah.

e. Penasehat

Mengingat koperasi sekolah dikelola oleh para siswa yang belum cukup dewasa dalam menangani organisasi koperasinya mereka memerlukan penasehat. Penasehat ini terdiri dari para guru dan orang tua murid yang sangat berkepentingan terhadap kemajuan pendidikan anak didiknya.

Tugas penasehat adalah memberikan bimbingan, dorongan dan penyuluhan kepada pengurus koperasi sekolah tentang cara pengelolaan koperasinya. Posisi penasehat ini sangat penting karena dalam hal koperasi akan memutuskan sesuatu yang menyangkut keuangan penasehat harus dimintai pendapatnya.

Kondisi koperasi sekolah di SMU dan SMK yang berkaitan dengan penasehat adalah belum memuaskan. Pada pelaksanaannya, penasehat dilaksanakan oleh kepala sekolah beserta guru.

f. Pelaksana

Dalam melaksanakan koperasi sekolah pada umumnya penguruslah yang berperan dibantu para pelaksana yang dipimpin oleh seorang manajer. Pada koperasi sekolah, mengingat keberadaannya sebagai alat belajar maka manajer pelaksana belum dibutuhkan. Di koperasi SMU dan SMK pelaksanaan usaha koperasinya dikoordinir oleh seorang guru yang mengampu mata pelajaran ekonomi atau pengetahuan sosial. Pelaksanaan usaha koperasi dilakukan sambil mempraktekkan tata administrasi, kasir, mengetik, mencatat barang-barang dan melaksanakan pembukuan dan lain-lain. Pada koperasi di SMU dan SMK kondisi

ini sudah dapat berjalan dengan cukup baik, meskipun agak tersendat-sendat. Yang terlihat meyakinkan adalah keberadaan 'Toko Koperasi Sekolah' yang hampir terdapat di sebagian sekolah menengah di Semarang.

3.5 *Kegiatan Usaha*

Kegiatan usaha koperasi di SMU dan SMK pada umumnya bertujuan untuk:

- 1/ meningkatkan keterampilan dalam praktek berwirausaha,
- 2/ memenuhi kebutuhan para siswa dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran.

Bidang usaha koperasi SMK sifatnya lebih karakteristik mengingat SMK memiliki pelajaran praktek yang membutuhkan banyak peralatan dan materi praktek. Adapun rincian kegiatan usaha koperasi sekolah kalau dikaji merupakan kegiatan ekonomi seperti uraian dibawah ini:

- 1/ Kebutuhan yang paling utama siswa adalah tersedianya buku pelajaran pokok, tinta gambar, rapido, kertas gambar dengan harga yang murah. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sudah dilaksanakan baik di koperasi SMK maupun di SMU meskipun ditinjau dari latar belakangnya ekonomi keluarga siswa SMK dan siswa SMU berbeda, siswa SMU biasanya berasal dari keluarga yang berekonomi kuat (mengingat setelah lulus mereka harus meneruskan sekolah kepergu-

ruan tinggi), sedangkan orang tua siswa SMK pada umumnya adalah berekonomi menengah kebawah (diharapkan anak mereka langsung bekerja setelah lulus). Kegiatan pengadaan alat sekolah dilakukan karena dapat meringankan beban siswa, disisi lain dapat mendatangkan keuntungan bagi koperasi.

Kegiatan ini nampaknya sangat menonjol baik di koperasi SMK maupun SMU karena dirasakan hal ini membantu proses belajar para siswa sebagai anggota koperasi sekolah. Di koperasi sekolah para siswa dapat membeli buku sekolahnya jauh lebih murah dari pada bila mereka membeli di toko buku, dengan demikian kebutuhan akan adanya koperasi menjadi semakin kuat, lebih-lebih pada tes semester atau ujian.

- 2/ Kebutuhan peralatan praktek sangat terasa baik bagi siswa SMU maupun SMK adalah alat untuk menggambar teknik yang biasa disebut 'rapido'. Karena harganya yang mahal para siswa membelinya dengan cara mencicil di koperasi sekolahnya. Kenyataan ini ditemukan hampir di sebagian besar sekolah SMU dan SMK.
- 3/ Penyelenggaraan kafetaria banyak dilaksanakan hampir disemua SMU dan SMK tetapi penyelenggarannya nampaknya agak kena sasaran hanya pada SMK 'Kesejahteraan Keluarga', karena banyak para siswanya yang menitipkan makanan kecil buatannya sendiri di kafetaria sekolahnya.

Kegiatan yang menonjol baik di koperasi SMU maupun SMK bila dikaji secara dalam adalah kegiatan siswa sebagai manusia ekonomi, inilah yang harus ditingkatkan kualitasnya.

3.6 *Permodalan*

Berdasarkan ketentuan yang berlaku maka modal koperasi pada prinsipnya berasal dari anggota, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk dapat memperoleh bantuan modal dari luar. Ketentuan ini juga berlaku bagi koperasi sekolah. Seperti kita ketahui modal koperasi sekolah bersumber dari penerimaan:

1. Simpanan pokok, merupakan sumber yang utama sebagai modal awal koperasi. Pengertian simpanan pokok adalah sejumlah uang yang disetor oleh anggota pada waktu anggota pertama kali masuk menjadi anggota koperasi. Hal ini dilaksanakan di koperasi SMK dan SMU tetapi dikenakan secara wajib pada waktu siswa diterima menjadi siswa pada sekolah yang bersangkutan. Di beberapa sekolah bahkan pelaksanaan pembayaran simpanan pokok dilakukan secara diangsur dan tidak dapat ditarik kembali kecuali yang bersangkutan keluar dari sekolah (bukan karena dia lulus).
2. Simpanan wajib, yaitu tambahan modal yang diserahkan oleh anggota yang dilandasi atas dasar kesadaran untuk ikut menambah modal koperasi. Adapun pengertian 'simpanan wajib' adalah sejumlah uang

yang diserahkan anggota yang berhubungan dengan usaha koperasi. Kegiatan pengenalan simpanan wajib belum dapat berjalan, mengingat kondisi ekonomi anggota yang seluruhnya adalah siswa. Baik di-SMU dan SMK pengenalan simpanan wajib jarang terjadi, karena kegiatan koperasi sekolah lebih difokuskan pada kegiatan yang sifatnya umum. Tetapi barangkali belum dikenakannya simpanan wajib pada para anggota koperasi sekolah ini disebabkan oleh kondisi organisasi koperasi yang cukup berat untuk menanggung tanggung jawabnya.

3. Pada dasarnya masalah permodalan koperasi sekolah merupakan masalah prinsip yang perlu mendapat perhatian mengingat kondisi organisasi koperasi yang tidak berbadan hukum menyebabkan koperasi sekolah sukar bergerak untuk mendapat bantuan.
4. Salah satu harapan adalah adanya kebijakan dari instansi yang lebih atas yang mampu mendorong pengembangan koperasi agar dapat bergerak lebih luas.

4. Pengembangan Koperasi Sekolah Dimasa Mendatang

Mengingat peranannya yang strategis di dalam pendidikan, keberadaan koperasi sekolah harus mendapat pembinaan dan perlu dikembangkan secara khusus.

Perhatian pemerintah terhadap koperasi dapat dilihat dengan dikeluarkannya "Keputusan Bersama", Direktur Jenderal Pembinaan Koperasi

Peikotaan Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi. Daerah Departemen Dalam Negeri nomor:

01/SKB/PPK/II/1998, tanggal 24 Pebruari 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan

14/C/KEP/05/1998

518-135

dan Pengembangan Koperasi Sekolah menjadi unit usaha otonom, yang mengemukakan dengan tegas tujuan dan pembinaan, yaitu: Tujuan pembinaan dan pengembangan koperasi sekolah adalah untuk meningkatkan peranan dan kemampuan koperasi sekolah sebagai tempat pendidikan, pelatihan dan magang para siswa koperasi sekolah dalam berkoperasi dan mengembangkan jiwa dan kemampuan kewirausahaannya, dan sebagai lembaga ekonomi yang efektif dan efisien dalam meningkatkan kesejahteraan para siswa sekolah.

Atas dasar garis yang ditetapkan diatas maka dapat diinterpretasikan, sebagai berikut:

1. Bahwa pemerintah menyadari sedalam-dalamnya bahwa keberadaan koperasi sekolah sangatlah penting karena memiliki 2 (dua) aspek:
 - a/ Aspek pendidikan: keberadaan koperasi sekolah adalah sebagai wahana untuk mendidik para siswa memperoleh pengetahuan berkoperasi. Pengetahuan ini sangat penting untuk bekal hidupnya di masyarakat. Ketrampilan berkoperasi dalam praktek akan dapat di-

capai dengan dukungan pelajaran teori yang diperoleh dari guru di kelas. Semuanya ini tercapai bila setiap sekolah memiliki koperasi yang beroperasi dengan baik.

b/ Aspek wiraswasta: dengan ikut sertanya siswa secara aktif dalam mengelola langsung koperasi sekolahnya maka siswa akan dapat menghayati kehidupan sebagai pelaku ekonomi. Aspek ini merupakan pendidikan informal yang melatih siswa hidup bergotong-royong -- bermasyarakat.

2. Di sisi lain pemerintah juga berharap bahwa dengan dilaksanakannya program pembinaan dan pengembangan ini koperasi sekolah:

a/ Menjadi pelaku ekonomi yang dapat memberikan manfaat berkoperasi dan manfaat ekonomi kepada para siswa sebagai anggotanya dan masyarakat sekitarnya.

b/ Mampu memberikan sumbangan nyata kepada dunia pendidikan dan pembangunan.

c/ Ikut berperan dalam mewujudkan sekolah sebagai wiyata mandala secara utuh dan inovatif.

Mengingat manfaat koperasi sekolah sangat berarti dalam memajukan pendidikan para anggotanya (siswa) maka sudah selayaknyalah pembinaan dan pengembangan koperasi sekolah perlu dilaksanakan secara pasti dan tanpa berhenti. Di masa kondisi prekonomian yang sangat tidak menentu ini peningkatan koperasi sekolah kiranya dapat lebih membantu pendidikan para anggotanya seba-

sebaiknya perlu dipikirkan. Salah satu alternatif peningkatan koperasi sekolah adalah menjadi 'Gabungan Koperasi Sekolah Kota Semarang'. Dengan peningkatan ini diharapkan peran dan kontribusi koperasi sekolah akan dapat ditingkatkan dengan jangkauan yang lebih luas.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANNYA

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapat hasil yang disajikan menyatu dengan pembahasannya, yang meliputi:

1. Pelaksanaan Undang-undang Koperasi pada koperasi SMU dan SMK di kota Semarang.
2. Kemampuan koperasi SMU dan SMK di kota Semarang dalam memenuhi kebutuhan anggotanya, dan
3. Proses penggabungan koperasi-koperasi tersebut dalam rangka meningkatkan eksistensinya.

Hasil penelitian dan pembahasannya dibagi menjadi 2 (dua) bagian, sebagai berikut:

A. Diperoleh dari pembina koperasi, yang meliputi:

- Pembina koperasi pada umumnya, yaitu pejabat yang berkedudukan di Dinas Pelayanan Koperasi Kota Semarang.
- Pembina Koperasi kodia Semarang, yaitu pejabat yang berkedudukan di Dinas Pendidikan Nasional Kota Semarang.
- Pembina koperasi sekolah selaku pembina langsung yang berkedudukan di sekolah-sekolah yang memiliki koperasi yang dalam hal ini adalah kepala sekolah dan beberapa guru yang ditunjuk oleh kepala

sekolah.

B. Yang berasal dari warga koperasi, yang meliputi:

- Pengurus koperasi sekolah pada masing-masing koperasi sekolah.
- Anggota koperasi di masing-masing koperasi sekolah.

A. Hasil Penelitian yang Berasal dari Pembina Koperasi Sekolah dan Pembahasannya.

1. Pelaksanaan Undang-Undang Koperasi pada Koperasi SMU dan SMK di kota Semarang:

Dalam memberi pembinaan terhadap koperasi sekolah para pembina tidak sepenuhnya mengacu pada UU No 25/th 1992 karena Undang-undang tersebut tidak memberikan garis-garis pembinaan yang tegas yang dapat dipakai sebagai perangkat/alat untuk membina koperasi-koperasi sekolah. Sebagai contoh, didalam UU No25/th 1992 tersebut terdapat bab tentang pembinaan yang tercantum dalam pasal 60 yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan koperasi.
- (2) Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada koperasi.

Pasal 60 ini kelihatannya hanya memuat informasi tentang bimbingan koperasi yang bersifat umum, bahkan dalam bagian penjelasan dari bab inipun tidak terperinci, hanya menyebutkan sebagai berikut:

..... Pemberian bimbingan, kemudahan, dan perlindungan oleh pemerintah merupakan upaya pengembangan koperasi yang dilaksanakan melalui penetapan kebijaksanaan, penyediaan fasilitas, dan konsultasi yang diperlukan agar koperasi mampu melaksanakan fungsi dan perannya serta dapat mencapai tujuannya.

Penjelasan pasal tersebut nampaknya kurang membumi. Mungkin karena inilah maka dalam prakteknya pelaksanaan pembinaan koperasi sekolah hanya berwujud rapat koordinasi yang dilaksanakan antara Dinas Pelayanan Koperasi Kota Semarang bersama Dinas Pendidikan Nasional Kota Semarang. Dalam rapat koordinasi ini Dinas Pelayanan Koperasi memberikan arahan kepada pembina-pembina koperasi sekolah tentang tata-cara pembinaan koperasi sekolah. Monitoring untuk mengetahui apakah arahan tersebut dilaksanakan benar-benar sepenuhnya diserahkan kepada pembina koperasi dari Dinas Pendidikan Nasional Kota Semarang (DPNKS). Menurut penjelasan para pembina dari DPNKS monitoring dilaksanakan bersama-sama dengan kegiatan monitoring sekolah yang lain, jadi monitoring koperasi sekolah secara khusus kelihatannya belum dilaksanakan. Tetapi untuk merangsang pertumbuhan koperasi sekolah pernah dilakukan oleh Dinas Pelayanan Koperasi yaitu mengadakan lomba koperasi sekolah.⁵² Kegiatan ini semenjak krisis ekonomi melanda Indonesia sudah tidak dapat dilaksanakan. Menurut hemat kami hal ini sangat disayangkan karena pada keadaan krisis ekonomi inilah koperasi cenderung diperlukan.

⁵² Hasil wawancara dengan kepala Dinas Pelayanan Koperasi Kota Semarang tanggal 15-01-2001.

Adapun temuan mengenai perangkat pembinaan koperasi sekolah adalah seperti yang terlihat dalam diagram berikut:

Jumlah responden 100

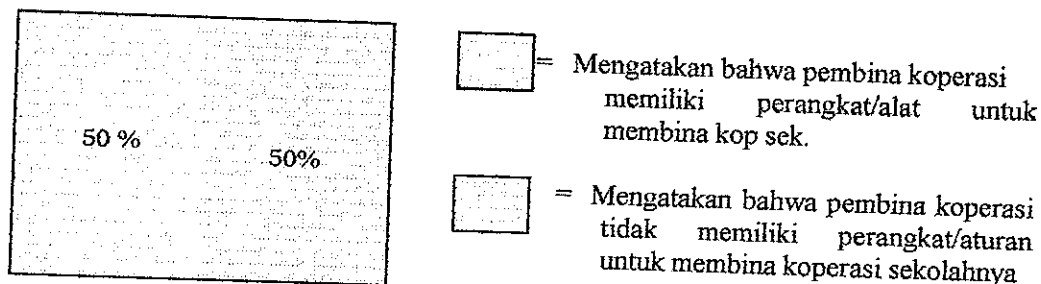


Diagram 1: Alat/ perangkat untuk pembinaan

Seperti terlihat dalam diagram diatas, hanya 50% pembina yang menyatakan bahwa mereka memiliki perangkat/aturan yang digunakan untuk pembinaan koperasi sekolah yang baku. Hal ini sangatlah disayangkan berhubung koperasi sekolah sudah melaksanakan kegiatannya cukup lama (lebih dari 10 tahun, bahkan ada yang lebih dari 25 tahun). Yang biasanya dilakukan para pembina sebelum mengadakan pembinaan adalah mengadakan rapat temporer untuk mendapatkan kesepakatan tentang apa saja yang akan ditinjau dan kemudian dibina apabila ditemukan adanya kurang lancaran dalam kegiatan koperasi sekolah.⁵³ Padahal berdasarkan studi dokumen yang dilaksanakan di lapangan ditemukan acuan pembinaan koperasi sekolah yang berbentuk sebagai berikut: keputusan bersama antara Direktur Jenderal Pembinaan Koperasi Perkotaan Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direk-

⁵³ Wawancara dengan pembina Koperasi dari Dinas Pendidikan Nasional Kota Semarang tanggal 22 Januari 2001.

tur Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktur Jenderal dan
Kebudayaan dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah De-
partemen Dalam Negeri, nomor 01/SKB/PKK/II tanggal 24 Pebruari 1998,
4/C/KEP/05/ 1998
518-135

tentang petunjuk pelaksanaan pembinaan dan pengembangan koperasi sekolah
menjadi unit usaha otonom. Menilik beberapa ketentuan didalamnya antara lain:

- a. Maksud dan tujuan: maksud petunjuk pelaksanaan ini adalah untuk menjadi pedoman bagi para pejabat dan aparat yang terkait dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan koperasi sekolah. Tujuan pembinaan dan pengembangan koperasi sekolah adalah untuk meningkatkan peranan dan kemampuan koperasi sekolah sebagai tempat pendidikan, pelatihan, dan magang para siswa anggota koperasi sekolah dalam berkoperasi, dan mengembangkan jiwa dan kemampuan kewirausahaannya, dan sebagai lembaga ekonomi yang efektif dan efisien dalam meningkatkan kesejahteraan para siswa.
- b. Didalam poin 4 tentang sasaran terlihat dengan dengan jelas sasaran pembinaan dan pengembangan koperasi sekolah menjadi unit usaha otonom adalah:
 1. mantapnya keberadaan koperasi sekolah sesuai dengan fungsi dan perannya sebagai wahana pendidikan dan pelatihan serta sebagai lembaga perekonomian;
 2. terwujudnya koperasi sekolah yang terintegrasi secara baik sebagai unit usaha otonom dan koperasi berbadan hukum yang di lingkungan sekitar sekolah;
 3. terwujudnya kader perkoperasian yang terampil yang memiliki jiwa dan kemampuan kewirausahaan sebagai produk pengembangan sumberdaya manusia yang berkualitas dari koperasi sekolah;
 4. matapnya administrasi dan manajemen organisasi dan usaha koperasi sekolah;
 5. munculnya koperasi sekolah percontohan di setiap propinsi dan kabupaten/kotamadya;
 6. berkembangnya koperasi sekolah yang mampu memberikan pelayanan kepada anggota dan masyarakat disekitarnya; dan
 7. meningkatnya kesejahteraan para siswa anggota koperasi sekolah.
- c. Salah satu poin kebijaksanaan dalam Program Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Sekolah menjadi Unit Usaha Otonom adalah: meningkatkan dan memantapkan status kelembagaan koperasi sekolah dari koperasi terdaftar yang tidak berbadan hukum diintegrasikan menjadi unit usaha otonom pada koperasi guru-guru atau pegawai sekolah yang telah berbadan hukum, atau pa-

da koperasi lain yang telah berbadan hukum yang ada di atau terdekat dengan lingkungan koperasi sekolah.

- d. Didalam tujuan program pembinaan dan pengembangan koperasi sekolah menjadi unt usaha otonom adalah agar koperasi sekolah:
 1. menjadi pelaku ekonomi yang dapat memberikan manfaat berkoperasi dan manfaat ekonomi kepada para siswa anggotanya dan masyarakat sekitarnya.
 2. Mampu memberikan sumbangan nyata kepada dunia pendidikan dan pembangunan.
 3. Ikut berperan mewujudkan sekolah sebagai wiyatamandala secara utuh dan inovatif.

Masih berkaitan dengan pembinaan koperasi sekolah, penelitian dokumen lebih lanjut menghasilkan temuan acuan lain yang dengan jelas dapat dipakai sebagai dasar dalam melaksanakan pembinaan yaitu:

- a. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi No 638/SKPTS/MEN/1974 tentang Ketentuan Pokok Mengenai Koperasi.⁵⁴
- b. Surat dari Direktur Jenderal Koperasi No 717/DK/A/VI/74 tertanggal 31 Mei 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok mengenai Koperasi Sekolah.⁵⁵
- c. Surat Edaran No 518/9138, tanggal 1 Juni 1998 Perihal Pembinaan dan pengembangan Koperasi Sekolah di Jawa Tengah beserta Petunjuk Teknisnya.⁵⁶

Implikasi penjelasan diatas adalah bahwa sebenarnya perangkat pembinaan koperasi sekolah itu sudah ada, arah dan tujuan yang hendak dicapai koperasi sekolah tercantum jelas yaitu bahwa koperasi sekolah bermanfaat bagi pendidikan,

⁵⁴ lihat pasal 4 ayat 2 diktum 4 Surat Keputusan tersebut

⁵⁵ lihat pendahuluan diktum 2 tentang Maksud dan Tujuan surat tersebut.

⁵⁶ lihat diktum 4 tentang Pembentukan Tim Pembinaan Koperasi Sekolah surat edaran

mempunyai pengaruh positif pada anak didik sebagai anggota koperasi. Apabila perangkat pembinaan ini dijadikan acuan para pembina maka barangkali perkembangan koperasi sekolah pada umumnya dan khususnya di kota Semarang dapat memenuhi harapan. Namun berdasarkan temuan yang didapat melalui kuesioner mengenai pembinaan koperasi sekolah, hanya 50% dari 100 responden yang menyatakan ada perangkat petunjuk pembinaan, sedangkan 50% yang lainnya menyatakan tidak ada. Kelompok yang menyatakan ada perangkat pembinaan biasanya mengacu pada pasal 4 Undang-undang Koperasi No25/th 1992 yang berbunyi:

- a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya,
- b. secara aktif berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat,
- c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko-gurunya, dan
- d. berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas-azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Pasal 4 Undang-undang No 25/1992 inilah yang oleh para pembina dijadikan dasar dalam mengadakan kesepakatan untuk membuat perangkat pembinaan. Padahal apabila dikaji lebih dalam pasal 4 ini hanya berisi tentang fungsi dan peranan koperasi bukan petunjuk untuk melaksanakan pembinaan.

rang⁵⁷ atau ke Dinas Pendidikan Nasional Kota Semarang⁵⁸, sedangkan pembina di sekolah (kepala sekolah dan beberapa guru di sekolah masing-masing) mengatakan kalau mereka belum pernah mendata atau diberi data oleh Dinas Pelayanan Koperasi atau Dinas Pendidikan Nasional Kota Semarang mengenai jumlah koperasi sekolah.⁵⁹ Responden kelompok terakhir ini hanya berasumsi kalau jumlahnya adalah sama dengan jumlah sekolah lanjutan atas baik negeri maupun swasta, asumsi ini berdasar pada aturan dari Dinas Pendidikan Nasional yang ditindak lanjuti oleh Gubernur melalui instruksinya yang mengatakan bahwa semua sekolah wajib memiliki koperasi sekolah.⁶⁰

Informasi mengenai jumlah koperasi sekolah yang ditemukan berdasarkan studi dokumen yang didapat dari Dinas Pelayanan Koperasi, adalah bahwa koperasi sekolah tidak termasuk dalam satu jenis koperasi yang terdaftar di instansi tersebut, terhubung sangat sedikitnya koperasi sekolah yang melapor maka koperasi sekolah dimasukkan ke jenis koperasi lain-lain.⁶¹

⁵⁷ Sumber:wawancara dengan kepala Dinas Pelayanan Koperasi Kota Semarang, 15- 01- 2001.

⁵⁸ Sumber wawancara dengan kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Semarang, 22-01- 2001

⁵⁹ Sumber:wawancara dengan kepala sekolah dan pembina koperasi pada SMK Negeri I, SMK Negeri V, SMU Negeri IV, 20 sampai dengan 25 Januari 2001.

⁶⁰ Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah kepada Bupati/Walikota/Tamadya Tingkat II, Nomor: 518/9138, tanggal 1 Juni 1998, h.1.

1. Membentuk koperasi pada setiap tingkat pendidikan di Jawa Tengah (TK/Rodhotul Adfal (RA)/Bustanul Adfal (BA)/Tarbiyatul Adfal (TA), SD/Madrasah Ibtida'iyah (MI), SMP/Madrasah Tsanawiyah (MTs), SMU/Madrasah Aliyah (MA), SMK).

⁶¹ Lihat lampiran tentang Daftar Jumlah Koperasi di kota Semarang.

Jumlah koperasi sekolah saja belum merupakan temuan yang berarti sebelum mengetahui status hukumnya, temuannya adalah sebagai berikut:

Jumlah responden 100

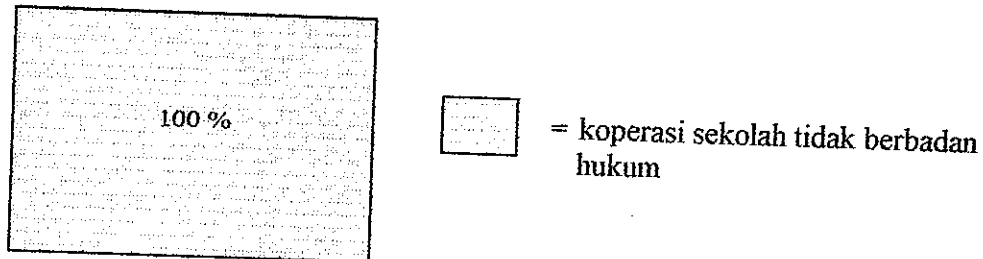


Diagram 3: Kedudukan koperasi sekolah.

Respon yang diberikan atas pertanyaan mengenai status hukum koperasi-koperasi sekolah adalah kurang memuaskan berhubung tidak ada satupun dari koperasi sekolah yang ada di kota Semarang ini yang berbadan hukum. Pembina koperasi selanjutnya menerangkan bahwa koperasi sekolah tidak memenuhi syarat untuk berbadan hukum karena anggotanya belum dewasa atau belum cakap hukum.⁶² Temuan ini dibenarkan oleh Undang-undang No 25/tahun 1992 tentang Pokok-pokok Perkoperasi Bab V pasal 18 ayat 1 yang mengatakan bahwa yang dapat menjadi anggota koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu untuk melakukan tindakan hukum atau koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dalam anggaran dasar.⁶³ Cakap hukum menurut Kitab Undang-un-

⁶² Wawancara dengan pembina koperasi dari Dinas Pelayann Kopearsi Kota Semarang, tanggal 15 Januari 2001.

⁶³ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Arkola Surabaya, 1992, h. 7.

dang Hukum Perdata Bab kelimabelas bagian kesatu pasal 330 adalah yang sudah dewasa yaitu berumur genap 21 tahun.⁶⁴ Umur siswa sekolah lanjutan atas adalah berkisar antara 16 sampai 20 tahun, jadi mereka termasuk usia yang belum cakap hukum.

Seluruh responden menjawab bahwa dari kelembagaannya, koperasi sekolah bersifat mendidik jiwa sosial dan demokrasi para anggotanya, temuan ini sudah sangat sesuai dengan tujuan mata pelajaran 'Kewirausahaan' yang tercantum dalam kurikulum sekolah yaitu memupuk jiwa gotong-royong (sosial) dan melatih siswa berani menjadi wirausaha kelak ketika mereka lulus.⁶⁵

Berikut ini adalah temuan dan pembahasan mengenai kemampuan koperasi-koperasi sekolah dalam usahanya memenuhi kebutuhan anggota-anggotanya.

Jumlah responden 100

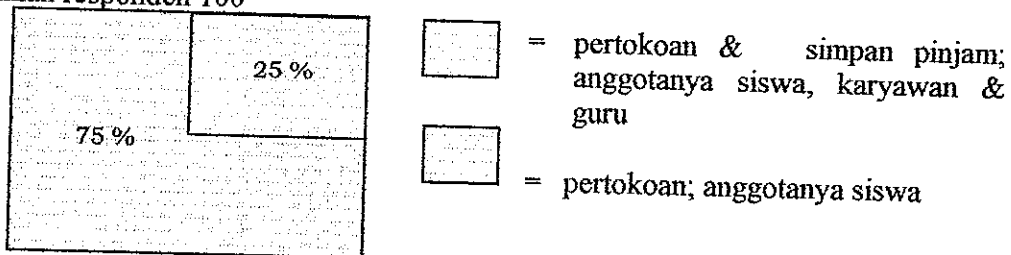


Diagram 4: Usaha & anggota koperasi sekolah

75%responden menjawab kalau usaha koperasi sekolah pada dasarnya, dalam memenuhi kebutuhan anggotanya adalah berbentuk pertokoan, sedangkan yang 25 % menjawab kalau usahanya adalah pertokoan dan simpan pinjam (uang). 75 %

⁶⁴Burgerlijk Wetboek, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita diterjemahkan oleh: R. Subekti, et.al., Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, h. 78.

⁶⁵Lihat Kurikulum SMK Program Adaptif, Depdikbud, 1999, h.5.

responden yang bentuk usaha koperasinya berupa pertokoan adalah yang anggota koperasinya melulu siswa, sedangkan 25% yang menjawab kalau anggota koperasi sekolahnya adalah siswa, guru dan karyawan. Jadi, koperasi sekolah yang anggotanya bukan hanya siswalah yang memiliki usaha simpan pinjam.⁶⁶ Setelah ditanyakan lebih lanjut ternyata hanya guru dan karyawan saja yang dapat merasakan manfaat usaha simpan pinjam sedangkan para siswa tidak diper-bolehkan meminjam uang, karena simpan pinjam itu adalah usaha para guru dan karyawan. Bila siswa diperbolehkan meminjam diperkirakan koperasi akan menemui masalah dalam pengembalian pinjaman, berhubung keuangan siswa pada umumnya masih tergantung kepada orang tuanya. Sebetulnya perkiraan masalah tadi dapat diatasi dengan kerjasama yang baik antara orang tua siswa dan koperasi sekolah anaknya. Dengan kata koperasi begitu sekolah belum mampu mencukupi kebutuhan para anggotanya secara maksimal, kebutuhan-kebutuhan yang berkait dengan risiko yang belum pasti (seperti simpan-pinjam uang) belum dapat dipenuhi.

Implikasi temuan ini adalah bahwa keberanian pengurus koperasi sekolah cenderung rendah. Hal ini dapat menjadi salah satu sebab mengapa koperasi sekolah kurang berkembang.

⁶⁶ Wawancara dengan pembina koperasi dari Dinas Pelayang Koperasi Kota Semarang, tanggal 15 Januari 2001.

Jumlah responden 100

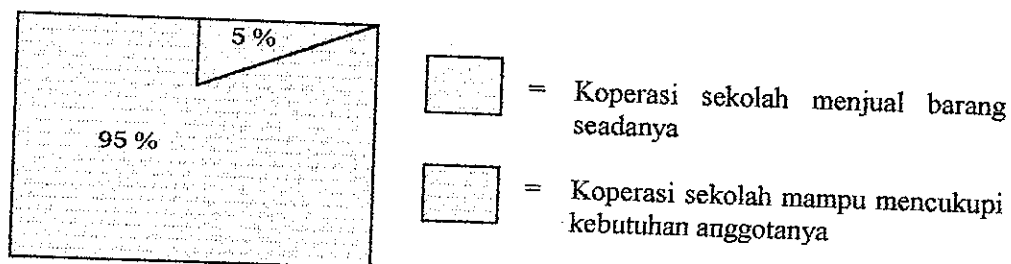


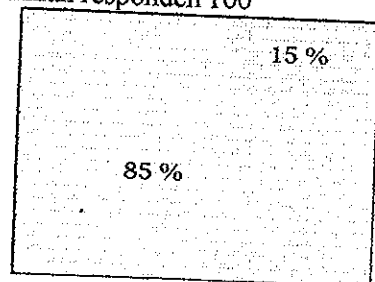
Diagram 5: Kemampuan koperasi sekolah dalam mencukupi kebutuhan anggota.


Kebutuhan-kebutuhan siswa yang sifatnya rutin (LKS, kertas, pensil, karet penghapus, amplop, dll) sudah terpenuhi, setidaknya seperti itulah yang diungkapkan 95% responden. Dibeberapa koperasi sekolah bahan-bahan praktek yang sederhana (kain untuk membuat celemek, kain perca, tinta untuk sablon, dll) dibeli siswa dikoperasi. Sebanyak 5 % pembina koperasi sekolah menulis kalau koperasi sekolah, berdasarkan pengamatan mereka, hanya menjual barang-barang apa adanya. Berdasarkan kenyataan-kenyataan diatas dapat diinterpretasikan bahwa koperasi sekolah cenderung belum mampu melayani kebutuhan anggotanya secara maksimal, salah satu sebabnya adalah pengurus-pengurusnya kurang tangguh dalam usaha meningkatkan mutu koperasinya.

Secara intensif para pembina belum pernah mengadakan penilaian akan kemampuan koperasi sekolah dalam meningkatkan hasil belajar siswa, tetapi dalam kegiatan penilaian tahunan kinerja sekolah yang dilaksanakan oleh pihak Departemen dan yang biasa disebut ME ('Management Evaluation') pengelolaan koperasi sekolah termasuk bagian dari kegiatan penilaian (ME) tersebut⁶⁷

⁶⁷ Wawancara dengan pembina dari Dinas Pendidikan Nasional Kota Semarang, tanggal 22 Januari 2001.

Jumlah responden 100



 = Mengatakan bahwa nilai pelajaran prakteknya meningkat setelah membeli barang di koperasi


 = Mengatakan bahwa nilai pelajarannya biasa-biasa saja setelah membeli barang dikoperasi

Diagram 6: Pembelian barang dikoperasi sekolah dan peningkatan nilai.

Dari hasil ME didapat fakta bahwa sebagian besar pembina koperasi sekolah (85%) menyatakan kalau nilai beberapa mata pelajaran para siswa meningkat setelah membeli barang-barang di koperasi, misalnya di SMU setelah siswa membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) yang isinya adalah latihan-latihan untuk berbagai mata pelajaran, nilai mata pelajaran Bahasa Inggris, Matematika, IPS dan IPA menjadi lebih tinggi. Bagi siswa SMK, setelah mereka membeli alat pengering rambut, pengocok telur listrik, meja gambar dari koperasi sekolahnya nilai praktek kejuruannya menjadi meningkat. Mereka menambahkan bahwa alat-alat tersebut dapat dipakai untuk latihan di rumah, sehingga ketrampilan menggunakan alat-alat tersebut menjadi baik dan nilai praktek ketrampilan kejuruannya menjadi baik. 15% responden yang lain mengatakan bahwa nilai rapornya, menurut pengamatan mereka lewat wawancara dengan siswa, biasa-biasa saja (tidak meningkat) setelah mereka membeli barang dikoperasinya yang berhubungan dengan pelajaran yang diterimanya (membeli bahan untuk praktek, buku tulis, dll). Sebagai penjelasan untuk kelompok yang yang kedua (15%), para

pembina tadi menerangkan bahwa koperasi sekolah yang dibinanya sangat sederhana, jadi belum mampu menyediakan barang-barang yang berharga mahal bahkan LKS-pun penjualannya tidak ditangani koperasi sekolah, tetapi dilaksanakan guru-guru mata pelajaran yang bersangkutan berhubung modal koperasinya sangat terbatas.⁶⁸ Temuan ini menggambarkan bahwa sebetulnya koperasi sekolah mampu meningkatkan kualitas anggotanya meskipun relatif belum sempurna. Namun kita menyadari bahwa membeli barang dikoperasi tidak 100% faktor penyebab meningkatnya nilai suatu pelajaran (baik praktek atau teori) tetapi paling tidak hal ini merupakan salah satu faktor dari faktor-faktor lain yang dapat meningkatkan nilai responden.

Kekurang optimalan koperasi sekolah dalam memenuhi kebutuhan anggotanya adalah kenyataan bahwa koperasi sekolah cenderung belum dapat bekerjasama dengan baik dengan komponen lain (dalam sekolah) lebih-lebih dengan instansi diluar sekolah. Padahal dengan kerjasama inilah sebetulnya banyak yang dapat dilakukan koperasi sekolah dalam usaha memenuhi kebutuhan anggotanya. Misalnya dengan bekerjasama dengan percetakan maka kebutuhan LKS dan buku-mata pelajaran yang lain akan dapat diperoleh dengan harga yang relatif murah berhubung koperasi membeli pada produsen langsung. Contoh lain misalnya alat-alat tulis, kertas, peralatan belajar yang lain, apabila pengurus koperasi dapat mengadakan pendekatan langsung dengan grosir maka modal kope

⁶⁸ Sumber: wawancara dengan pembina koperasi SMK Negeri XI, 22 Juni 2001.

rasi sekolah yang kurang memadai tidak menjadi masalah, karena grosir-grosir akan dengan sukarela 'menitipkan' barang-barang tersebut untuk dijual dan pembayarannya dapat dilakukan setelah barang-barang tersebut laku. Gambaran kemampuan koperasi sekolah ini akan menjadi lebih jelas dalam pembahasan tentang kemampuan koperasi sekolah yang didapat dari anggota dan pengurus koperasi.

3. Proses Penggabungan Koperasi Sekolah dalam rangka Meningkatkan Eksistensinya.

Sebagai pembina koperasi sekolah seluruh responden menyatakan bahwa mereka tidak henti-hentinya mendorong dan memotivasi pengurus koperasi sekolah untuk memajukan koperasinya. Hal ini dilakukan pembina pada setiap kesempatan ketika mereka bertugas.⁶⁹

Pemikiran yang mengarah pada penyatuan koperasi sekolah menjadi Koperasi Pelajar Kota Semarang pernah muncul dua kali sepanjang kehidupan koperasi sekolah. Yang pertama diprakasai oleh seorang pengawas SMK yang kebetulan pernah diberi tugas sebagai pembina koperasi SMK, sehingga pemikiran penggabungan ini ditujukan pada penggabungan koperasi sekolah kejuruan saja.⁷⁰ Sedangkan yang kedua dilontarkan oleh Dinas Pelayanan Koperasi Kota Sema-

⁶⁹ Wawancara, op.cit., tanggal 15 Januari 2001.

⁷⁰ Sumber: wawancara dengan Sularno BA, pembina koperasi SMK, 5-2-2001.

rang pada tahun 1998 dalam rapat koordinasi rutin pembinaan koperasi sekolah sekota Semarang.⁷¹ Tetapi dua ide tadi kandas dan tidak pernah terlaksana sampai sekarang. Ketika ide penyatuan ini dilontarkan (lewat kuesioner) lagi kepada para pembina maka responnya sangatlah positif, sebagai berikut:

Jumlah responden 100

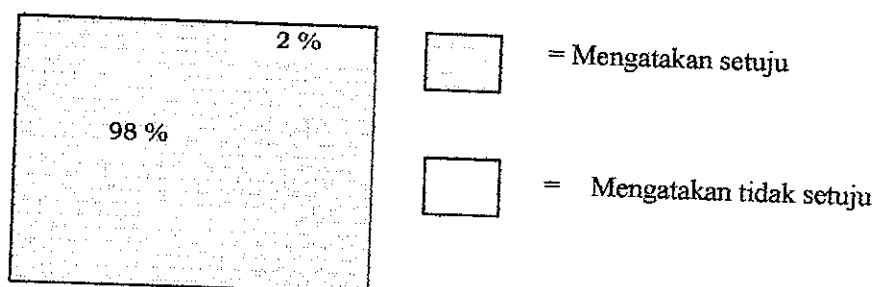


Diagram 7: Respon pada gagasan penggabungan koperasi sekolah

98% pembina koperasi menyatakan bahwa mereka sangat menyetujui penyatuan koperasi sekolah menjadi Gabungan Koperasi Sekolah Kota Semarang, hanya 2% dari mereka kurang setuju berhubung kelompok ini pernah mengalami kegagalan dimasa lalu ketika usaha penyatuan koperasi sekolah tidak mendapat respon yang baik. Kelompok pertama yang mendukung berdirinya Gabungan Koperasi Sekolah berpendapat bahwa adanya koperasi yang kuat di era krisis ini sangat diharapkan dapat mensejahterakan anggota-anggotanya.

Tata cara penyatuan, menurut para pembina adalah dengan didahului rapat persiapan dengan beberapa pengurus dan anggota koperasi sekolah. Alasannya

⁷¹ Wawancara, *op.cit.*, tanggal 15-1-2001.

adalah supaya kegiatan-kegiatan dalam usaha penyatuan ini mendapat dukungan berhubung mereka sudah dilibatkan sejak awal. Menurut mereka gagalnya penyatuan yang lalu adalah disebabkan warga koperasi sekolah tidak dilibatkan dari awal, jadi seolah-olah penyatuan ini merupakan hanya instruksi dari atas. Sedangkan kepengurusannya menurut para pembina adalah dengan melibatkan seluruh koperasi sekolah yang akan bergabung, jadi paling tidak ada seorang wakil dari koperasi yang bergabung tadi yang duduk sebagai pengurus Gabungan Koperasi tadi. Dengan adanya perwakilan dalam gabungan koperasi sekolah maka terjalin hubungan yang harmonis antara gabungan dengan anggotanya dan hubungan yang harmonis ini akan menimbulkan rasa memiliki koperasi gabungan tadi menjadi lebih tebal. Dua hal ini akan sangat membantu terwujudnya koperasi gabungan yang dinamis.

Respon terhadap status hukum Gabungan Koperasi Sekolah adalah sebagai berikut:

Jumlah responden 98 (2 dari 100 responden tidak setuju penggabungan koperasi) :

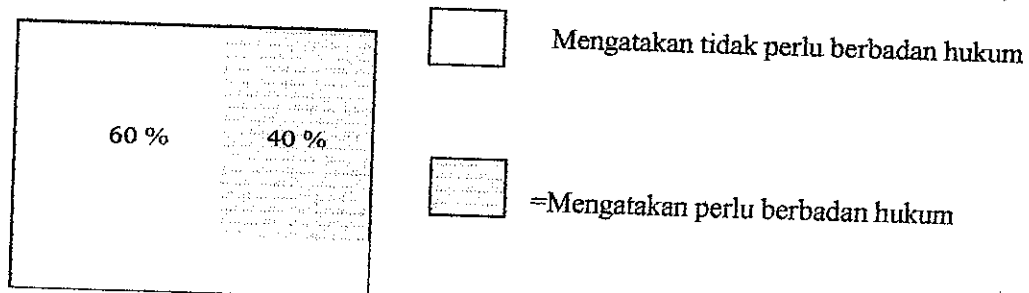


Diagram 8: Status koperasi gabungan

60% responden berpendapat kalau gabungan koperasi tersebut tidak perlu berbadan hukum, 40% sisanya cenderung menyarankan gabungan koperasi ter-

sebut agar berbadan hukum. Alasan kelompok yang pertama sehingga mereka tidak setuju adalah karena biasanya koperasi berbadan hukum diwajibkan untuk membayar berbagai pajak sehingga pendapatannya berkurang, selain itu setiap kegiatan perlu mendapat pengesahan, misalnya harus mendapat pengesahan dari notaris, dan setiap kegiatan yang melibatkan pihak ketiga harus memenuhi banyak persyaratan yuridis. Sedangkan kelompok kedua berpikir secara positif yaitu dengan berbadan hukum gabungan koperasi tadi akan dapat mencari bantuan yang lebih luas seperti dalam permodalan, pembinaan, peningkatan mutu kinerja, dll. Harapannya dengan bantuan tadi kualitas koperasi dalam memenuhi kebutuhan anggota-anggotanya dapat meningkat dan jangkauannya lebih luas. Selain itu gabungan koperasi sekolah diharapkan akan menimbulkan semangat gotong royong yang merupakan 'ruh' koperasi menjadi semakin besar, dan koperasi-koperasi sekolah akan saling membantu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Melalui penggabungan ini diharapkan eksistensi koperasi sekolah akan semakin kuat, dan terjadi pengumpulan modal. Kontribusi masing-masing koperasi sekolah tentu saja berbeda, koperasi sekolah yang sudah maju tentu lebih besar dari pada yang baru tumbuh, disini diharapkan akan terjalin kerja sama dan saling membantu antar koperasi-koperasi sekolah tersebut.

Barangkali peningkatan eksistensi koperasi sekolah ini merupakan alternatif yang paling tepat dilaksanakan guna menanggulangi krisis ekonomi yang tak kunjung berakhir, demikian juga dunia pendidikan yang kelihatannya tidak kunjung cerah.

Lebih lanjut para pembina mengatakan bahwa dengan bergabung diharapkan akan timbul rasa kesatuan antar siswa sekolah yang satu dengan yang lain. Mungkin dengan begitu tawuran antar pelajar yang akhir-akhir ini sedang marak-maraknya dapat dikurangi atau bahkan dlenyapkan. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan beberapa siswa dari sekolah-sekolah yang sering tawur yang menyatakan bahwa mereka cenderung merasa iri akan fasilitas pendidikan disekolahnya yang mereka rasa kurang memenuhi harapan.

Secara singkatnya temuan terhadap penggabungan yang didapat dari para pembina koperasi sekolah adalah bahwa mereka berharap Gabungan Koperasi Sekolah Lanjutan Atas (SMU dan SMK) segera terwujud.

B. Hasil Penelitian yang Berasal dari Warga dan Pengurus Koperasi Sekolah dan Pembahasannya.

Meskipun temuan-temuan didapatkan dari 2 sumber yaitu anggota koperasi sekolah dan pengurusnya tetapi pembahasannya akan disampaikan secara menyatu.

1. Pelaksanaan Undang-Undang Koperasi pada koperasii SMU dan SMK di kota Semarang.

Hasil penelitian dalam mengkaji pelaksanaan undang-undang koperasi adalah meliputi: pengurus koperasi, pengawas koperasi, manajer toko dan rapat anggoa tahunan, keanggotaan, modal, AD/ART, dan gotong royong, sebagai berikut:

a/ Pengurus koperasi:

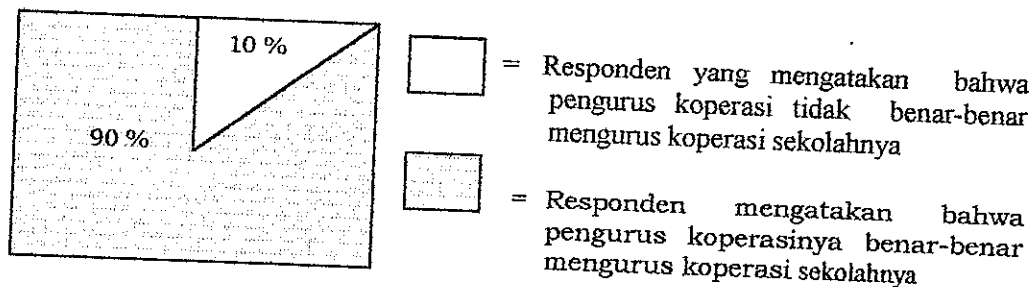


Diagram 9: Kerja pengurus koperasi

90% dari 100 responden mengaku kalau pengurus koperasinya benar-benar menjalankan tugasnya dengan penuh loyalitas, bahkan kadang-kadang keterlaluannya sehingga banyak waktu belajarnya berkurang, tetapi untungnya mayoritas pengurus koperasi termasuk siswa-siswa yang pandai, jadi pengaruh kehilangan waktu belajar tidak begitu berarti. 10% yang lain mengatakan kalau pengurus koperasinya acuh tak acuh. 8 dari 10 responden kelompok yang menulis ini adalah siswa SMU, sedang 2 lainnya dari SMK. Sayangnya mereka tidak menulis mengapa pengurus mereka berperilaku seperti itu.

Meskipun mayoritas responden (90%) menyatakan bahwa kerja pengurus sudah baik, temuan diatas belum dapat menjamin kecenderungan pengurus melaksanakan tugasnya dengan baik, berhubung dalam wawancara dengan beberapa pengurus⁷² ditemukan bahwa rapat pengurus sangat jarang diadakan, paling-paling setahun sekali ketika akan menerima anggota baru yaitu yaitu siswa-siswa baru. 4 dari 6 pengurus yang diwawancara adalah dari koperasi SMU. Lebih lanjut dalam

⁷² Wawancara dengan pengurus koperasi SMU N I, SMU N IX, SMU N XII, SMU N Mijen, SMK N XI, SMK N VII, dan SMKK N pada tanggal 23 sampai dengan 25 Januari 2001

wawancara tersebut pengurus menjelaskan kalau sebagian besar tanggung jawabnya, seperti: membuat laporan tahunan, mengajukan rancangan rencana kerja dan rencana anggaran koperasinya, membuat laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dikerjakan oleh guru pendamping, pengurus (siswa) hanya membantu. Salah satu wewenang pengurus yang belum dapat dilaksanakan, menunjuk pada Undang-undang Koperasi No25/th 1992 pasal 30, adalah memutuskan penerimaan dan penolakan menjadi anggota baru serta pemberhentian anggota. Hal ini wajar-wajar saja berhubung keanggotaan koperasi sekolah adalah wajib tidak sukarela.

b/ Pengawas koperasi:

100% responden menyatakan bahwa pengawas koperasinya benar-benar melaksanakan tugasnya. Pada umumnya pengawas koperasi sekolah dijabat oleh guru, untuk

Jumlah responden 100

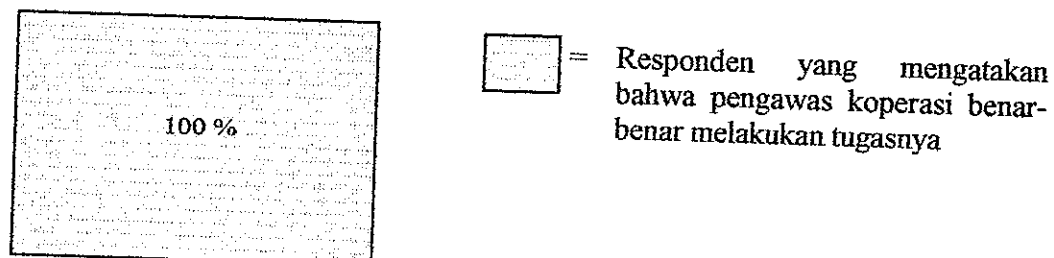


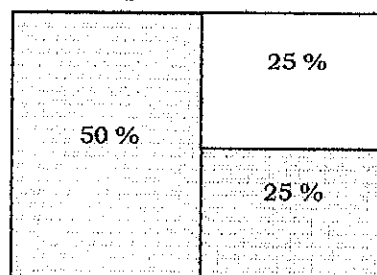
Diagram 10: Tugas Pengawas Koperasi Sekolah

koperasi SMU yang menjabat pengawas biasanya adalah guru mata pelajaran Ekonomi sedangkan koperasi SMK pengawasnya dijabat oleh guru mata pelajaran Pengelolaan Usaha. Berhubung pejabatnya adalah guru dan responden adalah

siswanya,⁷³ mungkin inilah yang menyebabkan mereka menjawab begitu.

c/ Manajer toko:

Jumlah responden 100






-  = Responden yang mengatakan manajer koperasi sekolahnya dijabat oleh pegawai yang dibayar oleh koperasi
-  = Responden yang tidak tahu-menahu
-  = Responden yang mengatakan manajer koperasi sekolahnya dijabat oleh siswa

Diagram 11: Manajer toko

Sebesar 50% responden menyatakan bahwa manajer toko koperasi sekolah dijabat oleh siswa, sedangkan yang lain (25%) sudah mempercayakan kepada pegawai koperasi yang dibayar oleh koperasi untuk selalu menjaga dan melayani anggota koperasi, sisanya (25%) tidak memberi jawaban berhubung tidak tahu yang disebut manajer toko. Kelompok kedua inilah yang cenderung sudah memiliki profesionalisme berkoperasi, dan dari keprofesinalan mereka itulah terjadi perkembangan koperasi sekolah yang lebih baik dari koperasi sekolah yang lain. 45 reponden dari kelompok pertama, yang berarti mayoritas dari responden secara keseluruhan, adalah berasal dari SMK. Tidak mengherankan ketika dikroscek dengan pertanyaan yang lain ditemukan bahwa praktek berwirausaha memang menjadi bagian salah satu mata pengajaran di SMK yaitu mata pelajaran 'Pengelolaan Usaha'. Di sini guru hanya berfungsi sebagai pendamping saja.

⁷³ Pengamatan, *op. cit.*, tanggal 3-11 Juni 2001 dan 12-22 Juni 2001.

25% responden yang menyatakan tidak tahu ketika ditanya mengenai perangkat koperasinya pada bagian keanggotaan adalah mereka yang toko koperasinya dimanajeri oleh guru yang bertugas membimbing kegiatan perkoperasian sekolahnya. Implikasi temuan diatas adalah bahwa implementasi SK Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi No 638/SKPTS/MEN/1974⁷⁴ yang mengatur mengenai koperasi sekolah telah dilaksanakan yaitu menguraikan adanya pengaitan koperasi dengan program pendidikan dan proses belajar mengajar dimana siswa dibimbing guru untuk menjadi manajer koperasinya, mengelola usahanya demi lebih memenuhi kebutuhan para anggotanya. Terlihat bahwa pendidik (guru) telah berusaha mendidik siswanya dalam rangka menumbuhkan dan kemudian mengembangkan jiwa gotong-royong, bantu membantu dan jiwa berwirausaha. Pada saat-saat masih muda inilah jiwa wirausaha, perilaku ekonomi, akan mudah ditanamkan karena dari merekalah pemerintah mengharapkan koperasi dapat membudaya didalam kehidupan masyarakat. Jiwa berkoperasi akan dibawa para siswa kelak bila sudah lulus. Baik para lulusan yang menjadi mahasiswa atau yang menjadi wirausahawan jiwa berkoperasi ini akan menjadi bekal dalam perilaku ekonominya.

⁷⁴ Isi (antara lain): Bahwa dalam rangka program pendidikan sekolah, maka pelajaran perkoperasian dan praktek berkoperasi dalam sekolah merupakan suatu kebutuhan guna melengkapi dan mendorong murid/siswa mengembangkan program-program kesejahteraan dan hidup saling bantu-mebantu (bergotong-royong), baik dalam lingkungan sekolah maupun luar dan sesudah sekolah.

Dalam pengamatan⁷⁵ terlihat pembauran nilai pengertian antara manajer koperasi dengan pengurusnya, hal ini masih dibenarkan karena bentuk organisasinya kecil (seperti koperasi sekolah). Pengurus dalam melaksanakan tugas koperasinya langsung bertindak sebagai pimpinan.

Temuan yang menarik yang berhubungan dengan hal ini adalah perbedaan yang ada dikoperasi Sekolah Menengah Umum (SMU) dan dikoperasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), 80 % manajer toko pada koperasi SMU dijabat oleh guru yang ditunjuk sedangkan di SMK penanggung jawab toko sudah semuanya (100%) dijabat oleh siswa yang didampingi pembinanya. Hal ini bisa terjadi mungkin disebabkan karena di SMK, seperti yang dijelaskan diatas, mempunyai pelajaran 'Pengelolaan Usaha' dan koperasi inilah yang merupakan praktek mata pelajaran tersebut secara nyata. Di SMU pun sebenarnya ada mata pelajaran koperasi, tetapi pelibatan siswa dalam jabatan manajer toko cenderung tidak pernah terpikirkan⁷⁶

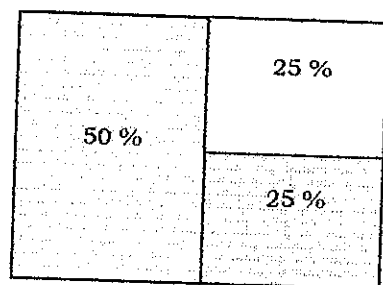
d/ Rapat anggota tahunan:

Rapat anggota adalah perangkat yang menjadi 'trade mark' terlaksananya demokrasi dalam koperasi, dan kenyataannya adalah (lihat diagram 12): 25% responden menyatakan rapat anggota tahunan dijalankan dengan baik artinya semua anggota koperasi sekolah dihadirkan dalam rapat, dan suara mereka diper-

⁷⁵ Pengamatan, *op. cit.*, tanggal 3-11 Juni 2001 dan 12-22 Juni 2001.

⁷⁶ Pengamatan, *op. cit.*, tanggal 3-11 Juni 2001 dan 12-22 Juni 2001.

Jumlah responden 100






-  = Responden yang mengatakan rapat tahunan koperasi sekolahnya dilaksanakan dengan baik
-  = Responden yang mengatakan tidak pernah diajak rapat tahunan
-  = Responden yang mengatakan rapat tahunan koperasi sekolahnya dilaksanakan dengan kurang sempurna

Diagram 12: Rapat Anggota Tahunan

hitungkan dalam rapat. 50% responden menyatakan rapat anggota dilaksanakan tetapi kurang sempurna berhubung hanya anggota baru yang diundang dalam rapat tahunan yaitu ketika mereka baru diterima disekolah yang bersangkutan dan diresmikan menjadi anggota koperasi sekolah, sedangkan siswa kelas dua dan tiga hanya diwakili oleh beberapa siswa saja, yang seringkali terjadi adalah hanya diwakili pengurusnya saja. 25% responden sisanya menyatakan belum pernah diajak dalam rapat

anggota tahunan. Jadi rapat anggota tahunan (RAT) koperasi sekolah hanya melalui wakil-wakil dari setiap kelas yang ada pada sekolah yang bersangkutan.

Di sini terlihat kurang terlaksananya demokrasi dikoperasi-koperasi sekolah, tersirat kalau pelajaran koperasi baru dalam taraf diketahui oleh siswa belum meresap dalam jiwa mereka sehingga meskipun tidak diundang dalam rapat anggota yang merupakan haknya mereka tidak menuntut.

Bila RAT dikoperasi-koperasi sekolah dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Koperasi No25/th 1992 pasal 23 yang berbunyi

nyi:

RAT menetapkan:

1. anggaran dasar
2. kebijaksanaan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi
3. pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan pengawas
4. rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan
5. pengesahan pertanggung jawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya
6. pembagian sisa hasil usaha
7. penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi.

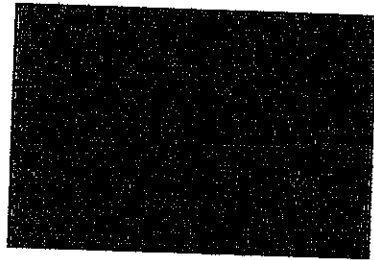
maka terlihat bahwa 2 yang terakhir dari ketujuh wewenang RAT yang belum terlaksana, yaitu pembagian sisa hasil usaha dan penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi. Yang terjadi dilapangan, pada setiap RAT kepala sekolah selaku pembina koperasi sekolah selalu menghimbau anggota koperasi yang hadir untuk tidak mengambil sisa hasil usahanya dengan menjelaskan karena jumlahnya terlalu kecil, anehnya tidak seorang anggotapun menuntut sisa hasil usaha koperasinya. Hal ini menyiratkan, meskipun ketentuan koperasi tidak terlaksana tetapi tetap didahului dengan kesepakatan anggota, berarti azas demokrasi terlaksana.

e/. Keanggotaan.

Masalah keanggotaan merupakan hal yang paling pokok karena anggota merupakan fondasi dasar keberadaan koperasi dalam melakukan kegiatannya. Dan hasil-

nya adalah sebagai berikut: 100% responden menyatakan kalau keanggotaannya tidak sukarela, artinya mereka diwajibkan menjadi anggota ketika diterima sebagai siswa sekolah yang bersangkutan. Kesan temuan ini adalah bahwa siswa diharus-

Jumlah responden 100



= Untuk Responden yang mengatakan keanggotaan pada koperasi sekolahnya tidak sukarela

Diagram 13:Sukarela

kan menjadi anggota koperasi, anehnya tidak ada satu respondenpun yang keberatan untuk menjadi anggota koperasi sekolah. Hal ini sangatlah bertentangan dengan Undang-undang No 25/1992 tentang Perkoperasian, bagian kedua, prinsip koperasi pasal 5 yang antara lain mengatakan bahwa keanggotaan koperasi adalah sukarela. Hal ini apabila dikaji mensyaratkan dengan jelas bahwa keanggotaan koperasi adalah sukarela. Berdasarkan pengalaman, begitu yang dijelaskan responden yang berstatus pengurus koperasi, apabila siswa diberi kebebasan untuk menjadi anggota koperasi maka dapat dipastikan beberapa siswa tidak mau menjadi anggota pada awal tahun ajaran, tetapi setelah mereka perlu membeli barang (seperti Lembar Kerja Siswa, membutuhkan Rapido yang dapat diangsur cara pembeliannya bila membeli dikoperasi sekolah) maka mereka baru mendaftar sebagai anggota koperasi.⁷⁷ Pada awal-awal keanggotaan inilah yang biasanya menjadi repot, sementara barang yang dibutuhkan sudah harus dipakai, yang bersangkutan belum menjadi

⁷⁷ Wawancara, dengan anggota koperasi SMU Neg Mijen, SMK N XI, SMK N VII tanggal 3 sampai 11 Juni 2001.

anggota yang artinya pembelian secara mengangsur belum diperbolehkan, padahal aturan koperasi sekolah mewajibkan siapapun yang membeli dikoperasi sekolah secara mengangsur harus menjadi anggota. Selanjutnya apabila anggota koperasi sekolah bebas keluar masuk secara sukarela dapat dibayangkan betapa pusingnya para pengurusnya melayani anggota yang keluar masuk dalam kurun waktu yang paling lama 5 tahun. Lama waktu yang 5 tahun ini diperoleh dari 3 tahun sekolah ditambah kemungkinan tidak naik 2 kali berarti ditambah 2 tahun, siswa tidak dimungkinkan mengulang 2 tahun berturut-turut. Karena alasan-alasan inilah maka keanggotaan koperasi sekolah menjadi wajib.

Masih mengenai keanggotaan koperasi adalah mengenai setuju tidaknya siswa diwajibkan menjadi anggota koperasi. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Jumlah responden 100

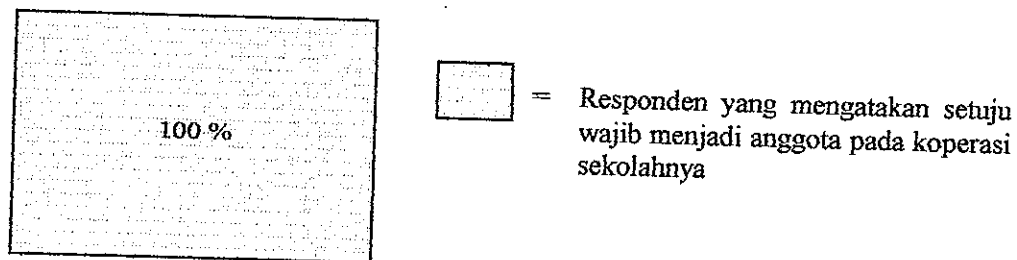


Diagram 14: Wajib menjadi anggota

Semua responden (100%) setuju ketika mereka diwajibkan menjadi anggota koperasi. Disini dapat disimpulkan bahwa meskipun kewajiban menjadi anggota koperasi adalah bertentangan Undang-undang No 25/1992 tentang Perkoperasian

pasal 5 ayat(1)a⁷⁸ tidak menjadikan masalah bagi para siswa, mungkin mereka sadar bahwa bantuan koperasi ketika mereka membutuhkan adalah sangat bermanfaat bagi kepentingan belajar khususnya dan peningkatan kualitas pendidikan pada umumnya. Keanggotaan ini berakhir ketika siswa lulus atau telah menyelesaikan pendidikannya.

f/. Modal.

Fokus berikut adalah iuran yang harus dibayar seorang anggota koperasi sekolah sebagai modal awal koperasi sekolahnya. Iuran ini sebetulnya harus berdasarkan pada Undang-undang No:25/1992 tentang Perkoperasian Bab VII, pasal 41, yaitu terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan cadangan hibah.

Tetapi dalam pelaksanaannya belum ada satuoun koperasi sekolah yang pernah mendapatkan simpanan modal pinjaman dari para anggotanya, 100 % responden menyatakan bahwa simpanan yang mereka bayar untuk koperasinya adalah 2 (dua) macam simpanan saja, yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib. Modal pinjaman pada umumnya tidak pernah diterima oleh koperasi sekolah , tetapi ada 5 sekolah yang pernah menerima sumbangan sukarela, bukan modal pinjaman, yaitu yang diperoleh dari sumbangan dari orang tua murid ketika anaknya lulus dengan prestasi yang membanggakan, sebagai kenang-kenangan orang tuanya

⁷⁸ Bunyinya: keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.

menyumbang koperasi sekolah, yang lain misalnya sumbangan dari panitia kegiatan sekolah seperti pasar murah, bazar sekolah, bahkan kadangkala koperasi sekolah menerima dari seorang guru yang menerima 'rapelan gaji', seperti guru tersebut sangat peduli dengan koperasi sekolahnya yang memprihatinkan.⁷⁹ Seperti kita ketahui ada beberapa koperasi sekolah yang anggotanya siswa, guru dan karyawan.

Ada kejanggalan yang terlihat dalam kaitannya dengan 'Modal' koperasi, yaitu ketika anggota koperasi lulus yang berarti keanggotaannya berakhir. Pada saat itu mestinya mereka mendapatkan kembali simpanan modal yang sudah diberikan selama mereka menjadi anggota dari koperasinya, tetapi hal ini tidak terjadi. Ketika ditanyakan, sebagian besar pengurus menyatakan kalau modal tersebut oleh sekolah biasanya diminta untuk disumbangkan kepada koperasi untuk menambah jumlah modal yang dimiliki. Mungkin karena rasa senangnya (lulus ujian) mereka dengan sukarela menyetujui.

Dari uraian diatas nampaknya modal koperasi sekolah belum diusahakan penambahannya secara intensif, padahal tugas koperasi sekolah seperti koperasi pada umumnya tidaklah ringan, seperti: 1/ membina para anggota, termasuk melayani dan memenuhi kebutuhan anggotanya, bekerja sama/gotong-royong dan selalu berpijak pada semangat juang koperasi, 2/ melaksanakan usaha-usaha yang sah dalam rangka memenuhi kepentingan dan kebutuhan anggotanya dan anggota

⁷⁹ Wawancara, *op. cit.*, tanggal 15 dan 22 Januari 2001.

masyarakat pada umumnya, 3/ mengusahan harga barang jualannya lebih ringan dari harga diluar koperasi. Tugas-tugas tersebut sudah barang tentu membutuhkan modal yang tidak sedikit. Tambahan modal dari dalam (dari anggota, pengurus koperasi), dalam hal ini, cenderung lebih diupayakan, berhubung tambahan modal dari luar membutuhkan biaya modal (bunga) yang biasanya tidak sepadan dengan laba usaha koperasi mengingat harga barang yang dijual harus lebih murah dari harga diluar. Modal yang terbatas inilah yang cenderung kurang memungkinkan koperasi sekolah berkembang dengan baik.

g/ AD/ART

Berikut adalah hasil kajian tentang yang berhubungan dengan AD/ART koperasi sekolah.

Jumlah responden = 100

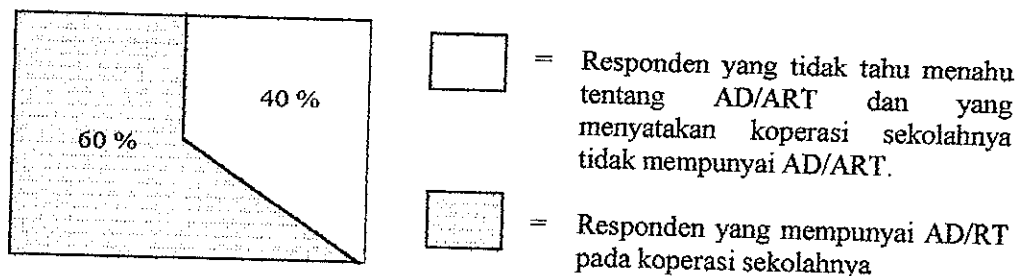


Diagram 15: Kepemilikan AD/ART

Sebanyak 60 dari 100 responden mengetahui kalau koperasi sekolahnya mempunyai AD/ART sedangkan 40 responden sisanya tidak mengetahui apakah koperasi sekolahnya mempunyai atau tidak mempunyai AD/ART. 10 dari 40 responden yang tidak mengetahui bahkan tidak tahu apa AD/ART itu sendiri, 30

responden sisanya mengatakan kalau koperasi sekolahnya ternyata beroperasi tanpa AD/ART, berjalan apa adanya, berbentuk seperti warung sekolah yang mempunyai seorang petugas tetap. Ada 2 buah sekolah yang memiliki warung sekolah yang seperti ini dan siswa menganggap itu sebagai koperasi sekolah.⁸⁰

Dari 60 responden yang koperasinya memiliki AD/ART menyatakan kalau AD/ART tersebut dijalankan dengan konsekuen, artinya dalam setiap tindakan, kebijakan yang diambil pasti mengacu pada AD/ART. Temuan yang lain yang berhubungan dengan hal ini adalah bahwa 60 responden bahkan memiliki AD/ART koperasi sekolahnya, lebih lanjut mereka menjelaskan bahwa setiap anggota koperasi sekolah memiliki (karena memang dibagikan) AD/ART yang tertulis dalam buku kecil.

Temuan bahwa mayoritas koperasi sekolah (60%) memiliki AD/ART dan melakukan kegiatan koperasinya berdasarkan AD/ART tersebut dapat diinterpretasikan bahwa koperasi sekolah yang ada di Semarang ini sebagian besar sudah mempunyai dasar hukum. AD/ART inilah yang mengatur tata kerja perangkat koperasi, mulai dari rapat anggota sampai keuangan koperasi sekolah. Hal ini juga menggambarkan bahwa Undang-undang No 25/th 1992 sudah dilaksanakan oleh banyak koperasi-koperasi sekolah, mungkin tanpa disadari, oleh sebagian besar pelaku koperasi sekolah di-Semarang. Undang-undang tersebut mengatur tata kerja perangkat koperasi secara rinci. Sudah barang tentu koperasi-koperasi yang baik

⁸⁰ Pengamatan, *op. cit.*, 3 sampai 11 Juni 2001.

tersebut telah mempunyai perangkat koperasi secara lengkap, bahkan berhubung anggota diberi buku AD/ART mereka dapat berkomentar, memberi usulan, bertanya dalam rapat anggota dengan mengacu pada pasal-pasal AD/ART yang ada ditangannya. Kondisi seperti ini memberikan gambaran bahwa koperasi-koperasi sekolah yang inilah nantinya yang berperan paling utama dalam usaha pembentukan 'Gabungan Koperasi Sekolah Kota Semarang'. Pengalaman-pengalaman berkoperasi baik yang positif maupun masalah-masalah yang dihadapi akan melengkapi kualitas mereka.

Berdasarkan temuan bahwa ada 2 sekolah yang koperasi sekolahnya tidak mempunyai AD/ART (lihat atas) berhubung masih berupa warung dan berjalan apa adanya ternyata bukan tanpa aturan, artinya tata kerja warung sekolah tadi juga mempunyai peraturan (demikian anggota koperasinya menyebutkan) yang dibuat berdasarkan rapat tetapi tidak terperinci sebagai AD/ART. Ini dapat diimplikasikan bahwa warung koperasipun mempunyai 'aturan' yang mengatur operasi atau kerjanya. Bahkan kemungkinan peraturan warung tersebut dapat menjadi embrio untuk lahirnya AD/ART dalam perkembangan lebih lanjut warung tersebut menjadi koperasi sekolah. Kesadaran berorganisasi sudah menyatu dalam diri pelaku-pelaku embrio koperasi sekolah ini.

Melihat kenyataan ini dapat dikatakan bahwa berkoperasi adalah wajib dalam proses belajar-mengajar, keberadaan koperasi ternyata sudah tidak merupakan hal yang baru bagi sekolah di kota Semarang.

h/ Gotong royong.

Gotong-royong yang menjadi prinsip koperasi adalah kajian terakhir dalam sub-bab ini.

Jumlah responden=100

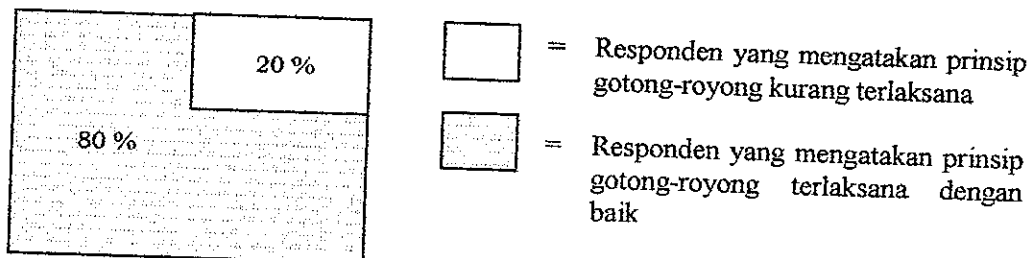


Diagram 16: Gotong royong

Pelaksanaan prinsip 'gotong-royong' dalam koperasi para responden tidaklah mengecewakan, karena 80% dari mereka menyatakan telah terlaksana dengan baik. Sedangkan contoh-contoh yang diberikan adalah: penagihan pembayaran angsuran yang terlambat tidak dilakukan secara otoriter, artinya negosiasi masih bisa dilakukan karena tujuannya adalah lunasnya tagihan bukan perpecahan., beberapa responden merasa terbantu ketika mendapat kesukaran membayar uang sekolah yaitu ketika koperasi memberi pinjaman uang dengan batas waktu 1 (satu) bulan pengembalian, ketika koperasi menerima bantuan dari anggota yang lulus tanpa diminta mereka dengan sukarela tidak mengambil simpanan wajibnya. Para lulusan tadi berharap tabungannya dapat menambah modal koperasi sekolahnya. Ada juga koperasi sekolah yang menerima tambahan modal dari para alumni yaitu ketika mereka mengadakan temu alumni disekolah mereka. Unit produksi (di SMK) juga bekerja bergotong royong dengan koperasi sekolah dalam pemasaran

hasil produknya sementara bila unit produksi mendadak memerlukan bahan dapat meminjam barang dikoperasi sekolah.⁸¹

20% responden yang lain menyatakan gotong-royong kurang terlaksana, contoh-contoh yang dikemukakan adalah: ketika pembayaran LKS mereka belum lunas penyerahannya masih ditunda, pada waktu mereka akan mengadakan kegiatan dan uang kegiatan belum keluar sukar untuk bagi anggota untuk sementara meminjam LKS dari koperasi.

2. Kemampuan koperasi sekolah dalam memenuhi kebutuhan anggotanya.

Hasil yang diperoleh dari anggota dan pengurus koperasi sekolah adalah sebagai berikut

Jumlah responden 100

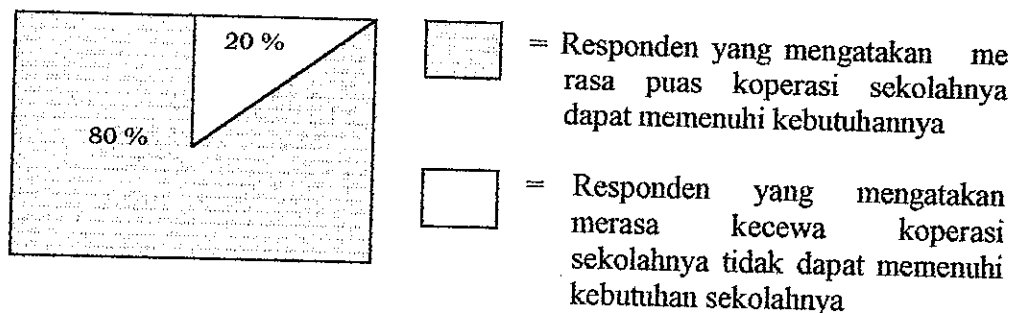


Diagram 17: Kemampuan koperasi dalam pemenuhan kebutuhan anggota belum dapat memenuhi kebutuhannya.

Sebesar 80% dari 100 responden mengaku kalau kebutuhan peralatan sekolahnya terpenuhi berhubung mereka menjadi anggota koperasi sekolahnya, sedangkan 20% yang lain masih merasa kecewa berhubung koperasi sekolahnya

⁸¹ Wawancara dengan anggota koperasi SMK Negeri XI, 23 Januari 2001.

belum dapat memenuhi kebutuhannya.

Kelompok pertama (80 dari 100) bukanlah jumlah yang sedikit, dari temuan ini terlihat bahwa koperasi sekolah cenderung telah berhasil membantu pemenuhan kebutuhan para anggota. Hal ini kiranya merupakan modal dasar koperasi yang terpenting yaitu anggotanya sadar dan mengakui eksistensi koperasi sekolah dan peningkatannya perlu dipikirkan untuk dapat memenuhi kebutuhan yang lebih luas.

Kelompok kedua (20 responden) yang merasa kecewa karena koperasi-nya belum dapat memenuhi kebutuhannya, setelah diteliti lagi memang wajar, berhubungan pendirian koperasi disekolah tersebut masih relatif baru, yaitu kurang dari 3 tahun. Kelihatannya pengurusnya (yang merupakan kunci sukses koperasi) kurang aktif sehingga hubungan dengan instansi atau badan usaha yang lain tidak dilakukan. Hal-hal tersebut juga dapat menjadikan kurang terpenuhinya kebutuhan anggota. Selain umur koperasi sekolah yang masih relatif muda, ternyata 15 dari 20 responden tadi adalah berasal dari SMU. Mereka sebagian besar mengatakan kalau koperasi sekolahnya hanya menjual alat-alat tulis yang terlalu sederhana dan makanan kecil, sedangkan kebutuhan mereka jauh lebih banyak. Mereka bahkan menginginkan dapat makan siang di koperasi sekolahnya dari pada harus diluar sekolah. Sayangnya ide-ide brilian mereka tidak pernah mereka kemukakan dalam rapat berhubungan pada rapat-rapat yang telah berlangsung mereka tidak diikutkan, menurut mereka tidak semua anggota boleh ikut rapat, hanya wakil-wakil mereka saja yang diperbolehkan, yaitu 3 orang setiap kelasnya.

Jumlah responden 80 (yang merasa bahwa koperasi sekolahnya sudah cukup dapat memenuhi kebutuhannya):

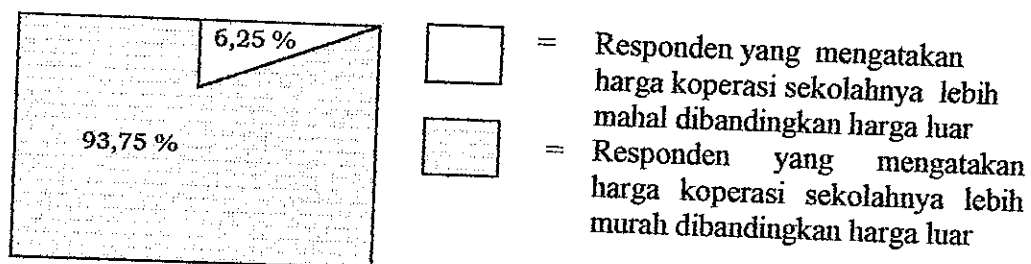


Diagram 18: Harga barang-barang dikoperasi sekolah

Dari 80 responden yang sudah merasa terpenuhi kebutuhannya ini ada 5 responden (6,25% dari 80 responden) yang menyatakan kalau harga-harga beberapa barang yang dijual koperasi lebih mahal dari harga di luar untuk barang yang sama, meskipun bedanya relatif kecil. Anehnya mereka masih tetap memilih membeli dikoperasinya berhubung sekolah mereka jauh dari toko yang menjual barang tersebut (kurang lebih 5 kilometer), seringkali transportasi yang menjadi penyebab barang yang dijual di koperasi sekolah menjadi relatif mahal.

Berbicara mengenai manfaat koperasi sekolah, maka yang paling merasakan manfaatnya dalam pemenuhan kebutuhan sekolah adalah siswa SMK, berhubung mereka mayoritas berasal dari keluarga yang berekonomi lemah kebawah sedangkan kebutuhan siswa SMK jauh lebih banyak dari siswa SMU. Hampir tidak mungkin bagi mereka dapat memiliki rapido, alat pengocok telur listrik, pengering rambut listrik, meja gambar tanpa bantuan koperasi sekolahnya. Karena membeli di koperasi sekolah berarti mengangsur dengan bunga yang sangat kecil, lain apabila mereka membeli di luar yang meskipun dapat diangsur bunganya

cenderung besar. Kebutuhan yang banyak inilah seperti yang memacu para pengurus koperasi SMK menjadi gesit mencari instansi, badan, atau apa saja untuk diajak bekerja sama sehingga dalam pemenuhan kebutuhan anggotanya tidak diperlukan tambahan modal.

Selain kenyataan bahwa siswa SMU kurang puas dalam merasakan manfa'at koperasi sekolahnya, masih ada sebuah SMU yang anggotanya benar-benar merasa koperasinya sangat bermanfaat dalam memenuhi kebutuhannya yaitu SMU yang berlokasi sangat terpencil, jauh dari pasar atau toko-toko. Pada SMU ini siswa dapat memesan kebutuhan mereka lewat koperasi, sehingga dalam lomba koperasi sekolah, koperasi SMU inilah yang menjadi pemenangnya.⁸²

Barang-barang yang dijual di koperasi-koperasi sekolah sangatlah bervariasi. Seperti dijelaskan diatas bahwa koperasi SMK sangat jauh berbeda dengan koperasi SMU (dengan pengecualian SMU yang terpencil) di SMK koperasi tiap-tiap sekolah sangatlah khas mencerminkan kejuruan mereka. Misalnya SMK Grafika, disini koperasi sekolahnya banyak menjual alat-alat kegrafikaan seperti kertas asturo, karton yang beraneka macam, penggaris yang beraneka bentuk, gabus, tinta, dll, sedangkan yang merupakan hasil karya siswa sendiri adalah seperti buku tulis/gambar, agenda, tas, 'file' dll. Di SMK Kesejahteraan Keluarga, koperasi sekolahnya menjual barang-barang seperti pengocok telur, pengering rabut, 'blender', 'juicer'. Barang hasil para siswapun dapat dijumpai

⁸² Sumber: wawancara dengan siswa SMU Negeri Mijen, tanggal 24 Januari 2001.

dikoperasi, mulai dari lauk untuk makan harian seperti sayur asem, lodeh, sup, sampai roti taart untuk ulang tahun. Untuk barang yang terakhir disebut tadi terutama melayani pesanan. Jadi tidak hanya barang hasil kerja siswa saja yang dijual tetapi juga jasa seperti: memotong rambut, cuci muka, menerima pesanan makanan, menerima jahitan pakaian dan lain-lain, dikaitkan dengan koperasi sekolah. Yang sangat menarik adalah yang ada di koperasi SMK Ekonomi, disini koperasi sekolah hampir menyerupai 'supermarket' kecil karena memang berwirausaha seperti inilah salah satu kegiatan yang mereka geluti sebagai siswa SMK Ekonomi. Oleh karena itu apapun yang dibutuhkan hampir semuanya tersedia, mulai dari sandal jepit sampai pakaian jadi. Di SMK Ekonomi ini jasa yang dijual adalah penyelenggaraan 'study tour' mereka bahkan sudah mempunyai sebuah bus untuk tour, sedangkan kekurangannya mereka bekerja sama apabila sakan-kerusakan mesin yang tidak fatal; jasa yang berhubungan dengan peralatan listrik, seperti membetulkan peralatan listrik yang rusak, membuat stabilator, membuat 'charger' untuk aki yang lemah, sedangkan barang-barang hasil siswa jurusan teknik sipil yang dijual dikoperasinya adalah seperti: meja gambar, kusen-kusen pintu/jendela, bingkai-bingkai untuk gambar atau kaca, dan lain-lain.

Barang-barang koperasi biasanya disediakan untuk dibeli oleh anggota-anggotanya. Apabila kegiatan pembelian barang-barang dikoperasi sekolah dihubungkan dengan nilai mata pelajaran yang dicapai pembelinya (anggota-anggota koperasi) maka temuan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

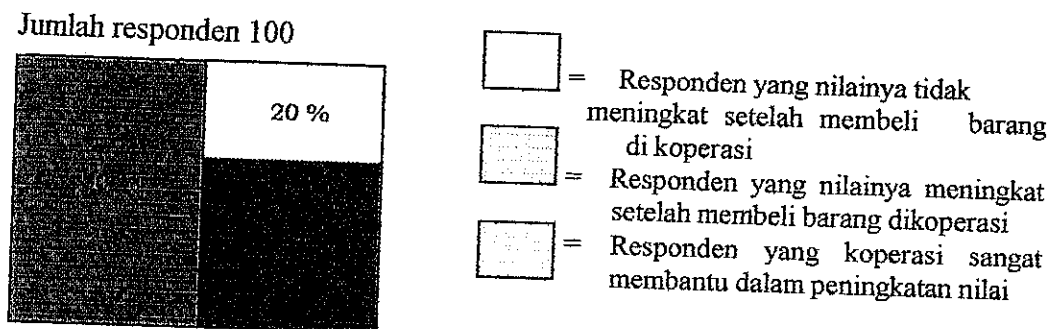


Diagram 19: Peningkatan nilai dan pembelian barang di koperasi sekolah
Sebesar 20 % dari 100 responden tidak merasa menjadi lebih baik nilainya

setelah membeli barang di koperasinya. Mereka dapat digolongkan menjadi siswa yang mampu membeli alat-alat sekolah di luar koperasi yang lebih bagus kualitasnya meskipun harganya lebih mahal, umumnya mereka adalah siswa SMU yang berasal dari keluarga yang berekonomi kuat (mampu/kaya). 30 % responden mengatakan bahwa koperasi sekolahnya dapat membantu hanya setelah mereka membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) yang dijual dikoperasinya, umumnya mereka yang berhasil mengatakan bahwa koperasi sekolahnya dapat membantu hanya setelah mereka Lembar Kerja Siswa (LKS) yang dijual dikoperasinya, umumnya mereka berasal dari SMU.

Sedangkan sisanya 50% menyatakan nilainya membaik setelah membeli barang dari koperasinya. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut: 30 responden menyatakan nilainya meningkat setelah membeli LKS, meskipun hal ini tidak menggambarkan bahwa koperasi membantu meningkatkan nilai yang dicapai tetapi hal ini dapat dijadikan bahan bagi para pengurus koperasi dalam menjual barang-barang kebutuhan anggotanya. Misalnya dengan mengedarkan blangko-

blanko kebutuhan yang diperlukan anggota koperasinya sebulan sekali, atau diberi kotak saran untuk barang-barang yang dibutuhkan, atau yang lain.

50 responden mengatakan sangat dibantu koperasi untuk menaikkan nilai-nilai rapornya, contoh-contohnya adalah sebagai berikut: Beberapa siswa (12 orang) setelah membeli pengocok telur dapat sering mempraktekkan pelajaran memasak di rumah bahkan mencoba-coba yang lain sehingga ada beberapa nilainya yang meningkat, yaitu: memasak makanan kecil, mencipta resep, membuat resep pesanan. Mereka yang membeli pengering dan gunting rambut meningkat nilainya untuk pelajaran: memotong rambut umum, memotong rambut kontemporer, mem'blow' rambut, meyanggul tradisional, meyanggul khusus.⁸³

Untuk siswa SMK teknik umumnya menyatakan kalau mata pelajaran yang nilainya meningkat setelah membeli sesuatu alat/barang dikoperasinya adalah antara lain mata pelajaran menggambar, dan yang berhubungan dengan kegiatan gambar menggambar, sedangkan barang yang dibeli adalah rapido, penggaris, pensil.

Bantuan koperasi yang lain dalam ikut berperan meningkatkan nilai rapor anggotanya adalah ketika mereka harus membeli peralatan yang harus segera dipakai (misalnya ketika tes, kehabisan peralatan) tanpa bantuan barang yang ada dikoperasinya niscaya mereka tak akan mampu mencapai nilai yang lebih baik. Dari sini dapat disimpulkan bahwa dukungan koperasi terhadap meningkatnya nilai rapor siswa sudah relatif bagus yaitu 80% (50 ditambah 30). Jumlah ini

⁸³ Sumber :wawancara dengan siswa SMKK Negeri, 24 Januari 2001.

sudah memberikan gambaran positif akan peran koperasi dalam mendukung kesuksesan anggotanya lewat barang yang dijual, karena ternyata tidak hanya pelajaran praktek saja yang terbantu tetapi juga pelajaran teori. Dengan kata lain kemampuan koperasi sebagai suatu institusi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan anggotanya sudah diakui bermanfaat, sedangkan kemampuan koperasi yang lain adalah kwalitas para anggotanya terhadap institusi koperasinya.

Potensi yang berkaitan dengan mutu anggotanya ini juga berarti banyak dalam usaha peningkatan koperasi sekolah. Bila kualitas anggotanya baik, berarti cenderung merespon positif untuk segala usaha yang dilakukan demi kemajuan koperasi sekolahnya.

Yang pertama adalah kepedulian anggota terhadap sejarah koperasi sekolahnya, sebagai berikut: (lihat diagram 20)

Sebesar 10% dari 100 responden mengerti dengan tepat kapan koperasi sekolahnya berdiri. Hal ini merupakan temuan yang betul-betul mengejutkan

Jumlah responden 100

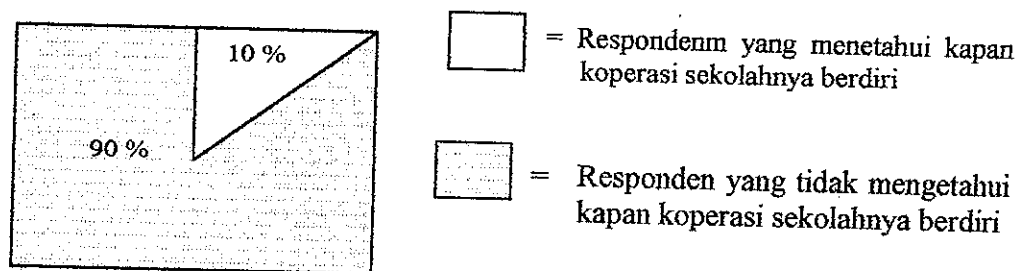


Diagram 20: Berdirinya koperasi

karena biasanya siswa tidak mengetahui hal ini. Setelah ditelusuri lebih lanjut di-

temukan bahwa yang mengetahui tersebut adalah para pengurus koperasi sekolah , jadi wajar bila mereka mengetahui dengan pasti karena dalam kegiatan-kegiatan koperasinya mereka sering membicarakan mengenai kapan koperasi sekolahnya berdiri, terutama bila mengadakan penilaian mengenai kemajuan yang dicapai atau kemunduran yang menimpa koperasinya, misalnya ketika mereka membandingkan jumlah modal yang dimiliki dengan ketika koperasi berdiri untuk pertama kalinya, ketika mereka akan meminta tambahan modal dari sekolahnya (biasanya mereka melihat tambahan modal dari tahun ketahun), ketika dihadapkan pada masalah pembubaran koperasi sekolah karena bendahara yang tidak beres (setelah mengetahui bahwa keberadaan koperasi sekolahnya sudah sangat lama maka pembubaran tidak terjadi), dan lain-lain.

Sebesar 90% dari responden tidak mengetahui kapan koperasi sekolahnya berdiri, seluruh responden yang tidak mengetahui ini adalah para anggota koperasi sekolah dan hanya 1 orang dari kesembilan puluh responden adalah pengurus koperasi. Implikasi data yang diterangkan diatas adalah bahwa sejarah koperasi sekolah cenderung tidak merupakan hal yang penting bagi siswa sebagai anggota koperasi. Temuan ini kiranya dapat dijadikan pendorong bagi para pengurus koperasi untuk perlu mengetahui dengan pasti kapan koperasi sekolahnya berdiri. Bagaimanapun temuan ini masih memberi gambaran positif akan pendirian koperasi sekolah karena tidak semua pelaku koperasi sekolah tidak mengetahui tentang hal ini. Kepedulian anggota akan sejarah koperasi hanya merupakan langkah awal

untuk mengetahui perannya dalam kegiatan pengelolaan koperasinya. Peran aktif anggota dalam koperasi merupakan dukungan utama tercapainya koperasi yang maju dan dinamis.

Berikut ini adalah gambaran keterlibatan anggota dalam kegiatan koperasi sekolahnya.

Jumlah responden 100

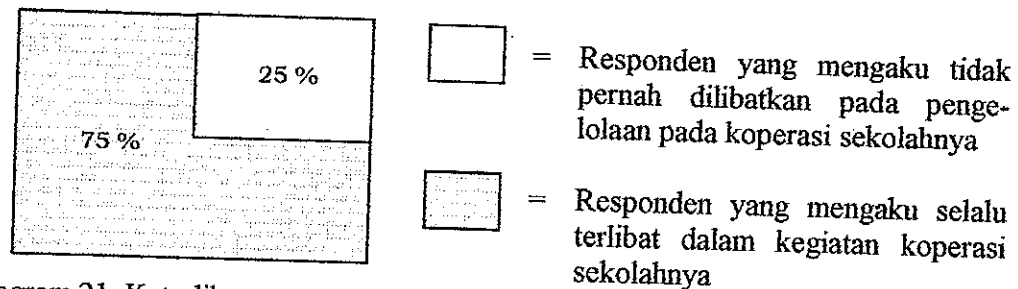


Diagram 21: Keterlibatan anggota koperasi dalam pengelolaan.

Sebesar 75 % dari 100 responden mengaku ikut serta bertanggung jawab dalam pengelolaan koperasinya meskipun tidak aktif, paling tidak mereka telah melakukan kewajiban ketika mendapat tugas jaga di koperasi sekolahnya untuk melayani anggota lain yang berbelanja. Tugas menjaga koperasi biasanya dilaksanakan secara bergiliran, jadi setiap anggota koperasi pernah mengalaminya. Kebiasaan ini sangatlah baik karena dapat memupuk rasa 'memiliki' dan dari sinilah tanggung jawab dapat ditumbuhkan kembangkan. Pengalaman ini kiranya akan menjadi masukan pada usaha mendirikan Gabungan Koperasi Sekolah yaitu mungkin dengan menugaskan siswa secara bergantian dari satu sekolah ke sekolah lain atau gabungan dari bermacam-macam sekolah pada satu saat untuk menjaga koperasi gabungan-nya. Beberapa responden menulis (dalam lembar kuesioner)

kalau mereka bahkan mendapat kesempatan ikut membeli barang-barang yang dijual di koperasinya, dan temuan yang sangat menyenangkan adalah bahwa disemua koperasi sekolah anggotanya pasti dilibatkan dalam pengambilan keputusan akan membeli barang dalam jumlah besar atau yang harganya mahal yang akan dijual di koperasi mereka. Dibeberapa sekolah, seperti yang dikemukakan 13 responden, terdapat kebiasaan bagi anggota koperasi yang bertugas menjaga untuk menulis usulan-usulan seperti barang apa yang laku keras, apa yang kurang laku, apa lagi yang sering ditanyakan pembeli tetapi belum tersedia dikoperasinya. Catatan-catatan kecil ini sangat diperhatikan ketika koperasi membeli barang-barang berikutnya.

25% sisanya menyatakan tidak pernah dilibatkan, tetapi anehnya hal ini bahkan membuat mereka senang berhubung mereka memang sudah sangat sibuk dengan berbagai kegiatan sekolah yang lain, tetapi keaktifan membeli dikoperasinya tetap dilakukan. Selain kesibukan mereka mengatakan lebih senang tidak ditugasi jaga koperasi berhubung mereka harus mengkompensasi kegiatan yang tertinggal dengan mungkin mencatat, ulangan sendiri (terpisah waktunya dengan teman-teman sekelasnya), harus mencatat pelajaran yang mereka tinggalkan untuk menjaga koperasi, dll. Temuan ini menunjukkan kecenderungan pengelolaan yang kurang sempurna berhubung masih ada yang merasa dirugikan. Atau ada implikasi kecenderungan anggota yang kurang loyal terhadap koperasinya.

3. Proses Penggabungan Koperasi Sekolah dalam rangka Peningkatan Eksistensinya.

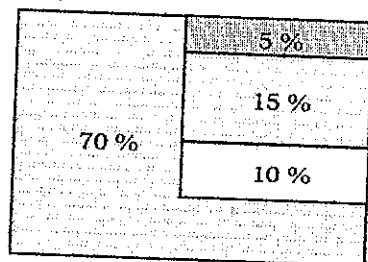
Penelitian ini selain bertujuan utama untuk memperoleh data tentang eksistensi koperasi sekolah dalam kaitannya dengan kualitas pendidikan, juga berusaha mencari data dalam rangka membuat saran akan kemungkinan pembentukan Gabungan Koperasi Sekolah Kota Semarang. Kuesioner untuk data yang kedua tadi disisipkan dalam kuesioner yang dibagikan kepada para responden. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut:

- a/ Ternyata upaya penggabungan koperasi-koperasi sekolah sudah pernah dilon-tarkan oleh Dinas Pelayanan Koperasi Kota Semarang pada tahun 1998 dalam rapat koordinasi rutin pembina koperasi sekota Semarang.
- b/ Secara khusus seorang pengawas SMK pernah melontarkan ide penggabungan koperasi sekolah menjadi Gabungan Koperasi Sekolah.

Namun kedua ide tersebut kandas ditengah jalan dan sampai sekarang belum pernah ditindak lanjuti. Ketika kuesioner disebar maka wajarlah bila tanggapan untuk pertanyaan ini sangat positif, sebagai berikut: (lihat diagram 22)

70% responden menyatakan setuju, 15% yang lain menyatakan terserah, 10% menyatakan ragu-ragu, dan yang 5% menyatakan tidak tahu. Jelas terlihat bahwa mayoritas siswa menyetujui terbentuknya Gabungan Koperasi Sekolah, bahkan dalam penjelasan jawaban mereka rata-rata menulis bahwa satu-satunya kemungkinan meningkatkan koperasinya adalah bergabung dengan koperasi-kope-

Jumlah responden=100







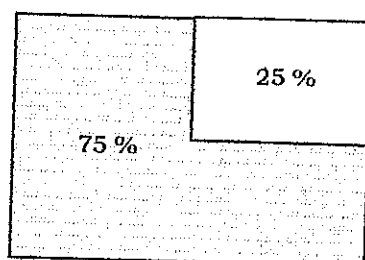
-  = Responden yang mengatakan ragu-ragu terhadap pengembangan koperasi sekolahnya
-  = Responden yang mengatakan setuju terhadap pengembangan koperasi sekolahnya
-  = Responden yang mengatakan tidak tahu terhadap pengembangan koperasi sekolahnya
-  = Responden yang mengatakan terserah terhadap pengembangan koperasi sekolahnya

Diagram 22: Respon terhadap Gabungan Koperasi

rasi sekolah yang lain.. Temuan lain yang perlu dicatat adalah penjelasan para pengurus koperasi sekolah yang menyatakan kemajuan koperasi sekolahnya sangat lamban, dengan bergabung mereka berharap bisa saling tukar pengalaman, bekerja sama, menyatukan modal dan usaha pengembangan sehingga siswa dapat menikmati layanan koperasi secara lebih luas.

Saran yang ditulis anggota dan pengurus ketika ditanya mengenai kepengurusan Gabungan Koperasi Sekolah ini adalah sebagai berikut:

Jumlah responden=100





-  = Responden yang mengatakan kepengurusan dibentuk melalui rapat
-  = Responden yang mengatakan kepengurusan dibentuk dari perwakilan sekolah yang bergabung

Diagram 23: Personil pengurus Gabungan Koperasi Sekolah

75% menyarankan Gabungan Koperasi Sekolah sebaiknya mempunyai pengurus

yang merupakan perwakilan dari sekolah-sekolah yang koperasinya bergabung, jelas mereka adalah bahwa setiap koperasi sekolah yang ikut bergabung harus paling sedikit mempunyai 2 (dua) orang wakil dalam kepengurusan. Lebih lanjut mereka mengusulkan agar jumlah pengurus tidak dipermasalahkan karena lingkup koperasi gabungan akan luas, jadi mungkin tiap-tiap kecamatan ada perwakilannya. Usul lain adalah agar kepengurusan tidak mempertimbangkan jenis sekolah karena koperasi tidak membedakan dari mana asal para anggotanya. 25% responden menyarankan agar kepengurusan dibentuk berdasarkan rapat para kepala sekolah atau guru yang koperasi sekolahnya ikut bergabung. Disini terlihat sangat lucu berhubung mereka yang menyatakan terserah, ragu-ragu, atau tidak tahu ketika diminta pendapatnya tentang kemungkinan didirikan Gabungan Koperasi Sekolah juga memberikan saran mengenai kepengurusan. Hal ini menggambarkan kecenderungan bahwa pada dasarnya merekapun menyetujui gagasan penggabungan ini.

Untuk upaya pembentukan Gabungan Koperasi Sekolah saran responden sangatlah variatif, intinya adalah bahwa mereka menginginkan pengurus koperasi gabungan ini haruslah siswa-siswa yang militan, tangguh dan ulet. Alasan mereka adalah karena tugas-tugas sekolah mereka sudah terlalu banyak sehingga sukar untuk menyisihkan waktu kalau tidak benar-benar ulet, dan tangguh. Ada 3 (tiga) siswa menulis kalau bisa mereka menginginkan koperasi sekolah dikelola oleh pegawai yang dibayar koperasi meskipun siswa masih tetap diberi tanggung jawab, tetapi intinya adalah pegawai tadi.

Sedangkan pembentukannya mereka menyarankan sebagai berikut:

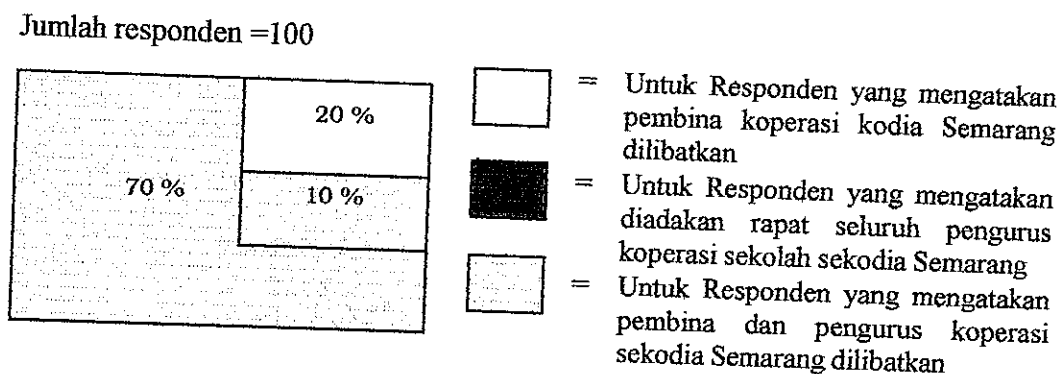


Diagram 24: Pembentukan pengurus Gabungan Koperasi Sekolah

70% menyarankan diadakannya rapat seluruh pengurus koperasi sekolah sekota Semarang, penyelenggaranya adalah koperasi sekolah yang paling maju. Dari sinilah akan terbentuk pengurus dan ide-ide cemerlang akan didapatkan berhubung pengurus-pengurus koperasi sekolah sudah berpengalaman mengurus koperasi masing-masing. 20% responden yang lain menyarankan agar peran pembina-pembina dari Dinas Pelayanan Koperasi Kota Semarang dan Dinas Pendidikan Nasional dimanfaatkan, beliau-belaulah yang sebaiknya mengundang pengurus koperasi-koperasi sekolah untuk bertemu dan bersama-sama mereka membentuk kepengurusan. 10% responden sisanya menyarankan hal yang merupakan gabungan dari keduanya yaitu mengadakan rapat antara pengurus koperasi-koperasi sekolah dan melibatkan pembina koperasi kota Semarang. Dalam hubungannya dengan pembentukan pengurus koperasi gabungan ini ada responden 2 (dua) orang menyarankan agar ahli koperasi (mungkin dari Dinas Pelayanan Koperasi) ikut dimintai perannya. Bahkan mereka juga menyarankan agar perusahaan atau

badan yang sudah bekerja sama dengan dengan koperasi-koperasi sekolah mereka diikuti sertakan dalam rapat pembentukan pengurus, maksudnya adalah agar mereka bersedia bekerja sama dalam hal memasok barang-barang untuk koperasi gabungan tersebut. Mengkaji temuan, usulan, saran para responden yang terdiri anggota dan pengurus koperasi sekolah ini jelas menggambarkan kecenderungan bahwa mereka sangat setuju dengan rencana penggabungan koperasi sekolah SMU dan SMK menjadi Gabungan Koperasi Sekolah Kota Semarang.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai eksistensi koperasi sekolah sebagai bentuk khusus unit ekonomi dalam peningkatan kualitas pendidikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Undang-Undang Koperasi di Koperasi-Koperasi Sekolah

Pelaksanaan Undang-Undang Koperasi di sekolah dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu:

- a. Keberadaan Undang-Undang RI No:25/th.1992 tentang Koperasi tidaklah memberikan rangsangan tumbuhnya koperasi sekolah meskipun tidak menghambat tumbuhnya koperasi-koperasi sekolah tersebut. Undang-undang tersebut hanya memberikan suatu arahan tentang tujuan keberadaan koperasi secara umum bagi usaha menanggulangi kesulitan ekonomi.
- b. Secara yuridis Undang-undang Koperasi Nomor 25/th 1992 tidak dapat diterapkan terhadap koperasi sekolah, karena koperasi sekolah merupakan bentuk khusus unit ekonomi yang mempunyai kekhususan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi pada umumnya. Adapun sifat kekhususannya adalah sebagai berikut:
 - Anggota koperasi sekolah adalah para siswa jadi belum dewasa secara hukum.

- Sifat keanggotaan koperasi sekolah adalah wajib dan hal ini dilaksanakan ketika siswa pertama kali masuk sekolah.

2. Kemampuan Koperasi SMU dan SMK:

- a. Kemampuan koperasi SMU dan SMK dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya sudah relatif memenuhi harapan. Meskipun belum maksimal keberadaan koperasi disekolahnya telah sedikit meringankan beban ekonomi orang-tua anggotanya dan bagi beberapa anggotanya bahkan melancarkan belajarnya. Disisi lain pada sekolah yang koperasinya baik, koperasi sekolahnya cenderung telah memenuhi bahkan mencukupi kebutuhan anggotanya. Kondisi seperti ini menyentuh hati dan menimbulkan suatu obsesi untuk meningkatkan keadaan yang baik ini menjadi lebih baik, yaitu apabila koperasi sekolah dapat dinikmati oleh yang lain dan masyarakat diluar sekolahnya. Salah satu caranya, yang terbukti telah disetujui sebagian besar anggota, pengurus dan pembina koperasi sekolah, adalah dengan meningkatkan eksistensi koperasi-koperasi sekolah. Dengan bergabung koperasi menjadi lebih kuat baik disegi hukum, usaha mensejahterakan anggotanya maupun sebagai tempat pemasaran hasil produksi para anggotanya.
- b. Koperasi ditiap-tiap sekolah meskipun belum memenuhi kebutuhan anggotanya secara maksimal eksistensinya telah diakui oleh masyarakat sekolah.

b. Penggabungan Koperasi Sekolah:

Ada 4 (empat) hal yang melatar belakangi kecenderungan anggota, pengurus dan pembina koperasi sekolah menyetujui penggabungan koperasi sekolah menjadi Gabungan Koperasi Sekolah Kota Semarang, yaitu:

- 1/ Eksistensi koperasi sekolah terasa cenderung membantu melancarkan para siswa dalam mengikuti proses belajarnya.
- 2/ Kondisi negara yang sedang mengalami krisis ekonomi yang tidak kunjung berakhir yang cenderung menyebabkan para siswa SLTA kurang mampu membeli peralatan sekolahnya lebih-lebih siswa SMK yang peralatan untuk praktek berharga lumayan mahal.
- 3/ Harga barang-barang dan biaya kebutuhan hidup yang dari hari kehari menjadi cenderung semakin mahal. Kebutuhan memperoleh pendidikan bukan hal yang murah. Harapan para siswa adalah mendapatkan bantuan pinjaman dari koperasi ketika mereka membutuhkan.
- 4/ Adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25/1992, terutama pasal 14 yang dengan jelas memberikan peluang koperasi untuk berkembang, salah satu pengembangannya adalah dengan bergabung.

B. SARAN

- a. Pemerintah, dalam hal ini pemerintah kota, diharapkan dapat memberikan perhatian terhadap kehidupan koperasi sekolah. Adapun bentuk perhatiannya adalah segera membuat peraturan dan aturan yang ikut mendukung pertum-

buatan koperasi sekolah.

- b. Dalam rangka menata kehidupan koperasi sekolah baik secara yuridis, edukatif, sosial dan ekonomi koperasi sekolah perlu melakukan pembenahan disegala bidangnya. Alasannya adalah karena pendidikan perilaku ekonomi bagi warga-negara perlu dilakukan sedini mungkin, yang paling memungkinkan dan strategis adalah lewat jalur pendidikan yang pada akhirnya hasilnya diharapkan dapat mendukung program pembangunan ekonomi negara.

Dengan adanya keterpaduan antara pola yuridis dan edukatif akan diperoleh suatu keadaan yang kondusif dalam pelaksanaan pembangunan bangsa. Dan yang terakhir yang perlu dipikirkan adalah adanya Badan Pembina Koperasi Sekolah Kota Semarang yang siap memberi bimbingan bila diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- . Amipradja, Talman, 1983, *Ideologi Koperasi dan Sejarah Perjuangan Koperasi Indonesia*, Tarate, Bandung.
- . Ali, Chidir, 1999, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung
- . Anwar, Arsyad, Muhamad Basri, Faisal H, Ikhsan, M Edelen, 1995, *Sumber Daya, Teknologi dan Pembangunan*, Kerjasama FE Universitas Indonesia dan Gramedia, Jakarta.
- . Anoraga, Panji, 1995, *BUMN Swasta dan Koperasi (Tiga Pelaku Ekonomi Dunia)*, Pustaka Jaya, Jakarta.
- . Anoraga, Panji, Ninik Widiyanti, 1999 *Dinamika Koperasi*, Rineka Cipta, Jakarta
- . ----- 1981, *Pengetahuan Perkoperasian (Buku Pelajaran Koperasi Tingkat Pertama)*, Balai Pustaka, Jakarta.
- . ----- 1989, *Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dalam Pelita IV*, Departemen Koperasi Republik Indonesia, Jakarta.
- . ----- 1991, *Model Penampilan Sekolah*, Depdikbud, Dirjen Dikdasmen, Jakarta.
- . -----1992/1993, *Pedoman Pembinaan SMP dan SMA*, Depdikbud Dirjen Dikdasmen, Proyek Peningkatan Sarana dan Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah Umum, Jakarta.
- . ----- 1996, Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia, No 414/KEP/IX/1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan

.. *Kelembagaan dan Usaha Kecil*, Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil.

1 . ----- 1996, *Kurikulum Sekolah Menengah Umum/ Landasan Program* Anonim, 1997, *Koperasi Indonesia, dan Pengembangan*, Depdikbud, Jakarta. Anonim, 1997, *Agenda Aksi "Liberalisasi Ekonomi dan Politik di Indonesia*, PUSAT Pengembangan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro bekerjasama TIARA, Yogyakarta.

.. ----- 1997, *Koperasi Indonesia*, BPFG, Yogyakarta.

.. ----- 1997, *Membangun Koperasi Sepenuh Hati*, Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia, Jakarta.

.. ----- 1997, *Undang-undang Republik Indonesia No 25/1992, tentang Perkoperasian*, Aneka Ilmu, Semarang.

.. ----- 1999, *Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan , Garis-garis Besar Program Pendidikan dan Pelatihan Produktif, Bidang Keakhlian Teknik Mesin, Program Keakhlian Teknik Mekanik Industri*, Depdikbud.

.. ----- 1999, *Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan, Garis, garis Besar Program Pendidikan dan Pelatihan Produktif Bidang Keakhlian Bisnis, Manajemen, Program Keakhlian Sekretaris*, Depdikbud.

.. ----- 1999, *Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan*, Depdikbud.

.. ----- 1999, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (Sebuah Pendekatan Baru dalam Pengelolaan Sekolah untuk Peningkatan Mutu)*, Dirjen Dikdasmen,

Depdikbud, Jakarta.

. Arief, Sritna Melanie, 2001, *Ekonomi Kerakyatan*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.

. Baswir, Revrison, 1978, *Bung Hatta Menjawab, Wawancara Dr M Hatta dengan Dr Z Yasni, Gunung Agung*, Jakarta.

. Burger, DH, 1985 *Perubahan-perubahan Struktur dalam Masyarakat Jawa (diterjemahkan dibawah pengawasan Dewan Redaksi)*, Bhratara Karya Aksara, Jakarta.

. Book, Ake Sven, 1994, *Nilai-nilai Koperasi dalam Era Globalisasi*, Koperasi Jasa Audit Nasional, Jakarta.

. Bowen, E. R, 1953, *The Cooperative Road to Abundance to Monopolism and Communism*, Henry Schuman, New York.

. Chaniago, Arifinal, 1979, *Perkoperasian Indonesia*, Angkasa, Bandung.

. Choirul, Jamhari, 1985, *Kearah Pemahaman Bangun Perusahaan Koperasi (Autologi Esei)*, Badan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Jakarta.

. Drost, J Sj, 1999, *Proses Pembelajaran sebagai Proses Pendidikan*, Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta.

. Dirham, Nurdiana, Feresti, 2000, *Urgensi Reformasi Koperasi, Siapa Takut?*, Jawa-Pos.

. Djumhana, Muhammad, 1994, *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- . Edilius, Sudarsono, 1992, *Koperasi dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- . Effendi, Mochtar, 1982, *Membangun Koperasi di Madrasah dan Pondok Pesantren*, Bhratara Karya Aksara, Jakarta.
- . Gitosardjono, S. Sukamdani, 2000, *Perkembangan Dunia Usaha, Organisasi, Bisnis dan Ekonomi di Indonesia*, Tema Baru, Jakarta.
- . Gitosudarmo, Indriyo, 1996, *Pengantar Bisnis*, BPFE, Yogyakarta.
- . Hadikusumo, Kunaryo, 1996, *Pengantar Pendidikan*, IKIP Semarang Press, Semarang.
- . Hadikusuma, Sutantya, Sumantoro, 1996, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Bentuk-bentuk Perusahaan yang Berlaku di-Indonesia*, Rajawali Pres, Jakarta.
- . Hadikusumo, Rahardja, Sutantyo, 2000, *Hukum Koperasi Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta.
- . Hadi, Sapoetro, Soedarsono, 1986, *Pokok-pokok Pikiran Pengembangan Koperasi di-Indonesia*, Sapta Caraka, Jakarta.
- . Hadiwidjaja, H, 1987, *Modal Koperasi*, Pioner Jaya, Bandung.
- . Hakim Nusantara, ABD. G, Nasroen, Jasabari, 1980, *Beberapa Pemikiran Pembangunan Hukum di-Indonesia*, Alumni, Bandung.
- . Halawa, Ohiao, 1993, *Sepuluh Tokoh Koperasi Indonesia, Pemikiran, Perjuangan dan Minibiografi, Jilid I*, Nias, Jakarta.
- . Hartogi, Winardi, 1976, *Politik Ekonomi*, Tarsita, Bandung.

- Hartono, 1988, *Politik, Ekonomi dan Pembangunan*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hartono, Sisnariyati, CFG, 1988, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Bina Cipta, Jakarta.
- Hatta, M., 1954, *Meninjau Masalah Kooperasi Pembangunan*, Jakarta.
- Hatta, Mohamad, 1995, *Pemikiran Pembangunan Bung Hatta (Kumpulan Tulisan)*, Pustaka LP 3 ES, Jakarta.
- Hendar dan Kusnadi, 1999, *Ekonomi Koperasi untuk Perguruan Tinggi*, Lembaga penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Hendrojogi, 1997, *Koperasi (Azas-azas, Teori dan Praktek)*, Raja Grafindo Utama, Jakarta.
- Head, W. John, 1997, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, Proyek ELIPS, Jakarta.
- Kansil, C.ST, Cristine, 1994, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Bisnis) Bagian 2*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Kartasapoetra, 1991, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 1999, *Pengelolaan Koperasi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kartono, Kartini, 1977, *Tinjauan Holistik mengenai Tujuan Pendidikan Nasional*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- , 1989, *Menemukan Kembali Jati Diri lewat Jalan pendidikan (Kaitan*

- . *Pendidikan dan Sektor Ekonomi*), Mandar Maju, Bandung.
- .. Madjid, Abdul; Swasono, Edi Sri (Editor), 1994, *Wawasan Ekonomi Pancasila*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- . Mubyarto; Revrisond, Baswir, 1989, *Pelaku dan Politik ekonomi Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- . Mubyarto, 1997, *Ekonomi Pancasila*, BPFC, Yogyakarta.
- .. -----, 1998, *Reformasi Sistem Ekonomi dan Kapitalisme Menuju Ekonomi Kerakyatan*, Aditya Media, Yogyakarta.
- . Muhammad, Abdulkadir, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- . -----, 1999, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- . Munker, Hans, H, 1987, *Hukum Koperasi*, Ten Lecture on Cooperative Law, Bandung.
- . -----, 1997, *Masa Depan Koperasi (terjemahan)*, Dewan Koperasi Indonesia, Jakarta.
- .. -----, 2001, *Penemuan Kembali Koperasi dalam Kebijakan Pembangunan*, Yakoma-PGI, Jaskarta.
- . Mutis, Thoby, 1999, *Ragam Koperasi di Mancanegara*, Media Ekonomi Publishing, Jakarta.
- . Pamungkas, Bintang Sri, 1996, *Demokrasi Ekonomi dan Pembangunan*, Yayasan Daulat Rakyat, Jakarta.

- 1. Prayitno, Hadi, *Ekonomi Pembangunan (Pengembangan Ekonomi Pembangunan)*, BPFE, Yogyakarta.
- 2. Purba, TK, 1982, *Apakah Koperasi*, Karya Uni Press, Jakarta.
- 3. Purwo, Saputro Edi, 1999, *Koperasi Berdimensi ke Soko Guruan Ekonomi*, Suara Merdeka, Semarang.
- 4. Rachbini, Didik J, 1996, *Ekonomi Politik (Paradigma Teori dan Perspektif Baru)*, Eides, Jakarta.
- 5. Rahardjo, Dawam M, 1987, *Perekonomian Indonesia (Pertumbuhan dan Krisis)*, LP 3 ES, Jakarta.
- 6. Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- 7. Revinsond, Baswir, 2000, *Jika Sistem Ekonomi Kerakyatan Tak Segera Dilakukan, Bukan Tidak Mungkin Kita akan Terus-menerus Menghadapi Pergolaan Daerah... ..*, Wawasan, Semarang.
- 8. Rido, Ali, 1977, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan Wakaf*.
- 9. Ropke, Jochen, 2000, *Ekonomi Koperasi (Teori dan Manajemen)-Terjemahan*, Salemba Empat, Jakarta.
- 10. Sagimun, MD, 1984, *Mari Kita Berkoperasi (Pelajaran Koperasi Tingkat Dasar)*, Inti Indayu Press, Jakarta.
- 11. Samuel, Paula, 1993, *Ekonomi*, Erlangga, Jakarta.
- 12. Sitio, Arifin, 2001, *Koperasi: Teori dan Praktek*, Erlangga, Jakarta.

- . Soedjono, Ibnoe, (Reimer, Everelt), 1997, *Koperasi di tengah Arus Libealisasi Ekonomi*, Yayasan Farmasi, Jakarta.
- .. Soedomo, 1987, *Sekitar Eksistensi Sekolah*, Naninoita, Yogyakarta.
- . Soemarmo, D, 1998, *Reformasi Bidang Ekonomi 'Koperasi' – Meningkatkan Kemandirian Usaha Kecil dan Menengah dan KUD*, Minijaya Abadi, Jakarta.
- .. Somantrie, Hermawan, 1989, *Perekayasaan Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah (Berdasarkan Undang-undang No 2 Tahun 1989) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pengembangan dan Penalaran)*, Angkasa, Bandung.
- . Sriwijatmo, Djarot, 1982, *Koperasi di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- .. Sudiyono, Armand, 1997, *Koperasi Kita di Persimpangan Jalan*, Republika, Jakarta.
- . Sularso, Sofater, Cs, 1998, *Mengembangkan Strategi Ekonomi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- . Sunaryati, Hartono CFG, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke 20*, Alumni, Bandung.
- . Suroso, P.C. 1997, *Perekonomian Indonesia*, APTIK dan Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- .. Suriyadi, ACE, 1994, *Analisis Kebijakan Pendidikan (Suatu Pengantar)*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- .. Suyono, Db dan Muchtar, Irsyad, 1996, *Koperasi dalam Sorotan Pers (Agenda yang Tertinggal)*, Sinar Harapan, Jakarta.
- .. Sukamdiyo, Ign, 1996, *Manajemen Koperasi*, Erlangga, Jakarta.

- . Suwandi, IMA, 1982, *Seluk Beluk Koperasi Madrasah dan Koperasi Pondok Pesantren*, Bhratara Karya, Jakarta.
- . Suwandi, IMA, 1983, *Seluk Liku Koperasi di-Kalangan Pemuda*, Bhratara Karya Aksara, Bandung.
- . Tim Dosen FIP Malang, 1980, *Pengantar Dasar-dasar Kependidikan*, Usaha Nasional, Surabaya.
- .. Tjiptohariyanto, Priyono, 1983, *Ekonomi Indonesia: Hubungan dan Ketergantungan*, Yayasan Media Bakti Nusantara, Jakarta.
- . Ima, Suwandi, 1983, *Seluk Liku Koperasi di-Kalangan Pemuda*, Bhratara Karya Aksara, Bandung.
- .. Widiyanti, Ninik, 1991, *Manajemen Koperasi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- . Widiyanti, Ninik; Sunindhia, YW, 1998, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- .. Wiryotenoyo, Semedi Broto, Pdt, 1983, *Manusia dan Hak-hak Azasi Manusia*, Satyawacana, Semarang.
- . Yasni, Dr. Z, 1978, *Bung Hatta Menjawab-Wawancara Dr M. Hatta dengan Dr. Z. Yasni*, Gunung Agung, Jakarta.
- .. Uphadi, AD, 1997, *Koperasi, Peraturan dan Kenyataan*, Suara Merdeka, Semarang.
- . Usman, Rachmadi, 2000, *Hukum Ekonomi dalam Demokrasi*, Jambatan, Jakarta.